



Kajian Fiskal Regional **KALIMANTAN SELATAN**

Tahun 2022





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kajian Fiskal Regional **KALIMANTAN SELATAN**

Tahun 2022

Final Edition

Korespondensi

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Jl. D.I. Panjaitan No. 24, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114



(0511) 3354224



ppaiikalsel@gmail.com



Kajian Fiskal Regional **KALIMANTAN SELATAN**

Tahun 2022



Tim Penyusun

Pengarah

Sulaimansyah

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Penasihat

Prof. Muhammad Handry Imansyah, M.A.M., Ph.D.

Guru Besar FEB Universitas Lambung Mangkurat

Ketua Tim

Widhia Arie Prajoga Wijata

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Penyusun

Bekti Hendri Atmoko

Ario Anto Nugroho

Afifah Maulida

Nesya Alvi Inayah

Desain Grafis

Shasza Yemima Puteri Atmodjo

Anggota Tim

Dwi Supriyatno

Libra Andy Chandra Simamora

Saniansyah

Yulia Astuti



MTQ Nasional XXIX Kalimantan Selatan **10-19 Oktober 2022**

“ Kalimantan Selatan dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional XXIX tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 442 Tahun 2020. Perhelatan nasional ini berlangsung 10 - 19 Oktober 2022. Bersama dengan momentum MTQ tersebut diselenggarakan pula MTQ Nasional Kalsel Expo 2022 sebagai wujud partisipasi lembaga dan masyarakat dalam menyemarakkan MTQ Nasional. Acara dimaksud telah berhasil meraup omset lebih dari Rp3,7 miliar. ”

Kata Pengantar

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kajian Fiskal Regional Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan kajian ini disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi *stakeholders* eksternal maupun internal yang antara lain berkaitan dengan perkembangan ekonomi makro daerah, keuangan pemerintah, inflasi daerah, stabilitas keuangan, dan perkembangan akses pembiayaan KUR UMi.

Melalui potret indikator perekonomian yang ada, Kajian Fiskal Regional ini telah menunjukkan kondisi penguatan baik di sisi konsumsi maupun produksi, termasuk neraca perdagangan Kalimantan Selatan yang terus mengalami penguatan seiring dengan membaiknya harga komoditas unggulan Kalimantan Selatan. Sementara itu, belanja negara terus dioptimalkan guna menyokong pemulihan ekonomi Kalimantan Selatan.

Dalam penyusunan laporan ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan banyak memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak. Atas seluruh bantuan dan kerjasama tersebut, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami, hubungan kemitraan yang terjalin baik selama ini dapat dijaga dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

Kami juga mengharapkan masukan dan saran untuk lebih meningkatkan kualitas kajian agar dapat memberikan manfaat yang maksimal. Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah selalu memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas-tugas kita masing-masing untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi Provinsi Kalimantan Selatan, serta bangsa dan negara.



Banjarmasin, 15 Februari 2023

Kepala Kanwil DJPb
Provinsi Kalimantan Selatan

A stylized handwritten signature in white ink, consisting of a large 'S' followed by several vertical strokes.

Sulaimansyah

Daftar Isi

BAB I

Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah

1.1	Pendahuluan.....	01
1.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	02
1.3	Tantangan Daerah.....	05
1.3.1	Tantangan Ekonomi Daerah.....	06
1.3.2	Tantangan Sosial Kependudukan.....	07
1.3.3	Tantangan Geografis Wilayah.....	10
1.3.4	Tantangan Daerah sebagai Dampak Covid-19.....	11

BAB II

Analisis Ekonomi Regional

2.1	Analisis Indikator Makro Ekonomi.....	13
2.1.1	Produk Domestik Regional Bruto.....	13
2.1.2	Suku Bunga.....	17
2.1.3	Inflasi.....	18
2.1.4	Nilai Tukar.....	20
2.2	Analisis Indikator Kesejahteraan.....	22
2.2.1	Indeks Pembangunan Manusia.....	22
2.2.2	Tingkat Kemiskinan.....	24
2.2.3	Ketimpangan (Rasio Gini).....	27
2.2.4	Kondisi Tenaga Kerja & Tingkat Pengangguran.....	29
2.2.5	Nilai Tukar Petani (NTP).....	31
2.2.6	Nilai Tukar Nelayan (NTN).....	33
2.3	Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional.....	34

BAB III

Analisis Fiskal Regional

3.1	Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi.....	37
3.1.1	Pendapatan Negara.....	38
3.1.2	Belanja Negara.....	40
3.1.3	Transfer ke Daerah dan Dana Desa.....	45
3.1.4	Surplus/Defisit APBN.....	49
3.1.5	Pengelolaan BLU Pusat.....	50
3.1.6	Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat.....	53
3.1.7	Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah.....	55
3.2	Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi.....	56
3.2.1	Pendapatan Daerah.....	58
3.2.2	Belanja Daerah.....	61
3.2.3	Surplus/Defisit APBD.....	65
3.2.4	Pembiayaan Daerah.....	66
3.2.5	Perkembangan BLU Daerah.....	66
3.2.6	Isu Strategis Pelaksanaan APBD.....	68
3.3	Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian.....	68
3.3.1	Pendapatan Konsolidasian.....	69
3.3.2	Belanja Daerah.....	70
3.3.3	Surplus/Defisit.....	72
3.3.4	Pembiayaan Daerah.....	72
3.3.5	Perkembangan BLU Daerah.....	72

Daftar Isi

BAB IV

Analisis Sektor Unggulan dan Potensi Regional

4.1	Pendahuluan.....	79
4.2	Sektor Unggulan Daerah.....	83
4.2.1	Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Lapangan Usaha.....	83
4.2.2	Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap Tenaga Kerja.....	86
4.2.3	Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap Pendapatan.....	87
4.2.4	Dukungan Alokasi APBN dan APBD.....	87
4.2.5	Tantangan Fiskal pada Sektor Unggulan Daerah.....	88
4.2.6	Dukungan Kebijakan & Stimulus Fiskal yang Diperlukan.....	88
4.3	Sektor Potensi Daerah.....	88
4.3.1	Profil Sektor Potensial Berdasarkan Lapangan Usaha.....	88
4.3.2	Kontribusi Sektor Potensial Terhadap Tenaga Kerja.....	90
4.3.3	Kontribusi Sektor Potensial Terhadap Pendapatan.....	90
4.3.4	Dukungan Alokasi APBN dan APBD.....	90
4.3.5	Tantangan Fiskal pada Sektor Potensial Daerah.....	91
4.3.6	Dukungan Kebijakan & Stimulus Fiskal yang Diperlukan.....	92

BAB V

Analisis Tematik: Harmonisasi Belanja Pempus dan Pemda

5.1	Pendahuluan.....	93
5.2	Harmonisasi Belanja K/L dengan DFDD.....	94
5.2.1	Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik.....	94
5.2.2	Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Non Fisik.....	98
5.2.3	Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa.....	100
5.3	Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah Berbasis Prioritas Nasional pada RPJMN/D.....	105
5.3.1	Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 1.....	106
5.3.2	Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 2	107
5.3.3	Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 3	108
5.3.4	Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 4	111
5.3.5	Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 5	111
5.3.6	Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 6	113
5.3.7	Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 7	114

BAB VI

Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1	Kesimpulan.....	115
6.2	Rekomendasi.....	118



Festival Jukung Hias Tanglong

28 September 2022

“ Festival Jukung Hias Tanglong merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Banjarmasin dalam rangka memperingati hari jadi Kota Banjarmasin. Jukung hias tanglong yang menampilkan aneka ragam hiasan kreatif, hilir mudik menyusuri Sungai Martapura, menampilkan lebih dekat konsep yang mereka usung di hadapan ribuan pasang mata yang membanjiri Siring Km 0 Menara Pandang. ”

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Sasaran Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan 2021 -2026	03
Tabel 1.2	Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	05
Tabel 2.1	Hasil Reviu Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan	34
Tabel 3.1	I-Account Realisasi APBN Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2020-2022	37
Tabel 3.2	Kontribusi Sektor LU terhadap Penerimaan Pajak	40
Tabel 3.3	Pagu dan Anggaran Belanja K/L 2020-2022	42
Tabel 3.4	Pagu dan Anggaran Belanja Per Fungsi 2020-2022	44
Tabel 3.5	Realisasi Pendapatan dan Belanja BLU	50
Tabel 3.6	Current Ratio UIN Antasari Banjarmasin	52
Tabel 3.7	I-Account Realisasi APBD Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2020-2022	57
Tabel 3.8	LRA Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2022	68
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Perlindungan Sosial di Kalimantan Selatan TA 2022	73
Tabel 3.10	Persentase Kenaikan Nilai Tambah Bruto terhadap PDRB	77
Tabel 4.1	Sebaran Location Quotient Lapangan Usaha Kalimantan Selatan tahun 2018 - 2022	80
Tabel 4.2	Analisis Shift Share Klasik Kalimantan Selatan 2012 – 2022	81
Tabel 4.3	Kuadran Tipologi Klassen Lapangan Usaha Kalimantan Selatan 2018 –2022	82
Tabel 4.4	Hasil Perhitungan MRP Kalimantan Selatan 2021- 2022	83
Tabel 4.5	Penerimaan Pajak Sektor Unggulan Kalimantan Selatan Terhadap Pendapatan Negara/Daerah	87
Tabel 4.6	Alokasi Belanja APBN terkait Sektor Pertambangan dan Penggalan Tahun 2022	87
Tabel 4.7	Penerimaan Pajak Sektor Potensial Kalimantan Selatan Terhadap Pendapatan Negara/Daerah	90
Tabel 4.8	Alokasi Belanja APBN terkait Sektor Industri Pengolahan Tahun 2022	91

Daftar Tabel

Tabel 5.1	Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik	94
Tabel 5.2	Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Non Fisik	99
Tabel 5.3	Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa	101
Tabel 5.4	Harmonisasi Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	106
Tabel 5.5	Harmonisasi Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	108
Tabel 5.6	Harmonisasi Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	108
Tabel 5.7	Belanja K/L untuk Penurunan <i>Stunting</i>	110
Tabel 5.8	Harmonisasi Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	111
Tabel 5.9	Harmonisasi Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	112
Tabel 5.10	Harmonisasi Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	114

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Kerangka Umum Tabel I-O	74
------------------------------------	----

Gambar 4.1 Luas Wilayah Penggunaan Lahan Pertambangan	84
---	----

Gambar 5.1 Harmonisasi/Efektivitas Program APBN dan APBD	93
--	----

Daftar Grafik

Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalsel dan Indonesia (<i>y-o-y</i>)	13
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalsel dan Indonesia (<i>q-to-q</i>)	14
Grafik 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Tahunan 2022 Regional Kalimantan	14
Grafik 2.4	PDRB Nominal ADHK Provinsi Kalimantan Selatan	14
Grafik 2.5	Distribusi PDRB/PDB menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022	15
Grafik 2.6	Struktur dan Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2022	16
Grafik 2.7	Perkembangan PDRB per Kapita Nasional dan Kalsel	17
Grafik 2.8	Perbandingan BI7DRR dan Tingkat Inflasi Kalsel	17
Grafik 2.9	Target dan Capaian Inflasi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 (<i>y-to-d</i>)	18
Grafik 2.10	Perkembangan Inflasi tahun 2019 – 2022 (<i>m-to-m</i>)	19
Grafik 2.11	Inflasi di Kalimantan tahun 2022 (<i>yoy</i> atau <i>ytd</i>)	20
Grafik 2.12	Pergerakan USD terhadap Rupiah dan Neraca Perdagangan	21
Grafik 2.13	Indeks Pembangunan Manusia Kalsel dan Nasional Tahun 2015 – 2022	22
Grafik 2.14	Komponen Pembentuk IPM Kalsel dan Nasional	22
Grafik 2.15	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Kalsel 2021 – 2022	23
Grafik 2.16	IPM di Kalimantan tahun 2022	24
Grafik 2.17	Perkembangan Jumlah dan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Selatan	25
Grafik 2.18	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tempat Tinggal	25
Grafik 2.19	Indeks Kedalaman Kemiskinan	26
Grafik 2.20	Indeks Keparahan Kemiskinan	26
Grafik 2.21	Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan	26
Grafik 2.22	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem di Kalsel	26
Grafik 2.23	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> di Kalimantan Selatan	27
Grafik 2.24	<i>Gini Ratio</i> di Kalimantan	28
Grafik 2.25	Distribusi Pengeluaran Penduduk Kalimantan Selatan	28
Grafik 2.26	Tingkat Partisipasi Angkatan Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Selatan	29
Grafik 2.27	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Selatan	29
Grafik 2.28	TPT Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kalimantan Selatan	30
Grafik 2.29	TPT di Kalimantan tahun 2022	30
Grafik 2.30	Penduduk Usia Kerja yang terdampak Covid-19 di Kalimantan Selatan	31
Grafik 2.31	Pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Selatan	32
Grafik 2.32	NTP di Kalimantan Desember 2022	32
Grafik 2.33	Pergerakan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kalimantan Selatan	33
Grafik 2.34	NTN di Kalimantan Desember 2022	33

Daftar Grafik

Grafik 3.1	Pajak Dalam Negeri 2020-2022	38
Grafik 3.2	Pajak Perdagangan Internasional 2020-2022	38
Grafik 3.3	Kontribusi Komponen Penerimaan terhadap Total Pendapatan Tahun 2022	38
Grafik 3.4	<i>Tax Ratio</i> Kalimantan Selatan 2018-2022	39
Grafik 3.5	PNBP 2020-2022	40
Grafik 3.6	Alokasi dan Realisasi Belanja 2020-2022	41
Grafik 3.7	Belanja Per Jenis 2020-2022	41
Grafik 3.8	Proporsi Belanja Pemerintah 2022	42
Grafik 3.9	Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020-2022	45
Grafik 3.10	Dana Transfer Umum 2020-2022	46
Grafik 3.11	Dana Bagi Hasil 2020-2022	46
Grafik 3.12	Dana Alokasi Fisik 2020-2022	47
Grafik 3.13	DAK Non Fisik 2020-2022	47
Grafik 3.14	Dana Insentif Daerah 2020-2022	48
Grafik 3.15	Dana Desa 2020-2022	48
Grafik 3.16	Surplus/Defisit APBN 2018-2022	49
Grafik 3.17	Pendapatan Satker PNBP	51
Grafik 3.18	Pendapatan UIN Antasari	52
Grafik 3.19	Kinerja KUR 2018-2022	53
Grafik 3.20	Kinerja Umi 2018-2021	54
Grafik 3.21	Perkembangan PAD 2020-2022	59
Grafik 3.22	Komposisi Pendapatan Daerah 2020 – 2022	59

Daftar Grafik

Grafik 3.23	Komposisi Pendapatan Daerah 2020 – 2022	59
Grafik 3.24	Perkembangan Pendapatan Transfer 2020 – 2022	60
Grafik 3.25	LLPDyS 2020 – 2022	61
Grafik 3.26	Proporsi Jenis Belanja terhadap Belanja APBD	62
Grafik 3.27	Belanja Operasi 2020 – 2022	62
Grafik 3.28	Perkembangan Belanja Modal 2020 - 2022	63
Grafik 3.29	Perkembangan Belanja Tidak Terduga 2020 – 2022	63
Grafik 3.30	Perkembangan Belanja Transfer 2020 - 2022	64
Grafik 3.31	Belanja Daerah per Fungsi 2020-2022	64
Grafik 3.32	Perkembangan Surplus/Defisit APBD 2020 - 2022	65
Grafik 3.33	Perkembangan Pembiayaan Daerah 2020-2022	66
Grafik 3.34	Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah 2020-2022	66
Grafik 3.35	Kontribusi Pendapatan BLUD terhadap Total PAD di Kalimantan Selatan	67
Grafik 3.36	Perkembangan Pendapatan BLUD di Kalimantan Selatan	67
Grafik 3.37	Perkembangan Pendapatan Konsolidasian	69
Grafik 3.38	Kontribusi Komponen Pendapatan Konsolidasian	70
Grafik 3.39	<i>Tax Ratio</i> Kalimantan Selatan	70
Grafik 3.40	Komponen Belanja Konsolidasian di Kalimantan Selatan	70
Grafik 3.41	Kontribusi Komponen Belanja Konsolidasian	71
Grafik 3.42	Perkembangan Belanja per Kapita	71
Grafik 3.43	Defisit Anggaran Konsolidasian	72
Grafik 3.44	Pembiayaan Konsolidasian 2020-2022	72
Grafik 3.45	Kontribusi Belanja dan Investasi Pemerintah terhadap PDRB	73

Daftar Grafik

Grafik 4.1	Distribusi PDRB Kalimantan Selatan per Lapangan Usaha Tahun 2021-2022	79
Grafik 4.2	Produksi Batu Bara Prov. Kalsel	85
Grafik 4.3	Penjualan Batu Bara Prov. Kalsel	85
Grafik 4.4	Perkembangan Harga Batu Bara	85
Grafik 4.5	Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama Kalimantan Selatan tahun 2018-2022	86

Ringkasan Eksekutif

01

Kondisi Daerah

Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 adalah **“Memantapkan pemulihan ekonomi dan sosial dengan memperhatikan lingkungan”**. Terdapat enam prioritas pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Arah kebijakan fiskal harus berkelanjutan guna meningkatkan kepercayaan pasar global dan daya tahan perekonomian domestik. Dalam proses pembangunan, Provinsi Kalimantan Selatan masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerataan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas. Keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan.

02

Indikator Makro dan Kesejahteraan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV tahun 2022 tumbuh melambat dari triwulan sebelumnya dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional secara **year-on-year**. Pada periode ini, ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,32% y-o-y dan 5,11% c-to-c. Jika dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nominal, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selama tahun 2022 telah mencapai Rp251,26 triliun dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan 2010 mencapai Rp142,34 triliun. Inflasi di Kalimantan Selatan melonjak naik hingga mencapai 6,99% (yoy) atau melebihi angka nasional. Pada periode yang sama, angka inflasi direspon dengan suku bunga yang naik hingga 5,50%. Kondisi ini kemudian berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang tak terkecuali Rupiah dan neraca perdagangan di Kalimantan Selatan. Pembangunan manusia terus mengalami kemajuan yang hingga pada tahun 2022 IPM yang meningkat telah mencapai 71,84. Tingkat kemiskinan masih tergolong baik yang berada pada urutan ke-2 terendah di Indonesia atau yang mencapai 4,61%, *gini ratio* juga turut mengalami penurunan yang menunjukkan pemerataan mencapai 0,309, dan tingkat pengangguran yang turut menurun dari periode sebelumnya hingga mencapai 4,74%. Nilai Tukar Petani mencapai 105,88 dan Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2022 mencapai 97,29.

03

Perkembangan Fiskal di Daerah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Selatan sampai dengan akhir tahun 2022 menunjukkan capaian yang sangat baik. Pencapaian ini ditandai dengan pendapatan negara yang telah mencapai Rp18.232,76 miliar atau 125% dari target yang ditetapkan serta lebih tinggi 53,51% dari capaian pada tahun 2021. Di sisi lain, belanja negara telah terealisasi hingga Rp34.000,12 miliar. Penyerapan belanja negara yang impresif ini juga mengalami kenaikan dari tahun 2021, yaitu tumbuh 28,76%. **Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 menunjukkan capaian yang positif.** Capaian yang baik ini ditunjukkan dengan realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp29.240,05 miliar atau 101,29% dari target serta tumbuh 26,33% dari pencapaian pada tahun sebelumnya. Selain itu, secara keseluruhan penyerapan belanja daerah juga telah dilaksanakan dengan cukup baik yaitu dengan terealisasinya belanja sebesar Rp26.178,46 miliar atau 83,69% dari pagu. Besaran ini juga memiliki kenaikan sebesar 8,59% dari realisasi pada tahun 2021.

04

Analisis Tematik

Berdasarkan hasil analisis terkait harmonisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dari kategori/bidang yang dianalisis dari Belanja K/L, DAK Fisik, DAK NonFisik, dan Dana Desa, secara umum terdapat keselarasan antara Belanja K/L dengan TKD yang penyalurannya dilakukan oleh KPPN. Namun demikian, terdapat beberapa kategori/bidang yang masih kurang selaras dalam hal satuan capaian output sehingga perlu dilakukan proses lebih lanjut untuk mendapatkan data capaian yang akurat. **Analisis harmonisasi belanja pusat dan daerah berbasis Prioritas Nasional (PN) yang diidentifikasi terhadap major project untuk setiap PN yang lokasinya di Kalsel, diketahui bahwa terdapat *major project* belum memiliki alokasi anggaran pada belanja pusat dan belanja daerah.** Berdasarkan hasil indentifikasi dan *tracking* ditemukan adanya keterkaitan dan harmonisasi antara belanja pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan *major project* di Kalsel.

05

Rekomendasi Kebijakan

Dalam upaya mendukung kinerja fiskal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalsel, **berikut beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah diantaranya adalah:**

Aspek Perencanaan dan Penganggaran

Penganggaran yang kurang akurat, yaitu ketika alokasi dana lebih besar dari standar biaya menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran, sementara di satu sisi dalam kebijakan SMART DJA menuntut efisiensi sebagai penilaian. Hal ini membuat kontradiksi, untuk itu kepada pemerintah pusat perlu kiranya melakukan harmonisasi yang jelas antara kebijakan penganggaran, penyerapan anggaran dan efisiensi anggaran.

Aspek Pendapatan Negara dan Daerah

Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah masih tergolong rendah dan tergantung dari pendapatan transfer pemerintah pusat hingga 70% persentase pendapatan transfer. Oleh karena itu kepada pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi pendapatan daerah melalui pengembangan diversifikasi maupun hilirisasi sektor unggulan dan potensi daerah serta peningkatan basis Pendapatan Asli Daerah.

Aspek Belanja Negara dan Daerah

Penumpukan belanja negara maupun daerah di akhir tahun masih menjadi stigma negatif yang belum berubah. Oleh karena itu kepada *stakeholder* baik pusat maupun daerah dapat melakukan peningkatan efektivitas belanja melalui evaluasi *value for money* yang terdiri atas tiga prinsip yaitu, ekonomis, efisien, dan efektif.

Aspek Surplus/ Defisit dan Pembiayaan Daerah

Pemerintah pusat maupun daerah perlu mendorong perluasan sumber pendanaan dalam membiayai pembangunan di daerah dengan membuat terobosan-terobosan dalam penyediaan pendanaan melalui pembiayaan kreatif (*creative financing*) seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) guna akselerasi pembangunan daerah.

DASHBOARD FISKAL REGIONAL

Kalimantan Selatan

INDIKATOR MAKRO EKONOMI

PDRB TW-IV

Atas Dasar Harga Berlaku

67,58 T

Atas Dasar Harga Konstan

36,76 T



Pertambangan
Penggalan
9.209,48



Pertanian
Perikanan
4.287,79



Transportasi
2.442,16



Perdagangan
Besar Eceran
3.348,28



Konstruksi
2.957,86



Industri
Pengolahan
5.013,49

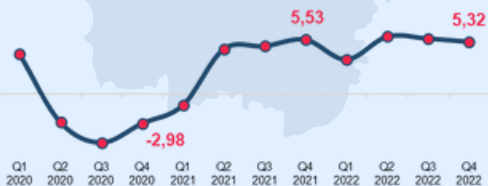
Perekonomian di Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lapangan usaha yang berkontribusi paling besar terhadap PDRB di Kalimantan Selatan adalah Pertambangan dan Penggalan dengan andil 25,05% terhadap total PDRB.

PERTUMBUHAN EKONOMI

↑5,32% YOY

Q-TO-Q **-0,28%**

C-TO-C **5,11%**



INFLASI

0,69%^{MTM}

6,99%^{YTD}

Kontributor Inflasi



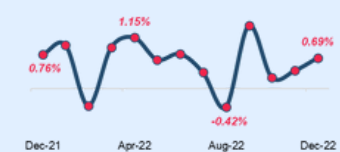
Pakaian
0,02%



Perawatan
0,06%



Makanan
0,76%



Inflasi di 3 Kota/Kabupaten

	Banjarmasin	0,72%
	Kotabaru	0,58%
	Tanjung	0,48%

INDIKATOR KESEJAHTERAAN

TINGKAT KEMISKINAN

4,61%



Pedesaan
114,95 ribu jiwa



Perkotaan
87,00 ribu jiwa

201,95 RIBU JIWA

Pada September 2022, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan tercatat sejumlah 201,95 ribu jiwa dengan persentase tingkat kemiskinan 4,61%. 57% penduduk miskin di Kalimantan Selatan tinggal di Pedesaan dan sekitar 43% tinggal di Perkotaan.

TINGKAT KETIMPANGAN (GINI RASIO)

0,309



Pedesaan
0,273



Perkotaan
0,329



Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Kalimantan Selatan adalah sebesar 0,309, termasuk ke dalam kategori ketimpangan rendah (<0,4).



TINGKAT PENGANGGURAN

4,74% ↓4,20%

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

71,84% ↑0,79%

Sejak tahun 2018, status pembangunan manusia Kalimantan Selatan meningkat dari level "sedang" menjadi level "tinggi". IPM 2022 meningkat 0,56 poin dibandingkan dengan indeks tahun 2021.

PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

67,55% ↓1,71% poin

	SD KEBAWAH	44,17%
	SMP	15,67%
	SMA	28,13%
	DIPLOMA DAN UNIVERSITAS	12,02%



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kalimantan relatif tinggi di angka 67,55%. Di sisi lain, kualitas angkatan kerja cukup rendah sebab masih di dominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan terakhir SD/ SD kebawah.

NILAI TUKAR PETANI

105,88 ↑1,25%



Peningkatan NTP dipengaruhi oleh peningkatan harga beberapa komoditas pertanian, utamanya tanaman pangan, seperti gabah, jagung, ubi, dll.

NILAI TUKAR NELAYAN

97,29 ↓2,03%



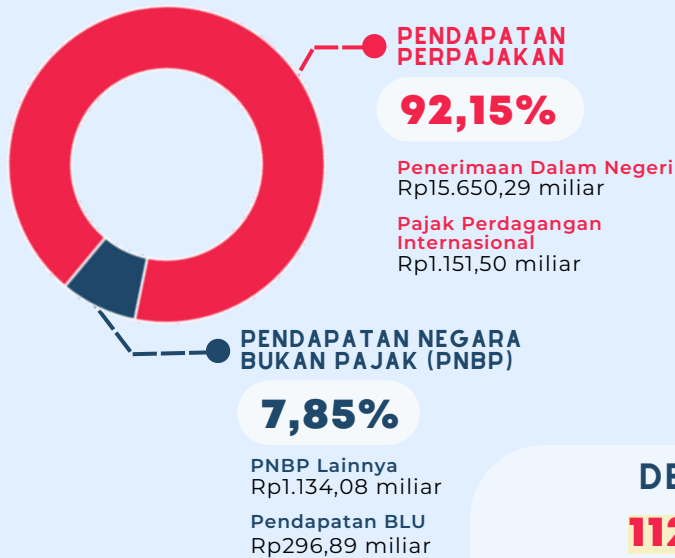
Penurunan NTN disebabkan oleh turunnya harga beberapa komoditas ikan serta naiknya biaya produksi dan penambahan barang modal serta konsumsi rumah tangga nelayan.

KINERJA FISKAL REGIONAL

APBN

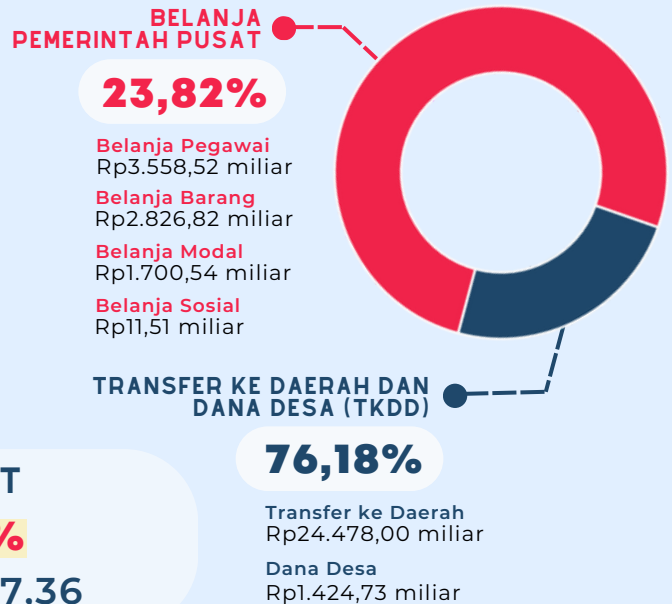
REALISASI PENDAPATAN

125,0% Rp18.232,76 miliar



REALISASI BELANJA

118,0% Rp34.000,12 miliar



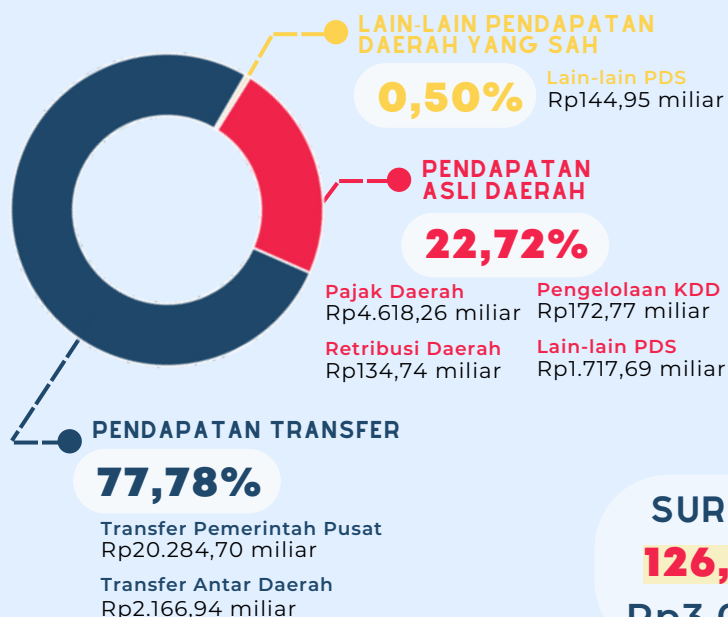
DEFISIT

112,0%
Rp15.767,36

APBD

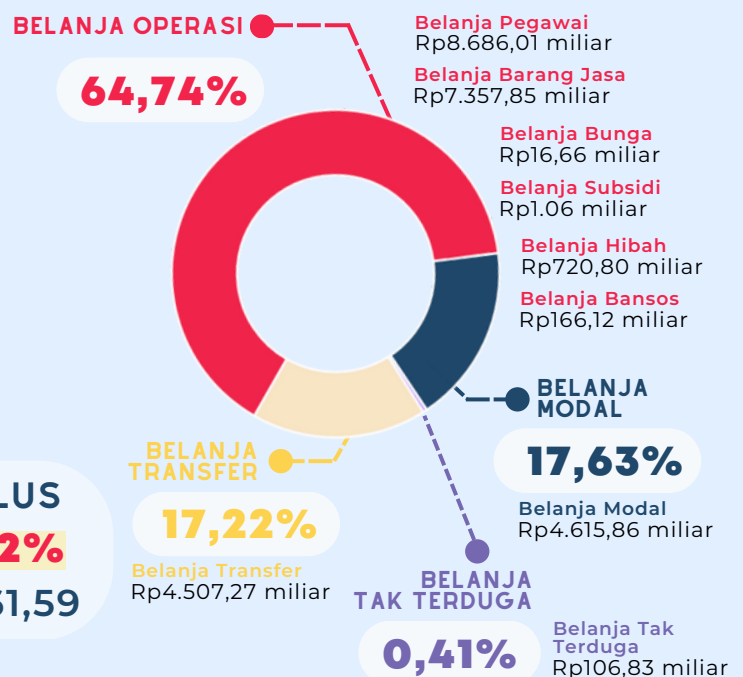
REALISASI PENDAPATAN

101,29% Rp29.240,05 miliar



REALISASI BELANJA

83,69% Rp26.178,46 miliar



SURPLUS

126,92%
Rp3.061,59

Bab I

Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah

Highlight

- Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan periode 2021-2024 “Makmur Sejahtera Berkelanjutan”, dituangkan dalam misi yang berfokus pada Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, mendorong perekonomian yang merata, serta memperkuat sara dan prasarana dasar perekonomian.
- Isu strategis sekaligus tantangan Kalimantan Selatan berkenaan kualitas lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, penguatan ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta posisi sebagai gerbang ibu kota negara baru.



Festival Pasar Terapung Lok Baintan **30 Oktober 2022**

“ Festival Pasar Terapung Lok Baintan 2022 digelar di sepanjang dermaga bawah jembatan, Sungai Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Festival ini kembali diadakan sebagai tanda kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan pasca pandemi Covid-19. Di samping untuk menarik kunjungan wisata, atraksi budaya yang diramaikan oleh lebih dari 500 pedagang dan UMKM se-Kalsel itu juga diselenggarakan untuk melestarikan warisan budaya sungai masyarakat Banjar. Selain itu, masyarakat dapat menikmati berbagai hiburan mulai dari baturai pantun hingga *live music*. ”



1.1 Pendahuluan

Pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan Negara adalah Presiden, sedangkan di daerah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adil dan merata perlu dukungan APBN maupun APBD. Implementasi kebijakan fiskal di daerah diperlukan sinergi dan harmonisasi kebijakan pengelolaan keuangan pusat dan daerah agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Melalui tiga fungsi sebagai alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi, kebijakan fiskal yang efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan perbaikan dan kualitas indikator-indikator ekonomi makro dan kesejahteraan di daerah yang dapat terlihat dari indikator makro ekonomi dan kesejahteraan. Perumusan kebijakan fiskal melalui program prioritas untuk mengatasi tantangan-tantangan daerah dari sisi ekonomi, sosial kependudukan serta tantangan wilayahnya sehingga dapat tercapai kebijakan fiskal yang efektif dan efisien.

Visi yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan adalah **KALIMANTAN SELATAN MAJU** (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibu Kota Negara, yang kemudian dituangkan dalam beberapa misi yaitu:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berbudi pekerti luhur.

Pemprov Kalsel fokus ke bidang pendidikan, karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel masih di bawah rata-rata nasional, walaupun sudah pada kategori yang terus menaik tinggi yaitu di urutan ke-20an. Kalsel akan mengejar, supaya minimal bisa sama dengan IPM nasional. Pelaksanaan atas misi ini diwujudkan melalui rencana proyek prioritas Daerah, yang meliputi memperkuat ketahanan masyarakat terhadap penyakit menular, penurunan perkawinan anak, penurunan *stunting*, AKI/AKB berbasis pemberdayaan desa wisata, meningkatkan Pendidikan vokasi berbasis “*link and match*” berbasis digital, memperkuat Balai Latihan Kerja untuk peningkatan keterampilan kerja berbasis digital, serta memperkuat nilai keagamaan dan sosial budaya, dan meningkatkan indeks kepemudaan dan olahraga.

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Perwujudan atas misi ke-2 berupa meningkatkan ekonomi melalui transformasi struktur ekonomi dari komoditas bahan mentah ke industri turunannya (hilirisasi) dan sektor-sektor produktif lainnya. Misi dilaksanakan melalui proyek prioritas Daerah yang meliputi hilirisasi pertambangan dan pertanian, mendorong ekonomi syariah, mengembangkan pariwisata berbasis alam (ekowisata), mendorong ekonomi kreatif kearifan lokal berbasis teknologi digital, serta mendorong perdagangan berbasis digital. Mendorong industri-industri, di mana industri tidak hanya menjual batu bara mentah, CPO dan karet saja, tetapi industri turunannya.

3. Memperkuat sarana dan prasarana dasar perekonomian.

Proyek prioritas Daerah yang dilaksanakan untuk mewujudkan misi ke-3 ini meliputi pemenuhan sarana prasarana standar hidup layak, pembangunan Kawasan Industri untuk mendukung IKN akan difokuskan kepada pembangunan jalan-jalan yang mendukung ekonomi, kawasan-kawasan seperti kawasan industri Batulicin dengan Banjar Bakula, pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan pertumbuhan ekonomi diantaranya pembangunan jalan kereta api oleh investor, pembangunan bendungan yang multi fungsi selain menyediakan air, listrik juga untuk mengedalikan banjir, serta penyediaan sumber energi terbarukan, dan pemenuhan akses internet dengan melakukan pembangunan jaringan internet supaya jangan ada lagi blankspot karena ke depan transformasi digital ini sudah menjadi sebuah keharusan yang sekarang ini sudah menjadi kewajiban.

4. Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik.

Misi ke-4 ini dilaksanakan melalui proyek prioritas pengembangan *smart province*, perizinan melalui *Online Single Submission*, serta menjaga stabilitas polhukam. Akan mentransformasikan diri ke pemanfaatan digital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan dengan menggunakan digital. Demikian juga pemanfaatan lainnya seperti untuk pendidikan dan sebagainya, termasuk di sektor pertanian.

5. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan bencana.

Sebagai pelaksanaan misi ke-5 ini, proyek prioritas yang dijalankan berupa pembangunan ramah lingkungan, hutan yang habis akan dijaga melalui revolusi hijau dengan program *Geopark* dengan melakukan menanam kembali, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penanganan pengendalian banjir, serta pengendalian pencemaran lingkungan dimana pencemaran air di Kalsel sudah mencapai kategori perlu dikendalikan untuk menurunkan tingkat pencemaran air.

Selanjutnya untuk memastikan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan di Kalimantan Selatan sebagaimana visi dan misi Kepala Daerah Kalimantan Selatan terpilih periode 2021-2024, perlu dilakukan pengukuran atas indikator-indikator makro dan kesejahteraan. Sebagai acuan teknokratik, indikator-indikator tersebut adalah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 Kalimantan Selatan.

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Guna menjamin keselarasan dan sinkronisasi antar tahapan pembangunan, disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah (RPJMD) untuk setiap 5 (lima) tahun. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun dengan mengacu pada RPJMD.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Selain itu target-target nasional yang dicanangkan dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang perlu mendapatkan dukungan dari Provinsi Kalimantan Selatan juga mendasar dalam penentuan target dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, berikut target dan sasaran RPJMD.

Tabel 1.1 Sasaran Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan 2021 -2026

Sasaran Makro Kesra	Target RPJMD 2021-2026					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,48	4,00-4,50	4,50-5,20	5,20-6,00	6,00-6,24	6,24-6,50
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,28	71,70	72,20	72,65	73,05	73,50
Tingkat Kemiskinan (%)	4,83	4,80-4,60	4,60-4,40	4,40-4,22	4,22-4,05	4,05-3,77
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,95	4,39	4,22	4,05	3,88	3,71
Indeks Gini	0,330	0,328	0,326	0,324	0,322	0,310
Nilai Tukar Petani (%)	101,58	102,23	102,70	103,18	103,69	103,80
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,26	70,58	70,90	71,22	71,54	71,86
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	138	138	135	132	129	126
Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,34	8,70	8,56	8,65	8,74	8,83
Angka Harapan Hidup	68,83	70,64	71,05	71,46	71,99	72,30
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,26	69,74	69,94	70,16	70,38	70,60
Indeks Kualitas Air (Indeks)	55,90	55,97	56,04	56,12	56,19	56,26

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan (data diolah)

Prioritas pembangunan tiap tahun dituangkan dalam RKPD yang disusun mengacu pada RPJMD menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Perencanaan ditekankan pada penyelesaian permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat provinsi, wilayah dan nasional. Adapun tema RKPD tahun 2022 adalah memantapkan pemulihan ekonomi dan sosial dengan memperhatikan lingkungan. Tema tersebut diturunkan menjadi 4 fokus pembangunan sebagai berikut.

1. Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian dan Pariwisata
4. Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan dan Covid-19

Selanjutnya dari tema disusun prioritas pembangunan yang menjadi sebuah arahan dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sasaran pembangunan daerah dan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

- a. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian dan Pariwisata (PD 1)
- b. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (PD 2)
- c. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian (PD 3)
- d. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (PD 4)
- e. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana (PD 5)
- f. Kalsel Sebagai Gerbang dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru (PD 6)

Program prioritas dan arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2022 yang mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” sedangkan arah kebijakan fiskal harus berkelanjutan guna meningkatkan kepercayaan pasar global dan daya tahan perekonomian domestik. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) menjadi dokumen dasar dari Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dalam membiayai pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. Pembiayaan pembangunan Kalimantan Selatan bersumber dari APBD yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk melaksanakan program dan kegiatan sehingga sasaran/target pembangunan dapat tercapai. Sejalan dengan RPJMD, maka sasaran pembangunan Kalimantan Selatan pada RKPD adalah sebagai berikut.



Tabel 1.2 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3 – 5,9	4,0 – 4,5	4,5 – 5,2
2	Laju Inflasi	%	2,4	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0
3	PDRB Perkapita ADHB	(Juta Rupiah/Org)	N/A	47,50 – 49,61	49,61 – 51,60
4	PDRB Perkapita ADHK	(Juta Rupiah/Org)	N/A	33,16 – 34,16	34,16 – 35,70
5	Indeks Gini	Indeks	0,375 – 0,378	0,328	0,324
6	Tingkat Kemiskinan	%	7,0 – 8,0	4,80 – 4,60	4,50 – 4,00
Fokus Kesejahteraan Sosial					
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,29 – 73,35	71,70	72,20
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	N/A	12,94	13,07
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	N/A	8,47	8,56
4	Angka Harapan Hidup	Tahun	N/A	70,64	71,05
5	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	N/A	N/A	1,19
6	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	N/A	N/A	10,02
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,52 – 6,24	4,39	4,22

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Selatan (data diolah)

1.3 Tantangan Daerah

Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan Tahun 2022 terus membaik seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian permasalahan pembangunan masih akan terjadi. Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa

depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada saat-saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis yang ada, maka pemetaan tantangan yang dihadapi oleh Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

1.3.1 Tantangan Ekonomi Daerah

Dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian daerah menjadi salah satu yang membuat struktur ekonomi berkelanjutan masih belum kuat. Masih tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian harus menjadi perhatian mengingat sektor tersebut merupakan sektor yang tidak dapat diperbarui sumber dayanya, sehingga perlu kebijakan riil terkait transformasi struktur ekonomi ke sektor lain seperti Industri, Pertanian dan Pariwisata dalam rangka mempertahankan kinerja perekonomian daerah untuk kedepannya. Oleh karenanya, tantangan ekonomi daerah Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tantangan dalam mengelola potensi sumber daya alam

Sebagai bagian dari Pulau Kalimantan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Potensi sumber daya tersebut selama ini cukup tinggi sehingga menyebabkan berbagai kerusakan-kerusakan lingkungan hidup. Degradasi lingkungan akibat proses eksploitasi terhadap lahan dan tanah, seperti yang terjadi pada proses penambangan timah, emas, batu bara dan lain sebagainya. Dari capaian indeks lingkungan hidup menjelaskan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan belum berjalan dengan baik, hal ini menunjukkan pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal. Tantangan dalam mengelola potensi sumber daya alam yaitu belum terdiversifikasinya sektor ekonomi serta hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam hal ini menyebabkan struktur perekonomian daerah berkelanjutan yang masih belum kuat.

2. Tantangan dalam menciptakan iklim dan potensi investasi yang kondusif

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) memberikan tantangan sekaligus peluang investasi bagi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai daerah penyangga ibu kota negara. Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan harus dapat merencanakan pembangunan infrastruktur untuk akses yang lebih strategis untuk menopang ibukota negara menjadi prioritas kedepannya. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sebagai gerbang IKN dan *food estate* menjadi tantangan dalam meningkatkan potensi investasi di Kalimantan Selatan.



3. Tantangan birokrasi dan pelayanan perizinan

Dalam perwujudan good governance di setiap lingkungan pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni *accountability, transparency, predictability, dan participation*. Provinsi Kalimantan selatan dalam menjalankan roda pemerintahannya berusaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi setiap penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan. Perlunya indikator kinerja secara berjenjang dari level instansi sampai dengan individu untuk memastikan setiap level organisasi memiliki kontribusi yang jelas untuk pencapaian sasaran instansinya. Tantangan birokrasi yang dihadapi yaitu belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan ke masyarakat berbasis digital dan belum efektifnya peningkatan tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap pelayanan perizinan.

4. Tantangan dukungan permodalan, infrastruktur ekonomi

Pemerataan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas memerlukan dukungan permodalan cukup besar. Keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan menjadi tantangan tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa tantangan yang dihadapi yaitu: (1) Perpindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur dan penetapan food estate di Kalimantan Tengah. (2) Tingkat kemandirian fiskal yang masih belum optimal dalam penyediaan sumber pendanaan pembangunan. (3) Masih tingginya proporsi belanja operasional (penunjang) sehingga belum dapat optimal percepatan pembangunan. (4) Belum optimalnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran pembangunan. (5) Belum optimalnya sinkronisasi anggaran daerah dan sasaran pembangunan nasional. (6) Proporsi penyerapan anggaran yang kurang optimal rendah diawal dan menumpuk di akhir tahun anggaran.

5. Kondisi ketenagakerjaan termasuk angkatan kerja dan produktivitasnya.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kalimantan selatan tercatat berfluktuasi. Upaya penyerapan tenaga kerja menjadi tantangan tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Selatan. Pelatihan bagi angkatan kerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat terserap di dunia kerja. Optimalisasi kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja. Sumber Daya Manusia yang belum berdaya saing.

1.3.2 Tantangan Sosial Kependudukan

Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), penduduk Kalimantan Selatan pada bulan September 2020 mencapai 4,07 juta jiwa. Jumlah penduduk Kalimantan Selatan masih terbanyak kedua di pulau Kalimantan, berada di bawah Kalimantan Barat, serupa dengan peringkat hasil sensus-sensus sebelumnya. Jumlah penduduk Kalimantan

Selatan di tahun 2020 berada di peringkat ke-18 dari 34 provinsi, berada di bawah Papua (4,30 juta jiwa) dan di atas Kalimantan Timur (3,77 juta jiwa).

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat berdampak positif maupun negatif pada tingkat produktivitas tergantung pada seberapa besar peningkatan imbal balik penggunaan sumber daya alam. Di sisi lain, semakin besar jumlah penduduk dapat meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar dengan semakin banyaknya sumber daya manusia. Dengan demikian, hubungan antara jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung pada perkembangan kualitas sumber daya manusia dan imbal balik penggunaan sumber daya alam.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator penting untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. IPM bisa digunakan sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah pusat maupun daerah dalam kaitannya dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia yang berkualitas akan berimbas pada peningkatan produktivitas dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan.

Masalah kependudukan tidak akan lepas dari pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Termasuk di sini adalah mengenai distribusi atau persebaran penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata tidak hanya terjadi di Indonesia secara umum tetapi juga pada provinsi-provinsi secara khusus, tidak terkecuali Kalimantan Selatan.

Perumusan tantangan aspek sosial kependudukan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan pada tahun 2022, meliputi:

1. Kondisi demografi

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati melimpah. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk asli maupun para perantau untuk mengembangkan wilayahnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah Pulau Kalimantan bagian selatan. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki wilayah paling kecil di Pulau Kalimantan dan secara struktur astronomi terletak pada titik koordinat:

- 11401'33" Bujur Timur -116033'28" Bujur Timur, 1021'49" Lintang Selatan – 1010'14" Lintang Selatan
- Luas Laut Berdasarkan 12 Mil Laut = 2.307.558 Ha
- Panjang Garis Pantai Keseluruhan = 1.330 Km
- Jumlah Pulau-Pulau Kecil = 172 Pulau
- Luas Rawa = 235.561 Ha (6,07% Dari Luas Daratan Kalsel)
- Luas Hutan = 1.660.722 Ha (45% Dari Luas Daratan Kalsel)



Adapun batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan secara administrasi berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, dan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur
- Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 37.530,52 km² yang terbagi habis ke dalam 13 kabupaten/kota dengan rincian 154 kecamatan dan 2.007 desa/kelurahan.

2. Struktur dan jumlah penduduk

Penduduk Kalimantan Selatan selama kurun waktu antara tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan yang cukup relatif, yaitu pada tahun 2020 berjumlah 4.073,584 jiwa dikarenakan hasil pada tahun 2020 Hasil Sensus Penduduk, sementara pada tahun 2016 berjumlah 4.055.479 jiwa yang diambil dari Hasil Proyeksi penduduk Tahun 2010-2035 BPS RI (2014-2019). Penduduk Kalimantan Selatan tahun 2020 jika dilihat dari jenis kelamin, hampir berimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yaitu 50,75% penduduk laki-laki dan 49,25% penduduk perempuan. Perlu dilakukan pengendalian jumlah penduduk agar struktur penduduk muda tidak berdampak negatif dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Tantangan sosial kependudukan di Kalimantan Selatan diantaranya kemiskinan ekstrim yang masih membayangi di Kalimantan Selatan. Meskipun angka kemiskinan di Kalimantan Selatan sudah menurun namun perlu dijaga diantaranya melalui pemanfaatan dana desa untuk membantu masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja yang dapat mengurangi pengangguran.

3. Karakteristik masyarakat

Kalimantan Selatan merupakan provinsi di Indonesia yang terkenal dengan julukan kota 1000 sungai. Letak geografis Kalimantan Selatan yang memiliki banyak lahan basah terutama sungai mempengaruhi pola kebudayaan hingga aktivitas yang dilakukan masyarakat. Pada kota Banjarmasin, penduduk tinggal di bantaran Sungai dengan orientasi rumah menghadap sungai. Sungai keberadaannya dimanfaatkan sebagai tempat untuk hidup, melakukan aktivitas sosial, ekonomi, hingga sebagai jalur transportasi.

4. Adat Istiadat

Tihang Bakambang adalah aruh adat sebagai bentuk rasa syukur pada penguasa alam semesta atas rejeki atau keberhasilan baik itu panen padi, usaha atau keberhasilan-keberhasilan lainnya dalam kurun waktu satu tahun perhitungan cocok tanam.

5. Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk Kalimantan Selatan beraneka ragam. Tidak sedikit penduduk yang bekerja di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pegawai negeri sipil. Namun tidak sedikit angkatan kerja yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan, Pemprov Kalimantan Selatan terus berupaya menurunkan tingkat pengangguran. Hingga saat ini, isu strategis ketenagakerjaan yang masih dihadapi Kalsel adalah tingkat pengangguran yang tinggi, dalam hal ini Pemprov Kalsel melakukan upaya melalui kartu prakerja dengan memberikan pelatihan sebagai ilmu yang bisa digunakan untuk mencari kerja.

6. Tingkat Pendidikan

Rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai oleh tingkat Pendidikan formal angkatan kerja provinsi Kalimantan selatan didominasi oleh tamatan (maksimal) sekolah dasar, termasuk di dalamnya mereka yang belum tamat dan tidak oernah sekolah. Sumber Daya Manusia yang belum berdaya saing, dilihat dari kesenjangan kualitas hidup manusia antar Daerah di Kalimantan Selatan yang masih tinggi khususnya yang tercermin pada angka IPM, rata-rata Usia Harapan Hidup, serta angka Rata-rata Lama Sekolah.

7. Pola Kesehatan Masyarakat

Angka prevelansi *stunting* masih cukup tinggi di Kalimantan Selatan, sehingga perlu dilakukan upaya penurunan *stunting* dengan melibatkan berbagai instansi. Melalui penyediaan air minum yang layak, pemenuhan gizi bagi anak *stunting* dan berbagai upaya penyuluhan menjalankan pola hidup sehat dan pendampingan keluarga di harapkan dapat menurunkan angka prevalensi *stunting* dan juga angka kematian ibu dan bayi.

1.3.3 Tantangan Geografis Wilayah

Kondisi geografis regional yang dapat menjadi faktor pendorong maupun menjadi penghambat pengembangan ekonomi suatu regional. Tantangan geografis wilayah di Kalimantan Selatan, seperti:

1. Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang kaya akan Sumber Daya Alamnya. Meski demikian, Provinsi Kalimantan Selatan yang beribukota di Banjarmasin berada pada ketinggian rata-rata 0,16 meter di bawah permukaan laut dan memiliki banyak anak sungai. Sebagian besar wilayah di Kalimantan Selatan dilalui oleh anak sungai sehingga sangat sangat rentan dengan dampak perubahan iklim. Persebaran penduduk di provinsi Kalimantan selatan tidaklah seimbang. Wilayah yang padat penduduknya didominasi daerah perkotaan seperti Kota Banjarmasin (8606 jiwa/KM2) dan Banjarbaru (606 jiwa/km2). Sedangkan daerah Kabupaten seperti Kotabaru kepadatannya hanya 31 jiwa/km persegi. Hal ini menunjukkan bahwa



daerah perkotaan menjadi tujuan atau destinasi bagi para pendatang. Untuk mencegah persebaran penduduk yang tidak merata Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.

2. Kontur dan kondisi geografis Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah. Kalimantan Selatan terdiri atas dua ciri geografi utama, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Kalimantan Selatan kaya akan hasil tambang sehingga menjadi mata pencaharian penduduk di samping menjadi petani atau nelayan.

1.3.4 Tantangan Daerah sebagai Dampak Covid-19

Secara umum, langkah kebijakan pemulihan ekonomi daerah diambil dengan memperhatikan arahan Pemerintah, yang fokus pada tiga aspek, yakni: menjaga kesehatan masyarakat, melindungi daya beli khususnya golongan tidak mampu melalui penguatan dan perluasan jaring pengaman sosial, serta melindungi dunia usaha dari kebangkrutan.

Dampak Covid-19 menimbulkan permasalahan di berbagai daerah. Permasalahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan pandemi covid-19 yaitu:

1. Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangka penanganan Covid-19
2. Meningkatnya pengangguran karena pekerja pada perusahaan yang dirumahkan dan di PHK
3. Menurunnya Kontribusi UMKM dan IKM dalam menunjang perekonomian

Seiring dengan meredanya pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kalsel 2022 mulai menunjukkan pemulihan dari tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pulihnya perekonomian dapat dilihat dari mulai ramainya pengunjung hotel, mal, rumah makan, tempat wisata, orang bepergian, hingga orang berbelanja di pasar dan meningkatnya permintaan barang konsumsi.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Bab II

Analisis Ekonomi Regional

Highlight

- Pada triwulan IV tahun 2022, ekonomi di Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,32% (y-o-y), -0,28% (q-to-q), dan 5,11% (c-to-c).
- Inflasi di Kalimantan Selatan secara *year-on-year* telah mencapai 6,99% dan melebihi angka inflasi nasional.
- IPM Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 tercatat sebesar 71,84 yang masih di bawah angka nasional.
- Kalimantan Selatan menjadi Provinsi dengan tingkat kemiskinan nomor 2 terendah di Indonesia dengan tingkat kemiskinan pada September 2022 sebesar 4,61%.
- Ketimpangan di Kalimantan Selatan tergolong sebagai ketimpangan rendah.



Festival Kemilau Meratus **20-25 Desember 2022**

“ Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar Karnaval Etnis dan Pawai Budaya dalam rangkaian Festival Kemilau Meratus 2022 yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke-63. Festival tersebut menampilkan 40 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan untuk mengenalkan dan mempromosikan budaya lokal daerah melalui kreasi busana. Festival ini selain diselenggarakan untuk memperomosikan budaya lokal juga bertujuan untuk menggerakkan ekonomi rakyat melalui peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Hulu Sungai Tengah. ”



2.1 Analisis Indikator Makro Ekonomi

Kondisi perekonomian secara global mengalami berbagai guncangan dan tantangan pada tahun 2022. Keadaan ini diawali dengan terdisrupsi rantai pasokan yang akhirnya mempengaruhi laju konsumsi dan perekonomian pada negara-negara akibat pandemi Covid-19. Saat terjadinya pandemi, banyak terjadi penutupan industri dengan ditambah *lockdown* pada para konsumen yang kemudian mengakibatkan rendahnya tingkat konsumen dan berkurangnya aktivitas industri. Dalam dua tahun berselang, perekonomian pada tahun 2022 kembali pulih seiring dengan meredanya kasus pandemi Covid-19 dan meningkatnya aktivitas masyarakat yang menyebabkan permintaan dan konsumsi masyarakat turut melonjak naik. Kondisi ini kemudian menggerakkan rantai perekonomian secara global, namun demikian rantai pasokan menghadapi tantangan besar kembali karena *supply* yang tersedia belum dapat memenuhi permintaan dari konsumen. Fenomena ini kemudian ditambah dengan adanya ancaman dari geopolitik dan perang yang terjadi pada awal tahun 2022, sehingga menyebabkan disrupsi *supply* yang makin berkepanjangan setelah pandemi Covid-19.

Ketidakpastian situasi ekonomi global ini kemudian membuat kenaikan harga komoditas pangan dan energi yang pada akhirnya menyebabkan tingginya inflasi. Tingginya harga komoditas pada akhirnya mengharuskan pemerintah untuk mengambil kebijakan berupa pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mendorong naik harga berbagai komoditas secara nasional dan regional. Dalam mengendalikan inflasi, respon berupa pengetatan kebijakan moneter juga turut dilaksanakan seperti kebijakan kenaikan suku bunga di berbagai belahan dunia. Kebijakan ini kemudian mempengaruhi volatilitas arus modal, nilai tukar, dan sektor keuangan yang pada akhirnya melemahkan pemulihan ekonomi global dan berdampak secara regional di Kalimantan Selatan. Hal ini terus menjadi perhatian oleh pemerintah terutama dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi tahun 2023.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

2.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi



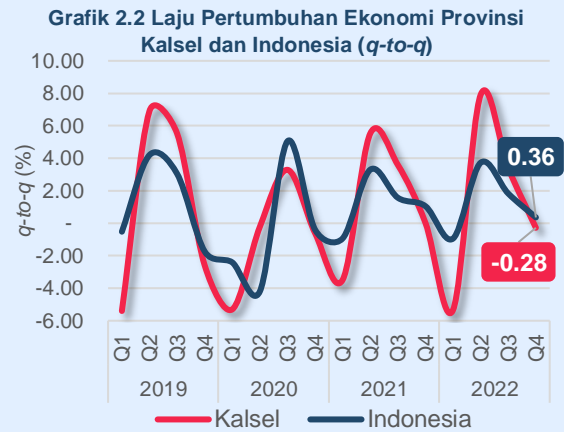
Sumber: BPS (diolah)

secara *year-on-year* atau triwulanan terhadap triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.1, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV tahun 2022 tumbuh melambat dari triwulan sebelumnya namun

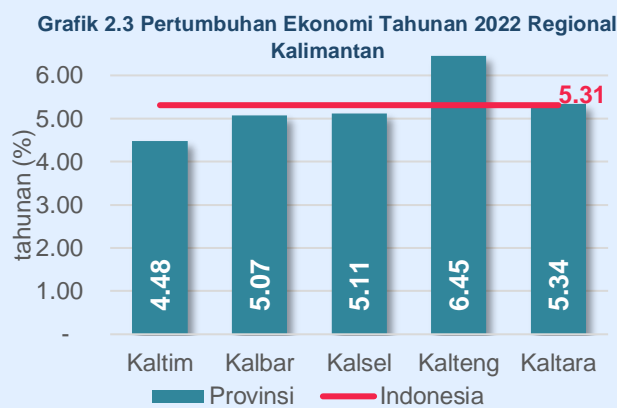
Laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu empat tahun terakhir tergolong fluktuatif. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Pada triwulan IV tahun 2022, ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,32%

lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara nasional yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Perekonomian Kalimantan Selatan yang mengalami perlambatan ini salah satunya disebabkan adanya krisis sektor pangan yang kemudian menggerek inflasi ke angka yang cukup tinggi pada akhir tahun 2022, sehingga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat secara *q-to-q* atau triwulanan berantai, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan ditampilkan sebagaimana grafik 2.2. Perekonomian global yang tidak menentu akibat mengalami guncangan sepanjang tahun 2022 ini juga berdampak terhadap perekonomian di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini terlihat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV secara *q-to-q*, yang salah satunya disebabkan oleh berbagai tekanan perekonomian yang terjadi pada triwulan sebelumnya seperti krisis geopolitik dan berimbas pada triwulan IV 2022.



Sumber: BPS (diolah)



Sumber: BPS (diolah)

Kalimantan Selatan menduduki peringkat ketiga pertumbuhan ekonomi tahunan 2022 tertinggi di regional Kalimantan (5,11%). Perekonomian di Kalimantan Selatan berkontribusi sebesar 14,22% terhadap PDRB Regional Kalimantan dan 1,31% terhadap perekonomian di Indonesia.

2.1.1.2 Nominal PDRB

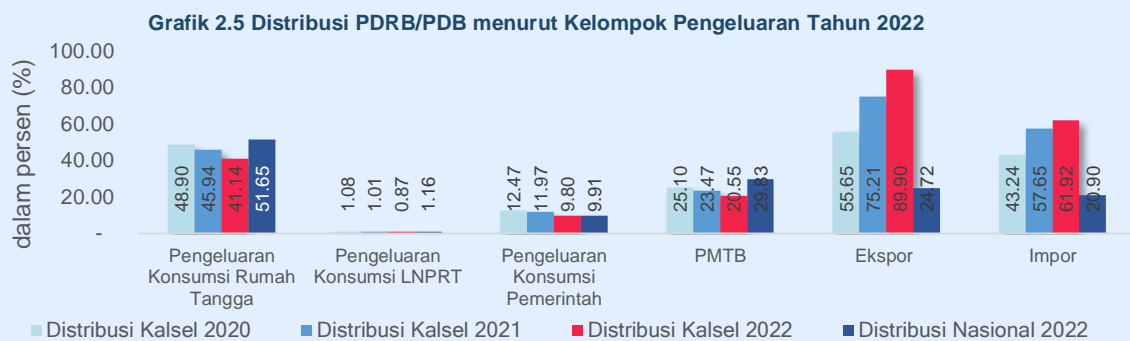


Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Perekonomian Kalimantan Selatan yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada triwulan IV tahun 2022 telah mencapai Rp67,58 triliun, sedangkan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) telah mencapai Rp36,76 triliun atau lebih rendah dari periode sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada grafik 2.4.

**a. PDRB Berdasarkan Pengeluaran**

PDRB yang diukur dari menunjukkan penggunaan atas barang dan jasa atau menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir dapat dilihat pada grafik 2.5.



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

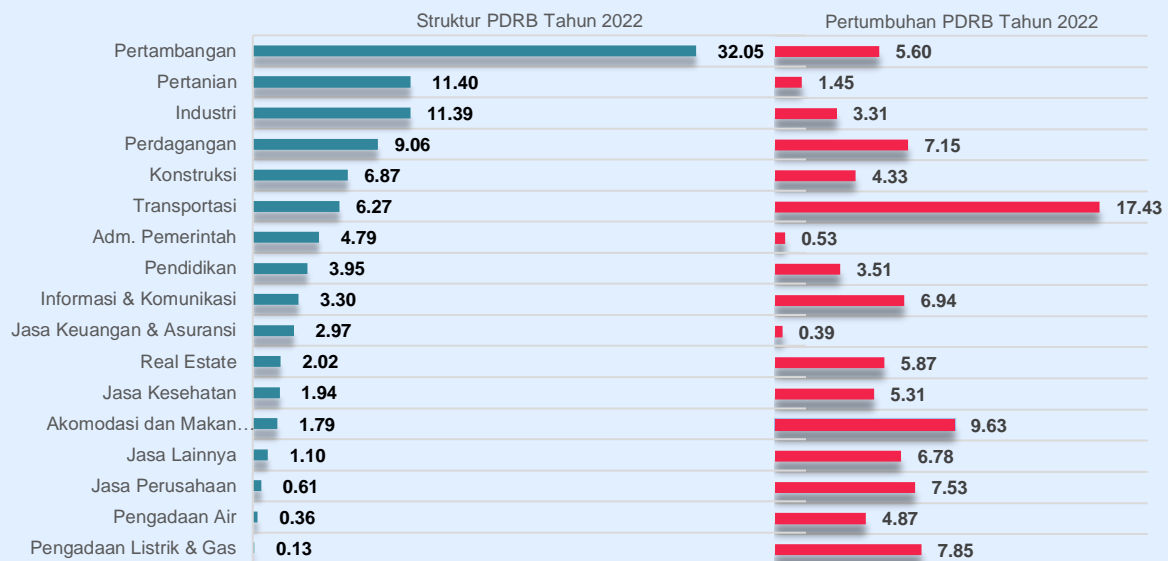
PDRB Nominal ADHK selama tahun 2021-2022 berdasarkan kelompok pengeluaran mengalami kenaikan di tiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2020 sempat mengalami perlambatan secara *year-on-year* akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 ini, di Kalimantan Selatan komponen pengeluaran yang memiliki distribusi terbesar terhadap PDRB adalah komponen ekspor, yang mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Hal ini berbeda secara nasional dimana PDRB-nya didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga. Ekspor merupakan komponen pengeluaran yang memiliki kontribusi terbesar pada ekonomi di Kalimantan Selatan, seiring dengan tingginya ekspor atas hasil pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Pertumbuhan ekspor di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan pada pertengahan tahun 2021 dan 2022 karena tingginya permintaan dan adanya lonjakan harga komoditas. Pada akhir tahun 2022, ekspor di Kalsel mengalami penurunan sebagai akibat turunnya harga batu bara dan kelapa sawit.

Di sisi lain, komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami peningkatan secara nominal, namun demikian komponen ini mengalami penurunan distribusi terhadap PDRB pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan tantangan yang dialami komponen pengeluaran tersebut yaitu seperti kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang kemudian membuat lonjakan harga terhadap berbagai komoditas bahan pokok yang kemudian memengaruhi konsumsi dari Rumah Tangga itu sendiri. Berdasarkan data dari BPS tersebut, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun di sisi lain pelaksanaan anggaran konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan yang tercatat pada Sistem Keuangan Republik Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022. Peningkatan ini pada akhirnya menandai peningkatan pada Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, oleh karena itu diperlukan sinkronisasi data antar instansi terkait dalam memperhitungkan PDRB.

b. PDRB Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha

PDRB dari sisi penawaran yang dibentuk berdasarkan lapangan usaha menunjukkan perkembangan peran atau kontribusi sektor-sektor usaha yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi regional. Pada tahun 2022, struktur PDRB menurut lapangan usaha masih didominasi oleh LU Pertambangan sebagai LU yang memiliki pangsa terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan dari sisi pertumbuhan PDRB, LU Transportasi menjadi LU yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.6 berikut ini.

Grafik 2.6 Struktur dan Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 (yoy)



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

PDRB Nominal ADHK selama tahun 2021-2022 berdasarkan Lapangan Usaha mengalami kenaikan di tiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2020 sempat mengalami perlambatan secara *year-on-year* akibat pandemi Covid-19. Akselerasi perekonomian yang ditunjukkan dari tingginya pertumbuhan LU Transportasi pada PDRB disebabkan karena meningkatnya aktivitas masyarakat yang telah berangsur pulih dari pandemi dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Selain itu, tingginya harga komoditas yang disebabkan oleh gejolak geopolitik Rusia-Ukraina menjadi salah satu kesempatan bagi Kalimantan Selatan dalam memanfaatkan peluang di sektor pertambangan, sehingga mampu bertahan menjadi penopang perekonomian di Kalimantan Selatan dan tumbuh dengan baik di tahun 2022.

Di sisi lain, Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembalikan kondisi ekonomi seperti semula masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, di tahun 2022 ini, salah satunya yaitu tantangan berupa melejitnya harga berbagai bahan pokok. Kenaikan harga dari beberapa komoditas tersebut disebabkan adanya kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang menjadi salah satu komponen utama dalam biaya

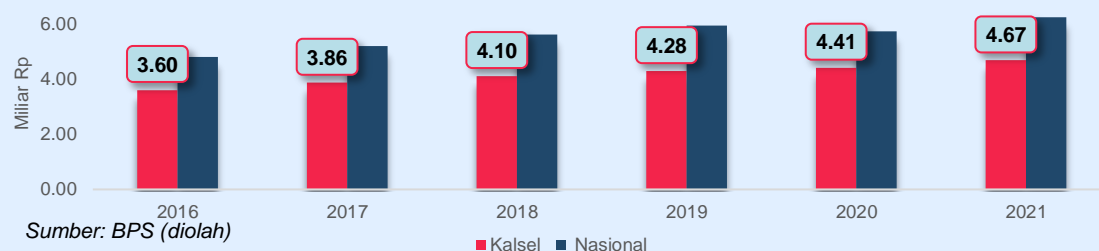


produksi maupun distribusi. Di samping itu, faktor hama dan cuaca buruk juga turut menjadi penyebab keterbatasan bahan pokok pada LU Pertanian yang kemudian menyebabkan tingginya harga yang dijual kepada masyarakat. Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab melambatnya akselerasi perekonomian di Kalimantan Selatan pada tahun 2022.

c. PDRB per Kapita

PDRB per kapita sebagaimana yang ditunjukkan oleh grafik 2.7 merupakan PDRB suatu daerah yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Grafik 2.7 Perkembangan PDRB per Kapita Nasional dan Kalsel 2016 -2021

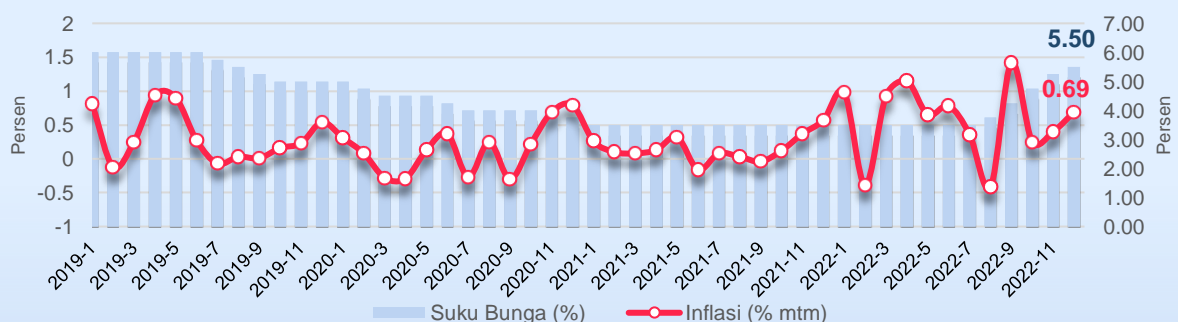


PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 sebesar Rp4,67 miliar, lebih rendah dari PDB per kapita Nasional sebesar Rp6,22 miliar. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan pendapat perkapita baik Nasional maupun Provinsi Kalimantan Selatan. Perubahan pola konsumsi dan aktivitas ekonomi masyarakat sepanjang tahun 2021 mempengaruhi PDRB per kapita tersebut.

2.1.2 Suku Bunga

Suku bunga merupakan alat moneter yang dipergunakan untuk mengendalikan penawaran dan permintaan atas uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Suku bunga mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian (Indriyani, 2016). Hal ini tidak hanya mempengaruhi keinginan konsumen untuk membelanjakan ataupun menabungkan uangnya tetapi juga mempengaruhi dunia usaha dalam mengambil keputusan (Erawati & Llewelyn, 2002).

Grafik 2.8 Perbandingan BI7DRR dan Tingkat Inflasi Kalsel

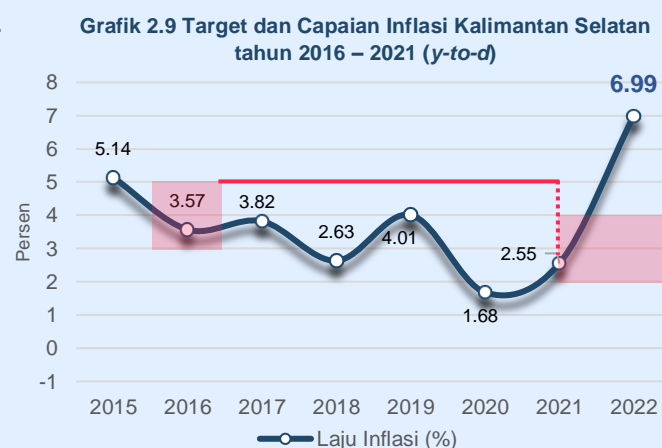


Suku bunga yang diberlakukan pada suatu negara sangat erat hubungannya dengan perkembangan inflasi. Suku bunga acuan yang dipergunakan saat ini adalah BI-7 *Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) yang menggantikan BI *Rate*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kenaikan tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan inflasi di Kalimantan Selatan cenderung dipengaruhi dari sisi produksi atau distribusi pasokan, sehingga kebijakan yang mempengaruhi biaya pada sisi tersebut akan berdampak langsung terhadap inflasi dan perekonomian regional. Hal ini seperti yang terjadi pada akhir triwulan III tahun 2022 saat adanya kebijakan pengalihan subsidi BBM yang mendorong berbagai harga komoditas melonjak naik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan instansi terkait melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga pasokan dalam rangka mengendalikan inflasi yang terjadi, misalnya dengan pelaksanaan pasar murah dan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menjaga *supply* di Kalimantan Selatan.

2.1.3 Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi tercermin dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter, yakni: suku bunga acuan (BI *Rate*/BI7DRR) berpengaruh terhadap inflasi melalui pengaruhnya terhadap suku bunga deposito dan kredit, kredit yang disalurkan dan harga aset yang secara bersama-sama berpengaruh pada tingkat konsumsi dan investasi, nilai tukar yang mempengaruhi ekspor dan ekspektasi inflasi masyarakat (Susilowati & Wahyuningdyah, 2018).

Kinerja inflasi Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2016 hingga 2021 seperti pada grafik 2.9 menunjukkan angka di bawah target, namun sejak awal tahun 2022 tren inflasi mengalami kenaikan yang signifikan hingga pada akhir tahun 2022 menyentuh angka 6,99% dan jauh melampaui



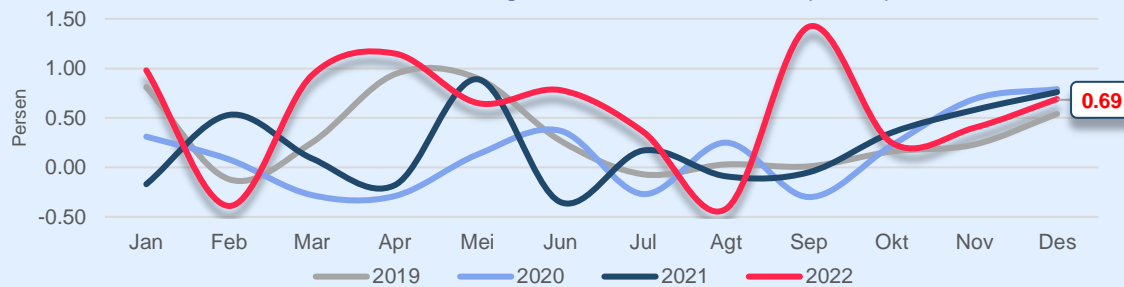
Sumber: BPS Prov. Kalsel dan RPJMD Prov. Kalsel (diolah)

target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Besaran ini merupakan inflasi tertinggi selama delapan tahun terakhir dan melebihi inflasi nasional yang sebesar 5,51%. Tingginya angka inflasi ini menunjukkan perekonomian pada tahun 2022 yang semakin menguat dan pulih pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2020 – 2021 yang lalu. Hal tersebut diiringi dengan laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang menunjukkan tren positif hingga triwulan III 2022 dan menunjukkan tumbuhnya penyerapan tenaga kerja yang kemudian akan mendorong angka inflasi sebagai bagian dari tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat.



Perkembangan inflasi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 yang melejit tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik 2.10 berikut ini.

Grafik 2.10 Perkembangan Inflasi tahun 2019 – 2022 (m-to-m)



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

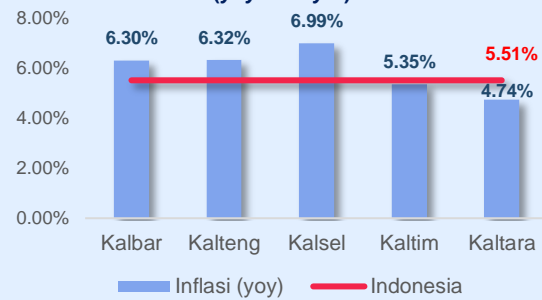
Pada tahun 2022, perkembangan inflasi secara *month-to-month* menunjukkan tren yang lebih berfluktuasi dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 – 2021. Salah satu penyebabnya adalah perekonomian global yang mengalami guncangan pada tahun 2022 sehingga berakibat pada tertahannya pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan tren yang paling terlihat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah inflasi yang terjadi pada triwulan III 2022. Inflasi pada periode ini utamanya disebabkan oleh penyesuaian harga BBM bersubsidi sehingga menyebabkan berbagai harga komoditas melonjak naik.

Pada sepanjang tahun 2022, diketahui 5 komoditas dengan andil inflasi tertinggi secara *year-on-year* yang disebabkan oleh komoditas Beras, BBM, Angkutan Udara, Bahan Bakar Rumah Tangga, Rokok Kretek Filter, dan Telur Ayam Ras. Inflasi yang berasal dari komoditas beras dan hingga akhir tahun 2022 masih menjadi primadona penyumbang inflasi disebabkan adanya gagal panen akibat hama yang menyerang produksi padi atau beras lokal di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 ini, selain itu faktor cuaca yang menyebabkan banjir juga turut menghambat produksi padi sedangkan permintaan masyarakat akan beras lokal masih tergolong tinggi. Kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi juga mewarnai inflasi di Kalimantan Selatan pada tahun 2022, yang kemudian menyebabkan harga berbagai komoditas ikut naik karena meningkatnya biaya produksi/distribusi barang agar sampai ke tangan masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan *event* berskala nasional seperti MTQ Nasional XXIX di Kalimantan Selatan juga menjadi salah satu faktor penyumbang inflasi di tahun 2022, terutama dari sektor transportasi seperti angkutan udara yang permintaannya melejit tinggi dan berdampak pada inflasi tuan rumah penyelenggaraan. Di samping itu, tingginya permintaan akan berbagai bahan pokok juga terdampak dari penyelenggaraan *event* tersebut yang kemudian semakin memperkuat angka inflasi.

Jika dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada provinsi di Kalimantan, Kalimantan Selatan menduduki urutan pertama inflasi tertinggi di Kalimantan. Selain itu, angka inflasi ini juga berada di atas angka nasional seperti yang ditunjukkan pada grafik 2.11.

Sejumlah langkah untuk mengendalikan inflasi yang menjadi *concern* pada tahun 2022 di Kalimantan Selatan telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah serta instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Selatan untuk menjaga angka inflasi tetap stabil dan tidak memberatkan masyarakat. Berikut beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mengendalikan inflasi di Kalimantan Selatan yang di antaranya sebagai berikut:

Grafik 2.11 Inflasi di Kalimantan tahun 2022 (yoy atau ytd)



Sumber: BPS (diolah)

1. Penggunaan anggaran pengendalian inflasi daerah melalui Dana Transfer Umum (DTU), Belanja Tak Terduga (BTT), dan Dana Insentif Daerah (DID);
2. Pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP);
3. Perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD) dalam memberikan pasokan komoditas yang produksinya cukup besar;
4. Penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengendalikan inflasi;
5. Gerakan menanam bersama komoditas penyumbang inflasi;
6. Pemantauan perkembangan harga atau sidak pasar;
7. Pemberian subsidi transportasi dan ongkos angkut;
8. Monitoring dan evaluasi di seluruh Kabupaten/Kota;
9. Penyelenggaraan operasi pasar murah secara rutin;
10. Penguatan Koordinasi dan Komunikasi.

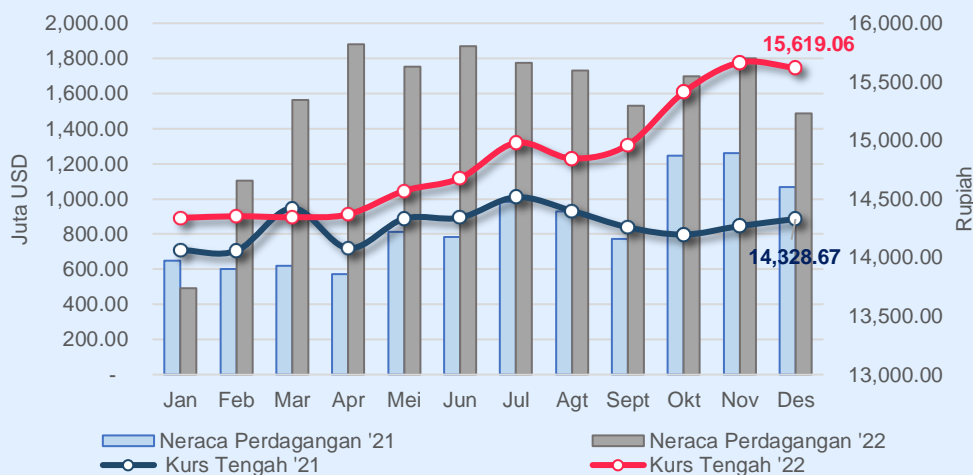
2.1.4 Nilai Tukar

Perkembangan nilai tukar Rupiah hingga akhir Desember tahun 2022 mengalami depresiasi yang menyebabkan kurs jual mencapai Rp15.809,66 dan kurs beli sebesar Rp15.652,34 serta kurs tengah Rp15.731 per *US Dollar* (USD). Salah satu penyebab dari terdepresiasi nilai tukar Rupiah terhadap USD ini adalah karena adanya fenomena *Strong Dollar* yang berdampak pada Rupiah. Fenomena ini terjadi karena bank sentral Amerika Serikat (AS) yaitu *The Fed* terus menaikkan suku bunganya sampai penghujung tahun 2022 ini. Kebijakan yang diambil *The Fed* ini berhubungan erat dengan kondisi ketidakpastian perekonomian global akibat konflik antar negara yang memicu harga komoditas tambang meningkat pesat, ditambah lagi dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat usai pandemi yang membuat permintaan berbagai komoditas semakin tinggi.



Kondisi inilah yang kemudian membuat lonjakan inflasi di berbagai belahan dunia, tak terkecuali inflasi di Amerika Serikat yang awalnya hanya berkisar di 2% menjadi 9% hingga 10%, sehingga untuk mengendalikannya *The Fed* menaikkan suku bunga dan berdampak pada menguatnya dolar AS terhadap hampir seluruh nilai tukar di banyak negara seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut ini.

Grifik 2.12 Pergerakan USD terhadap Rupiah dan Neraca Perdagangan



Sumber: Bank Indonesia dan DJBC (diolah)

Berdasarkan grafik 2.12, perkembangan nilai kurs hingga akhir triwulan III tahun 2022 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap neraca perdagangan. Pergerakan neraca perdagangan di Kalimantan Selatan pada umumnya disebabkan oleh tiga faktor, yaitu perkembangan harga komoditas, kurs yang berlaku, dan volume konsumsi masyarakat. Pergerakan neraca perdagangan hingga akhir triwulan III tahun 2022 disebabkan karena adanya peningkatan harga berbagai komoditas yang menyebabkan ekspor meningkat tajam. Hal ini dapat terlihat dari neraca perdagangan pada bulan April yang melonjak naik, salah satunya disebabkan karena harga referensi *Crude Palm Oil* (CPO) yang meningkat pada bulan tersebut dan berangsur turun hingga akhir tahun 2022. Kemudian, jika dilihat pada awal triwulan IV tahun 2022, perkembangan neraca perdagangan dan nilai kurs meningkat secara beriringan yang mengindikasikan peningkatan dari nilai kurs berpengaruh terhadap perkembangan neraca perdagangan yang turut meningkat di penghujung tahun 2022.

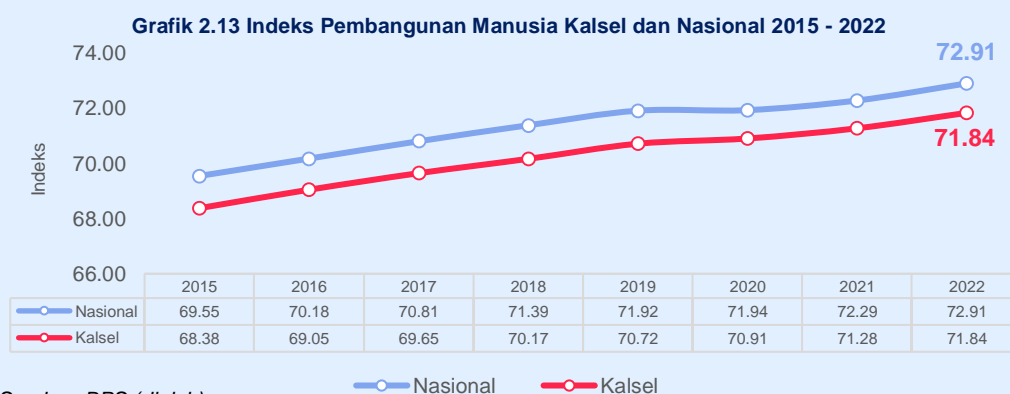
Neraca perdagangan Kalimantan Selatan pada tahun 2022 mengalami surplus sebesar 18.676,66 juta USD. Besaran surplus ini mengalami pertumbuhan mencapai 81,42% lebih tinggi dibandingkan surplus pada tahun 2021. Capaian yang gemilang pada neraca perdagangan Kalimantan Selatan disumbang oleh ekspor yang mencapai 220.228,57 juta USD dengan kenaikan 87,05% dibandingkan tahun 2021 dan impor sebesar 1.551,90 juta USD dengan kenaikan 198,38% dari tahun 2021. Kinerja ekspor yang impresif ini juga disebabkan karena meningkatnya permintaan komoditas utama, terutama batu bara dan *Crude Palm Oil* (CPO). Hal ini sejalan dengan kelompok barang yang memiliki andil ekspor tertinggi di Kalimantan Selatan yaitu (1) bahan bakar mineral/batu bara; (2) lemak dan minyak

hewan/nabati; dan (3) barang tambang dan mineral logam. Nilai ekspor yang meningkat ini juga dipengaruhi oleh harga komoditas produk kelapa sawit di pasar dunia yang mengalami peningkatan, namun kemudian pada bulan Juli hingga Oktober 2022 nilai ekspor ini mengalami penurunan akibat turunnya harga komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya. Besaran ekspor CPO ini juga dipengaruhi oleh peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan terkait larangan dan percepatan ekspor CPO.

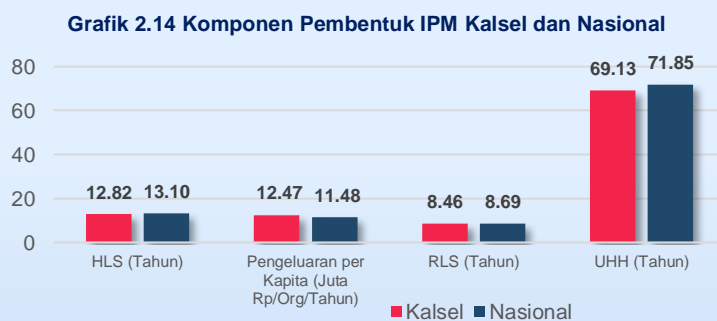
2.2 Analisis Indikator Kesejahteraan

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Kalimantan Selatan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam kurun waktu tahun 2010 – 2022 terus mengalami kemajuan. IPM Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 tercatat sebesar 71,84 atau tumbuh 0,79% dari tahun 2021 (meningkat 0,56 poin). Pertumbuhan IPM 2022 mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya. Selama periode tersebut, IPM Kalsel rata-rata tumbuh sebesar 0,85% per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” sejak tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.13 berikut ini.



Jika dilihat berdasarkan grafik 2.13, IPM di Provinsi Kalimantan Selatan masih dibawah angka nasional. Dari beberapa komponen pembentuk IPM di Kalimantan Selatan seperti Harapan Lama Sekolah (HLS), Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan angka yang sebagian besar lebih kecil dari angka nasional, kecuali Komponen Pengeluaran per Kapita, sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.14 berikut ini.



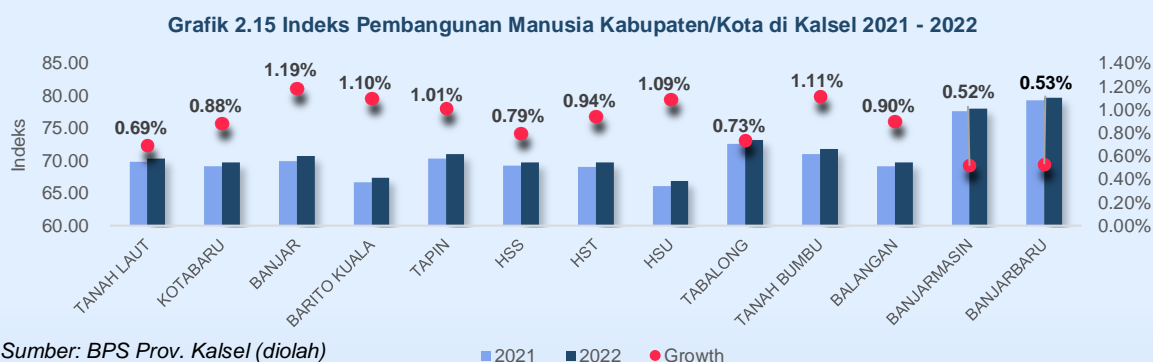
Salah satu penyebab rendahnya angka IPM di Kalsel adalah karena banyak masyarakat di Kalimantan Selatan yang pendidikan menengahnya dilanjutkan di pesantren yang

belum diakui sebagai pendidikan formal, sehingga tidak dihitung dalam capaian RLS. Untuk itu perlu perubahan sistem pendidikan di pesantren agar dapat diakui sebagai pendidikan formal di Indonesia, sehingga dapat diperhitungkan sebagai capaian indikator pendidikan.

IPM pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2021, peningkatan ini terjadi pada semua dimensi pembentuknya. Dimensi pembentuk IPM yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah standar hidup layak, sedangkan yang mengalami pertumbuhan terkecil adalah harapan lama sekolah (Komponen dari dimensi pengetahuan). Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kalimantan Selatan adalah 67,80 tahun, dan pada tahun 2022 mencapai 69,13 tahun. Berdasarkan dimensi ini, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69,13 tahun atau meningkat 0,30 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya yang mencapai 68,83 tahun pada 2021.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. HLS penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,81 menjadi 12,82 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,12 tahun, dari 8,34 tahun menjadi 8,46 tahun pada tahun 2022. Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kalsel mencapai Rp12.469.000 per tahun naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,68% atau Rp326 ribu. Peningkatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini sejalan dengan turunnya kasus pandemi Covid-19 sehingga roda perekonomian kembali berjalan.

Peningkatan IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada seluruh kabupaten/kota sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.15 berikut ini.

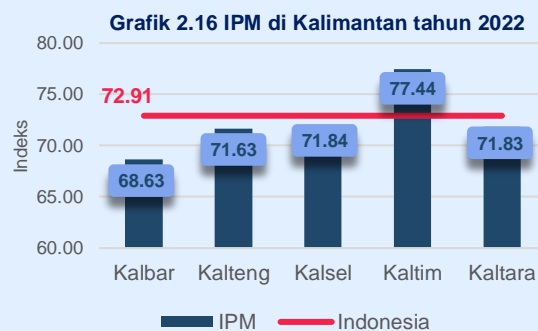


Selama periode 2021 hingga 2022, tercatat tiga kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling tinggi kenaikannya yaitu Kab. Banjar, Kab. Tanah Bumbu, dan

Kab. Barito Kuala. Pertumbuhan dimensi tertinggi pada pembangunan manusia di Kab. Barito Kuala dan Tanah Bumbu didorong oleh dimensi standar hidup layak, sedangkan di Kab. Banjar utamanya didorong oleh dimensi pengetahuan. Pada tahun 2022 tidak terdapat perubahan peringkat IPM, namun status capaian pembangunan manusia di dua kabupaten ada yang berubah yaitu Kab. Tanah Laut dan Kab. Banjar berhasil mencapai IPM pada kategori “tinggi”.

Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) sebanyak tujuh, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Sedangkan enam kabupaten sisanya menyandang status pembangunan manusia dengan capaian “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$) setelah status pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”.

Jika dibandingkan dengan angka IPM pada provinsi di Kalimantan, Kalimantan Selatan menduduki urutan ke-2 tertinggi setelah Kalimantan Timur (Grafik 2.16). IPM dari provinsi Kalimantan yang berada di atas angka nasional hanya Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan empat provinsi lainnya masih berada di bawah angka nasional. Hal ini menunjukkan pembangunan manusia di Kalimantan masih harus didorong dengan berbagai program yang memiliki sasaran langsung terhadap dimensi-dimensi pembentuk IPM.

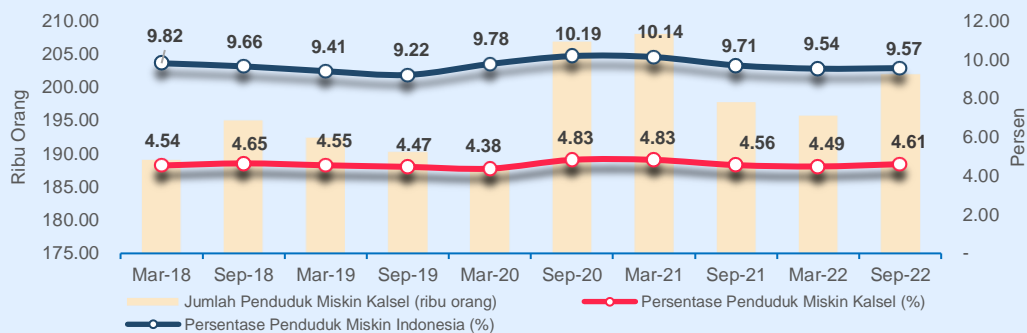


2.2.2 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh berbagai daerah atau negara di dunia. Keberhasilan dari pembangunan daerah tersebut salah satunya diukur dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan tingkat kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan atau yang disebut dengan penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta orang dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,57%, yang awalnya pada tahun 2021 mencapai 26,07 juta. Penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 tercatat sebesar 201,95 ribu orang atau meningkat sejumlah 4,19 ribu orang dibandingkan September 2021 yang mencapai 197,76 ribu orang sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.17 berikut ini.

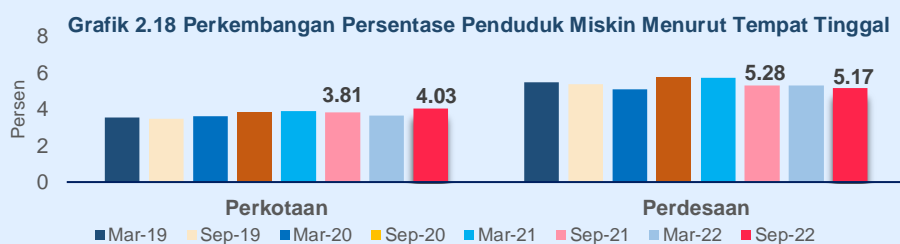


Grifik 2.17 Perkembangan Jumlah dan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Selatan



Walaupun mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, Kalimantan Selatan menjadi Provinsi dengan tingkat kemiskinan nomor 2 terendah di Indonesia setelah Provinsi Bali. Peningkatan kemiskinan ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang terjadi sampai dengan September tahun 2022 di Kalimantan Selatan, salah satu di antaranya yaitu penyesuaian harga BBM yang menambah beban masyarakat dan mendorong harga bahan pokok naik (lonjakan inflasi) sebagai akibat dari biaya produksi dan distribusi yang meningkat.

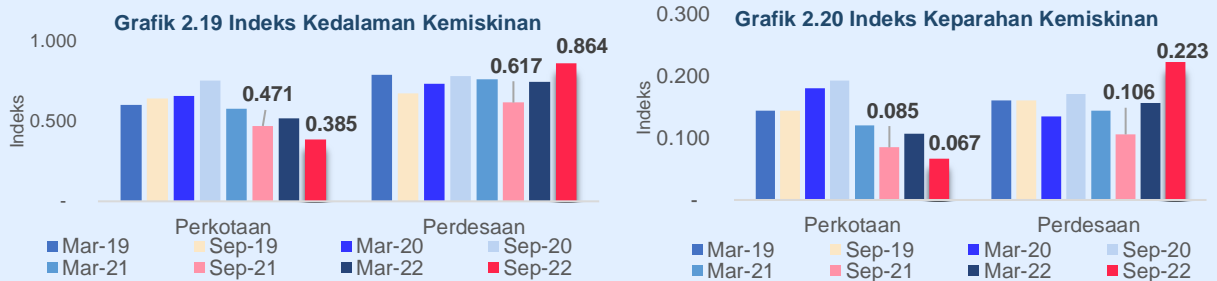
Sebaran penduduk miskin di Kalimantan Selatan dikategorikan berdasarkan daerah tempat tinggal yaitu perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin di Kalimantan Selatan hingga September 2022 yang tinggal di kawasan perdesaan berjumlah 114,95 ribu orang yang setara dengan 5,17% dari total penduduk di perdesaan. Sedangkan penduduk miskin di perkotaan tercatat berjumlah 87,00 ribu orang atau setara dengan 4,03% dari total penduduk di kawasan perkotaan. Penduduk miskin di perkotaan mengalami peningkatan sebesar 8,28% dari September 2021, sedangkan penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan sebesar 2,10% seperti yang ditampilkan pada grafik 2.18.



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Garis Kemiskinan yang merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin pada September 2022 adalah sebesar Rp581.229 per kapita perbulan. Garis pemisah penduduk miskin dan tidak miskin ini mengalami kenaikan 10,28% dibandingkan September 2021 yang sebesar Rp527.045 per kapita perbulan.

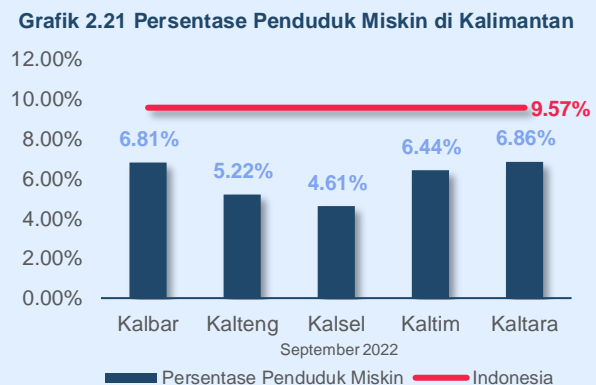
Rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan diukur dengan indeks kedalaman kemiskinan seperti yang tampak pada grafik 2.19, sedangkan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin dicerminkan dengan indeks keparahan kemiskinan seperti yang tampak pada grafik 2.20.



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Pada Provinsi Kalimantan Selatan, dalam periode Maret–September 2022, secara keseluruhan antara Perkotaan dan Perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan, sementara Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Penurunan pada indeks kedalaman menunjukkan semakin mendekatnya rata-rata pengeluaran penduduk di Kalsel dari garis kemiskinan, sedangkan peningkatan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin tingginya nilai ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kalsel.

Jika dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin per provinsi di Kalimantan, Kalimantan Selatan menduduki urutan pertama terendah di Kalimantan, yang kemudian diiringi oleh Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur seperti yang ditunjukkan grafik 2.21.



Selain tingkat kemiskinan, suatu daerah juga memiliki tingkat kemiskinan ekstrem yang diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten supaya dapat dibandingkan antarnegara dan antarwaktu. Salah satunya dengan mengikuti definisi Bank Dunia, yakni paritas daya beli (*purchasing power parity*/PPP) di bawah US\$1,9 per hari. Berikut persentase penduduk miskin ekstrem seperti yang ditunjukkan grafik 2.22.



Sumber: TNP2K (diolah)



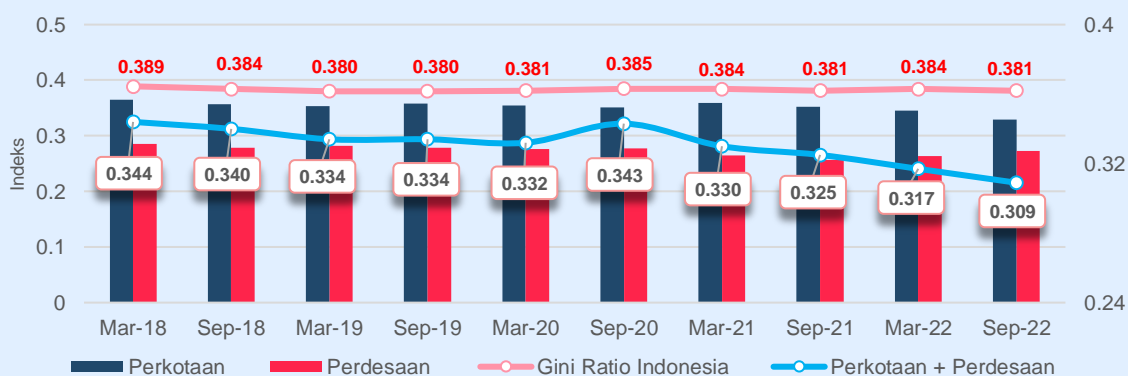
Kemiskinan ekstrem di wilayah Kalimantan Selatan masih berada di bawah angka nasional dan tidak termasuk dalam wilayah prioritas penurunan angka kemiskinan ekstrem. Walaupun demikian, penghapusan kemiskinan ekstrem terus menjadi perhatian pemerintah agar dapat mencapai target dengan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0%. Hal ini juga berkesesuaian dengan target yang telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin dari dampak fenomena sosial dan ekonomi yang dialami Kalimantan Selatan, terutama sampai dengan akhir tahun 2022 ini. Pemberian bantuan sosial telah disalurkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, di antaranya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp283,18 miliar dengan 111.706 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Sembako sebesar Rp407,29 miliar dengan 163.924 KPM, Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) sebesar Rp116,64 miliar dengan 200.743 KPM, BLT Desa sebesar Rp569,60 miliar dengan 159.714 KPM, dan BLT Minyak Goreng sebesar Rp51,51 miliar dengan 171.705 KPM. Selain pemberian bantuan sosial, subsidi-subsidi juga turut diberikan pada sektor tertentu misalnya pada sektor yang terdampak inflasi seperti transportasi dan lainnya.

2.2.3 Ketimpangan (Rasio Gini)

Indeks Gini atau Rasio Gini (*Gini Ratio*) menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk secara menyeluruh. Selain *Gini Ratio*, pengukuran ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk juga diukur menggunakan persentase pengeluaran (distribusi pengeluaran) pada kelompok penduduk 40% terbawah atau yang dikenal dengan ukuran *World Bank* dengan membagi ketimpangan menjadi 3 kategori. Perkembangan *Gini Ratio* di Kalimantan Selatan dan sebarannya dapat dilihat pada grafik 2.23 berikut ini.

Grafik 2.23 Perkembangan *Gini Ratio* di Kalimantan Selatan



Sumber: BPS (diolah)

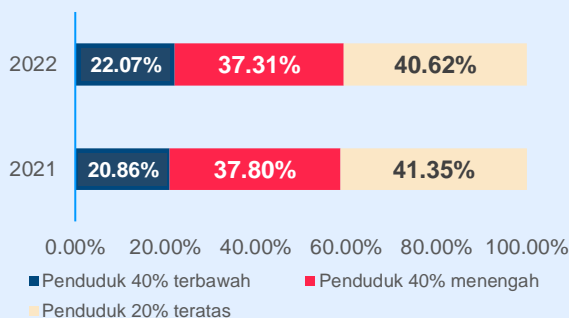
Gini Ratio pada September 2022 adalah sebesar 0,309 yang menurun 4,92% atau turun 0,016 poin dibandingkan September 2021. Jika dilihat dari tahun 2020 sampai dengan 2022, tren penurunan ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran penduduk di Kalimantan Selatan semakin menunjukkan pemerataan atau mengecil. Jika dibandingkan provinsi di

Kalimantan yang seluruhnya berada di bawah angka nasional, Kalimantan Selatan berada di urutan ke-2 terendah setelah Kalimantan Utara seperti yang ditunjukkan grafik 2.24.

Di samping *Gini Ratio*, indikator ketimpangan lain yang biasanya digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah.

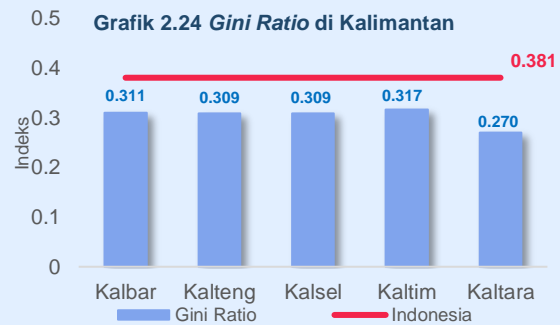
Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori yang terdiri dari tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya di bawah 12%, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17%, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17%.

Grafik 2.25 Distribusi Pengeluaran Penduduk Kalimantan Selatan



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Kenaikan ini seiring dengan besar persentase pengeluaran 40% terbawah yang semakin besar sehingga menunjukkan semakin rendahnya ketimpangan di daerah tersebut. Hal ini berarti bahwa telah terjadi perbaikan ketimpangan dalam periode September 2021 hingga 2022 yang menunjukkan ekonomi masyarakat yang semakin pulih dari pandemi Covid-19 sehingga dapat melakukan aktivitas ekonomi dan berdampak pada konsumsi masyarakat yang semakin meningkat dan menggerakkan roda perekonomian. Dalam memperkecil ketimpangan di Kalimantan Selatan, pemerintah turut melakukan upaya-upaya yang mendukung peningkatan konsumsi agar ekonomi masyarakat tumbuh dan menciptakan pemerataan, di antaranya seperti penyaluran bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli, pemberian subsidi di berbagai sektor, kredit program yang bunganya telah disubsidi untuk berbagai lapisan masyarakat seperti KUR dan UMi agar masyarakat dapat memperluas usaha dan lainnya.



Sumber: BPS (diolah)

metode ini, ketimpangan di Kalimantan Selatan memiliki persentase sebesar 22,07% atau yang dikategorikan sebagai ketimpangan rendah sebagaimana ditunjukkan grafik 2.25.

Persentase pengeluaran penduduk kelompok 40% terbawah pada September 2022 mengalami kenaikan dari September 2021 sebesar 5,80% atau 1,21% poin.



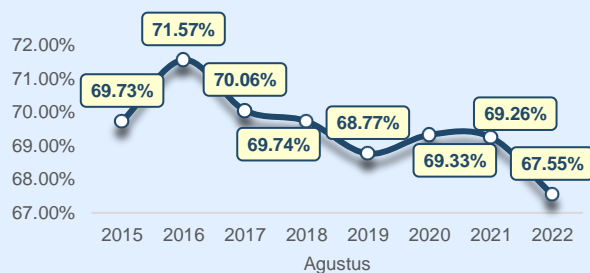
2.2.4 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Pada tahun 2022, ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan mengalami penurunan pada jumlah angkatan kerja. Diketahui pada Agustus 2022 angkatan kerja di Kalimantan Selatan mencapai 2,20 juta orang atau turun 23,1 ribu orang dibanding Agustus 2021 yang lalu. Seiring dengan turunnya jumlah angkatan

kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang sama. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2022 turun 1,71% poin dibandingkan Agustus 2022 sebagaimana pada grafik 2.26.

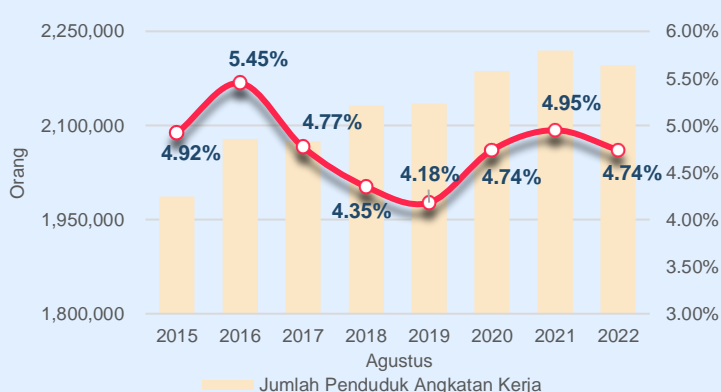
Dalam menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja Kalimantan Selatan untuk masing-masing sektor, terdapat tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Kalimantan Selatan, yaitu Pertanian sebesar 32,41%, Perdagangan sebesar 25,87%, dan Jasa Kemasyarakatan sebesar 16,74%. Kemudian jika dilihat peningkatan penyerapannya dibandingkan bulan Agustus 2021, tercatat peningkatan terbesar berada pada sektor Pertambangan (16,5 ribu orang), Lembaga Keuangan (13,0 ribu orang) dan Konstruksi (8,7 ribu orang). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling besar adalah Perdagangan (31,7 ribu orang atau 1,29% poin); Industri (22,8 ribu orang atau 1,01% poin); Transportasi (14,4 ribu orang atau 0,65% poin).

Grafik 2.26 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Selatan



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Grafik 2.27 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Selatan



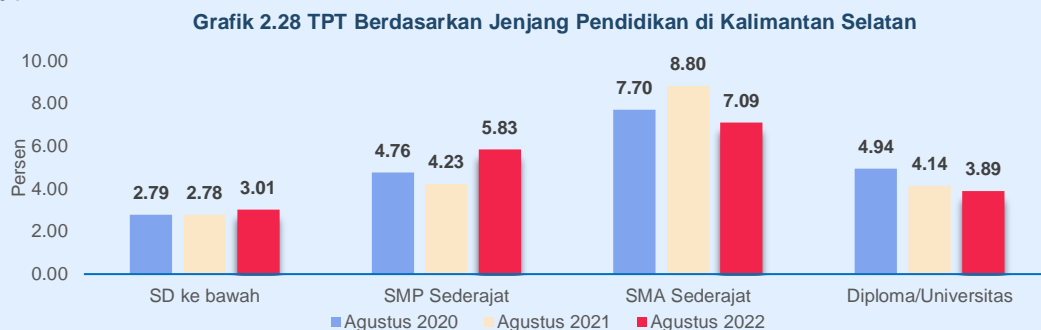
Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur. Pada periode ini, TPT mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,21% poin dibandingkan Agustus 2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT pada Agustus 2022 sebesar 4,74% sebagaimana ditampilkan pada

Tingkat Pengangguran Terbuka pada bulan Agustus tahun 2022 menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan tingkat pengangguran sebelumnya terjadi pada tahun 2020 yang merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19. Pada saat itu, banyak pelaku usaha yang memilih untuk gulung tikar karena permintaan yang menurun drastis. Di sisi lain, peristiwa ini kemudian menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran saat pandemi akibat banyaknya usaha yang tutup. Pada tahun 2022, setelah pulih dari pandemi Covid-19, banyak usaha yang tumbuh sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan menyerap kembali tenaga kerja. Penurunan tingkat pengangguran ini juga menggambarkan terserapnya angkatan kerja yang lulus pada jenjang pendidikan tertentu.

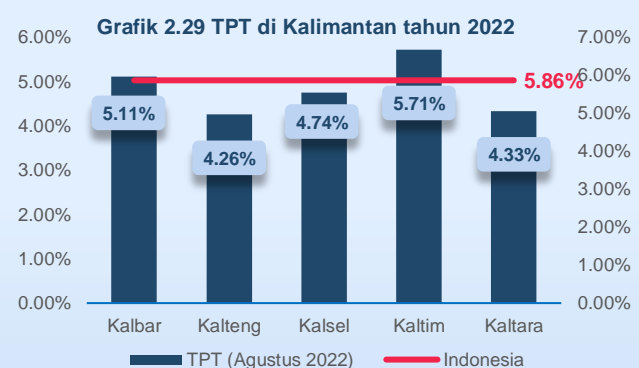
TPT menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat dilihat pada grafik 2.28 berikut ini.



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Pada bulan Agustus 2022, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat masih menjadi penyumbang TPT yang paling tinggi dari tahun-tahun sebelumnya dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya. TPT yang berasal dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat menjadi TPT yang memiliki pertumbuhan tertinggi, yaitu 37,83% dibanding Agustus 2021 dan naik 22,48% dibanding Agustus 2020. Di sisi lain, TPT yang mengalami penurunan tertinggi pada Agustus 2022 adalah TPT yang berasal dari SMA sederajat, yaitu sebesar 19,43%. Tingkat TPT terendah terjadi pada kelompok pendidikan SD ke bawah dikarenakan tenaga kerja pada kelompok tersebut merupakan tenaga kerja kasar yang bisa masuk di semua jenis lapangan usaha, selain itu hal ini juga menunjukkan kecilnya masyarakat yang berhenti sekolah hingga tamat SD dan menjadi pekerja.

Jika dilihat berdasarkan kawasan Kalimantan, TPT Kalimantan Selatan berada pada urutan terendah ke-3 setelah Kalteng dan Kaltara serta masih berada di bawah angka TPT Nasional seperti yang ditampilkan grafik 2.29. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah di Kalimantan Selatan untuk



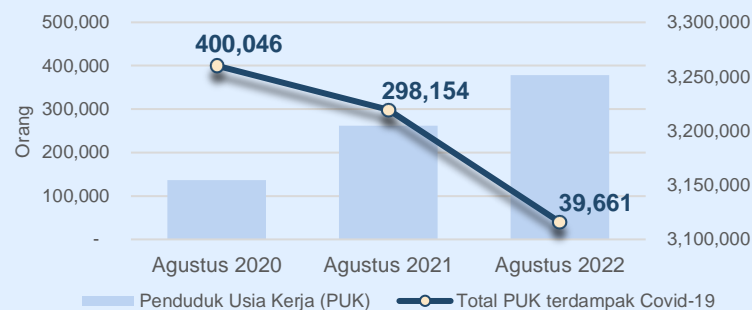
Sumber: BPS (diolah)



menurunkan angka pengangguran di Kalimantan Selatan, yaitu dengan pemberian kartu prakerja, pelaksanaan *job fair*, pemberian bantuan program WUB (wirausaha baru), program padat karya dan lainnya. Selain itu, untuk mendukung pembiayaan usaha dari masyarakat, pemerintah juga telah memberikan subsidi pada pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hal ini ditujukan untuk memperkuat permodalan usaha, sehingga secara tidak langsung juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada ketersediaan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran.

Penduduk Usia Kerja (PUK) di Provinsi Kalimantan Selatan pada Agustus 2022 mencapai 3,25 juta orang, lalu 39.661 orang di antaranya terdampak Covid-19 atau 1,22% terhadap PUK sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.30.

Grafik 2.30 Penduduk Usia Kerja yang terdampak Covid-19 di Kalimantan Selatan



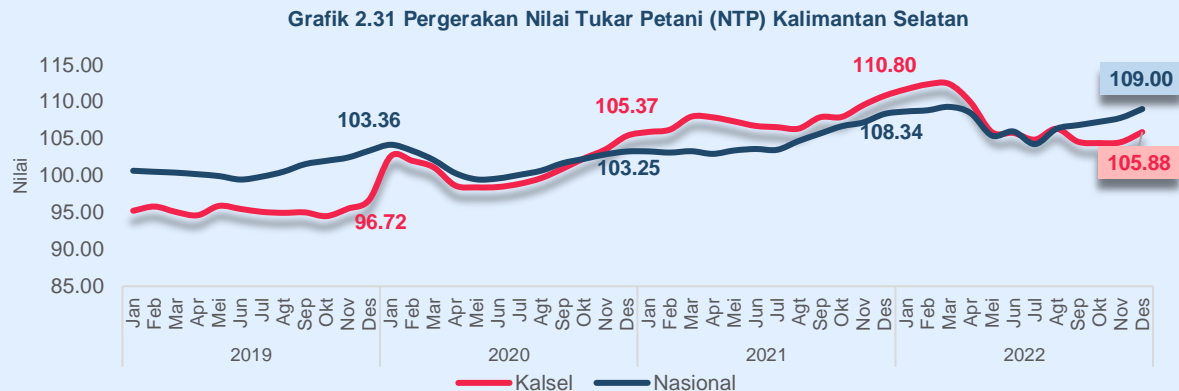
Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Walaupun pandemi Covid-19 pada tahun 2022 sudah berangsur pulih, tercatat masih terdapat penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dengan didominasi oleh pengurangan jam kerja karena Covid-19. Namun demikian, besaran PUK yang terdampak Covid-19 kian menurun dari tahun 2020 hingga 2022. Penurunan ini seiring dengan berkurangnya kasus pandemi Covid-19 disertai pulihnya perekonomian di Kalimantan Selatan.

2.2.5 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). Besaran NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan dan menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan semakin besar NTP pada suatu periode maka semakin besar pendapatan petani yang diterima daripada pengeluarannya dan relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Selatan dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.31 berikut ini.



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

NTP di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2022 menunjukkan nilai yang melebihi angka nasional, namun kemudian berangsur turun hingga akhir tahun 2022. NTP tahun 2022 terbentuk dari It yang merupakan indeks harga yang diterima petani dari hasil produksi pertanian, yang pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, namun di sisi lain Ib yang merupakan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal juga mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan tahun 2021, sehingga menyebabkan NTP gabungan Januari – Desember 2022 mencapai 107,33 atau lebih kecil dari NTP gabungan tahun 2021 yang senilai 107,59. NTP pada Januari – Desember 2022 tertinggi terjadi pada Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yakni sebesar 123,02 dan terendah terjadi pada Subsektor Tanaman Pangan yakni sebesar 98,79.

Jika dibandingkan dengan NTP pada Desember 2022 per provinsi di Kalimantan, Kalimantan Selatan menduduki urutan terendah di Kalimantan dan berada di bawah angka nasional seperti yang ditunjukkan grafik 2.32.

Kondisi cuaca yang kemudian menyebabkan banjir pada lahan pertanian disertai serangan hama menjelang akhir tahun 2022 turut menyumbang penurunan NTP pada tahun 2022 ini dan menyebabkan gagal panen dan menurunnya It. Besaran NTP yang turun dari tahun 2021 relatif menunjukkan penurunan kesejahteraan petani pada tahun 2022.

Pemerintah terus mendorong langkah-langkah konkret untuk meningkatkan produksi pada sektor pertanian, misalnya dengan mengacu pada Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH). Selain meningkatkan produksi dan produktivitas TPH melalui pemanfaatan sumber daya pertanian (modal, teknologi, pasar, informasi, lahan,

Grafik 2.32 NTP di Kalimantan Desember 2022



Sumber: BPS (diolah)

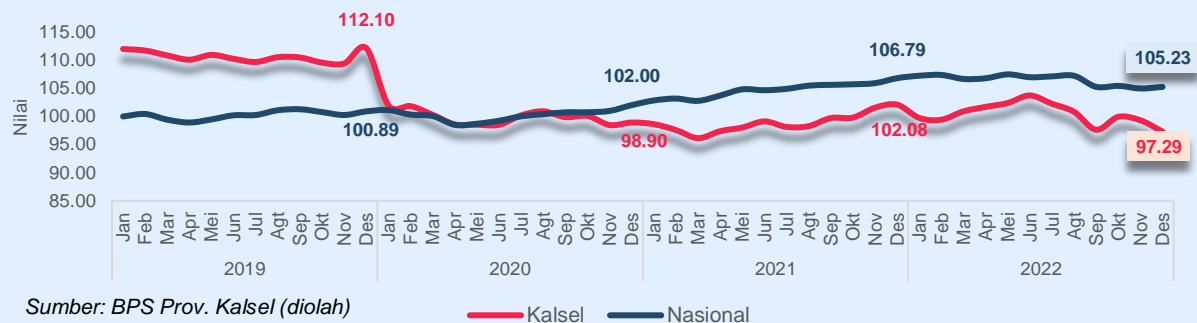


alsintan, dll) secara optimal, pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian TPH juga dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

2.2.6 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTN pada tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.33 bergerak lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya sehingga rata-rata NTN tahun 2022 lebih tinggi 1,57% dari rata-rata NTN tahun 2021, walaupun NTN mengalami penurunan hingga menuju akhir tahun 2022 hingga lebih rendah dari tahun 2020. Penurunan yang terjadi pada bulan-bulan menuju akhir tahun 2022 disebabkan cuaca ekstrem yang menyebabkan para nelayan kesulitan untuk melaut dan menurunkan hasil produksi perikanan hingga akhir tahun 2022.

Grafik 2.33 Pergerakan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kalimantan Selatan

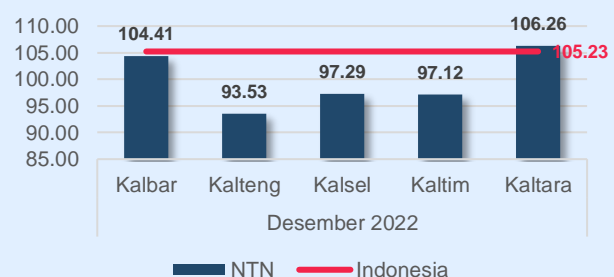


Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.33, pada Desember 2022 NTN turun sebesar 2,03% dari November 2022. Hal ini terjadi karena Lt turun sebesar 1,30% sedangkan Ib naik sebesar 0,75%. Meski begitu, perubahan nilai Lt bervariasi pada kelompok penyusunnya. Pada kelompok penangkapan di perairan umum (khususnya komoditas ikan gabus, sepat, baung, seluang, dan beberapa komoditas lainnya) naik sebesar 1,58% sementara kelompok penangkapan di laut (khususnya komoditas ikan kembung, selangat, gulamah, layang, tembang, dan beberapa komoditas lainnya) turun sebesar 1,94%. Kenaikan nilai Ib disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok Konsumsi Rumah Tangga (KRT) dan Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebesar 0,81% dan 0,68%.

Jika dibandingkan dengan NTN pada Desember 2022 per provinsi di Kalimantan, Kalimantan Selatan menduduki urutan ketiga tertinggi di Kalimantan setelah Kalimantan Barat. Capaian NTN pada periode ini di provinsi Kalimantan sebagian besar masih di bawah angka nasional, terkecuali Kalimantan Utara seperti yang ditunjukkan grafik 2.34.

Grafik 2.34 NTN di Kalimantan Desember 2022



Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, misalnya dengan pemberian bantuan alat penangkapan ikan, pembinaan untuk

meningkatkan hasil jual perikanan, peningkatan kapasitas tonase kapal nelayan serta peningkatan peralatan tangkap ikan, dan lainnya.

2.3 Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJMN. RPJMD menekankan merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu. Dengan berdasarkan pada perbandingan antara target dan capaian atas beberapa indikator makro dan indikator kesejahteraan, efektivitas kebijakan makro ekonomi dan pembangunan Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Hasil Reviu Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sasaran Makro Kesra	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Hasil Reviu
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,0 – 4,5	5,59*	4,5 – 5,2	<p>a. Target pertumbuhan ekonomi tercapai hingga melampaui target pada tahun 2022 karena meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang disertai peningkatan konsumsi sebagai dampak atas pemulihan pandemi Covid-19.</p> <p>b. Proyeksi ekonomi Kalimantan Selatan akan tetap terjaga seperti target 2023 yang diperkirakan, namun tetap harus diiringi dengan berbagai program yang dapat mengendalikan sisi <i>supply</i> di Kalsel untuk menjaga keseimbangan karena meningkatnya konsumsi masyarakat.</p>
2	Inflasi	2,0 – 4,0	6,99	2,0 – 4,0	<p>a. Inflasi yang terjadi tahun 2022 melampaui target inflasi yang ditentukan, karena pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi yang meningkatkan sisi <i>demand</i> ditambah dengan adanya tekanan geopolitik yang kemudian menekan sisi <i>supply</i> dan berpengaruh pada berbagai harga komoditas secara nasional, serta faktor lain seperti cuaca ekstrem yang mengganggu produksi pangan di Kalsel.</p> <p>b. Proyeksi inflasi pada tahun 2023 belum mempertimbangkan keadaan inflasi yang melonjak naik signifikan pada tahun 2022 sehingga diperlukan evaluasi atas target 2023.</p>



No	Sasaran Makro Kesra	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Hasil Reviu
3	IPM	71,70	71,84	72,20	<p>a. Capaian IPM Kalsel pada tahun 2022 sudah dapat melebihi target, seiring dengan pembangunan manusia yang semakin baik di Kalsel.</p> <p>b. Berkaca dari IPM yang selalu meningkat di tiap tahunnya dan pembangunan SDM yang semakin baik di Kalsel, IPM pada tahun 2023 diasumsikan dapat meningkat dengan optimis sesuai dengan target 2023.</p>
4	Kemiskinan	4,80 – 4,60	4,61	4,50 – 4,40	<p>a. Capaian tingkat kemiskinan Kalsel tahun 2022 sudah berada di kisaran target dan merupakan angka terendah ke-2 di Indonesia, sehingga capaian ini jauh lebih baik dibandingkan nasional. Upaya pengentasan kemiskinan di Kalsel menunjukkan hasil yang baik pada tahun 2022.</p> <p>b. Dengan melihat dari pengalaman di Kalsel yang angka kemiskinannya berada di bawah angka nasional, diproyeksikan tingkat kemiskinan tahun 2023 juga kian membaik seiring ekonomi masyarakat yang semakin pulih.</p>
5	Pengangguran	4,39	4,74	4,22	<p>a. Capaian TPT tahun 2022 turun dari tahun sebelumnya namun masih belum dapat memenuhi target yang ditetapkan di Kalsel. Target ini belum mempertimbangkan adanya lonjakan tingkat pengangguran pada tahun 2021 sebagai dampak pandemi dan meningkatnya angkatan kerja, sehingga pada tahun 2022 ditargetkan tingkat pengangguran turun drastis.</p> <p>b. Peningkatan aktivitas ekonomi diasumsikan terjadi pada tahun 2023, sehingga membuka peluang usaha yang dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan diproyeksikan pengangguran juga ikut berkurang.</p>
6	Rasio Gini	0,328	0,309	0,324	<p>a. Hasil capaian rasio gini 2022 telah berada di bawah target yang artinya menunjukkan makin tingginya pemerataan di Kalsel seiring dengan tingkat kemiskinan yang juga semakin membaik. Upaya pemerataan turut membuahkan hasil pada tahun 2022.</p> <p>b. Berdasarkan perkembangan rasio gini yang kian menurun, diproyeksikan rasio ini juga</p>

No	Sasaran Makro Kesra	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Hasil Reviu
					akan turun pada tahun 2023. Namun demikian, target tahun 2023 masih terlalu rendah jika melihat capaian yang cukup baik pada tahun 2022.
7	NTP	102,23	105,88	102,7	<p>a. Capaian NTP pada tahun 2022 telah menunjukkan angka yang melebihi target walaupun perkembangannya pada tahun 2022 cenderung menurun. Peningkatan NTP ini utamanya disumbangkan dari subsektor tanaman perkebunan rakyat.</p> <p>b. Besaran NTP pada tahun 2023 diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun 2022. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan mitigasi bencana yang dapat melindungi produksi dan hasil pertanian agar NTP tetap stabil.</p>

Sumber RPJMD 2021-2026, RKPD 2023 (diolah)

Bab III

Analisis Fiskal Regional

Highlight

- Pendapatan negara mencapai hasil yang impresif hingga 125% dari target dan didominasi oleh sektor perpajakan.
- Belanja negara mengalami penyerapan yang tinggi dikarenakan adanya penyaluran kurang bayar/lebih bayar dari dana transfer tahun 2021.
- Pendapatan daerah berhasil mencapai penerimaan hingga 101,29% dari target yang ditetapkan.
- Dalam penyerapan belanja daerah, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi yang lebih optimal dari Bendahara Umum Daerah.



Banjarmasin Sasirangan Festival **27 September-1 Oktober 2022**

“

Banjarmasin Sasirangan Festival (BSF) merupakan salah satu rangkaian acara dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Banjarmasin ke-496. BSF merupakan agenda tahunan yang telah diselenggarakan selama 6 tahun berturut-turut dengan mengusung kearifan budaya lokal berupa kain sasirangan khas Banjar. Acara tersebut juga menampilkan karnaval sasirangan, pawai budaya, dan peragaan busana dari desainer-desainer kenamaan asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

”



3.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan. Kerja keras APBN melalui peran sebagai *shock absorber* berhasil meredam gejolak perekonomian global. Berikut disajikan perkembangan pendapatan dan belanja negara di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 *I-Account* Realisasi APBN Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2020-2022

dalam Miliar Rp

URAIAN	PAGU	2020 REALISASI	%REAL	PAGU	2021 REALISASI	%REAL	PAGU	2022 REALISASI	%REAL	%Growth (2022 - 2021)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	13.038,29	8.971,84	68,81%	9.948,47	11.877,23	119,39%	14.626,48	18.232,76	124,66%	53,51%
Penerimaan Perpajakan	11.999,46	7.804,94	65,04%	8.965,19	10.708,77	119,45%	13.557,80	16.801,79	123,93%	56,90%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.038,83	1.166,90	112,33%	983,28	1.168,46	118,83%	1.068,68	1.430,97	133,90%	22,47%
Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
BELANJA NEGARA	26.674,62	25.810,42	96,76%	25.762,49	26.406,44	102,50%	28.729,70	34.000,12	118,34%	28,76%
BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP)	8.472,32	7.631,65	90,08%	9.488,12	9.290,62	97,92%	8.400,31	8.097,39	96,39%	-12,84%
Belanja Pegawai	3.533,91	3.499,22	99,02%	3.530,31	3.568,08	101,07%	3.622,60	3.558,52	98,23%	-0,27%
Belanja Barang	3.566,07	2.816,67	78,99%	3.168,75	3.038,27	95,88%	2.950,50	2.826,82	95,81%	-6,96%
Belanja Modal	1.360,50	1.304,00	95,85%	2.777,51	2.672,72	96,23%	1.815,70	1.700,54	93,66%	-36,37%
Belanja Bantuan Sosial	11,84	11,76	99,32%	11,55	11,55	100,00%	11,51	11,51	99,98%	-0,37%
Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)	18.202,30	18.178,77	99,87%	16.274,37	17.115,82	105,17%	20.329,39	25.902,73	127,42%	51,34%
Dana Transfer Umum (DTU)	12.549,08	12.501,75	99,62%	10.505,48	11.551,62	109,96%	15.185,79	21.110,26	139,01%	82,75%
Dana Alokasi Umum	4.920,81	4.919,84	99,98%	7.486,17	7.486,17	100,00%	7.488,13	7.488,13	100,00%	0,03%
Dana Bagi Hasil	7.628,27	7.581,91	99,39%	3.019,31	4.065,45	134,65%	7.697,66	13.622,12	176,96%	235,07%
Dana Transfer Khusus (DTK)	3.317,09	3.342,53	100,77%	3.797,29	3.602,96	94,88%	3.582,62	3.233,27	90,25%	-10,26%
Dana Alokasi Khusus Fisik	1.075,49	1.012,14	94,11%	1.450,86	1.332,25	91,82%	1.279,17	1.146,19	89,60%	-13,97%
Dana Alokasi Khusus NonFisik	2.241,60	2.330,39	103,96%	2.346,43	2.270,71	96,77%	2.303,45	2.087,08	90,61%	-8,09%
Dana Insentif Daerah (DID)	823,19	823,19	100,00%	445,83	445,83	100,00%	134,47	134,47	100,00%	-69,84%
Dana Insentif Daerah	823,19	823,19	100,00%	445,83	445,83	100,00%	134,47	134,47	100,00%	-69,84%
Dana Desa	1.512,94	1.511,30	99,89%	1.525,77	1.515,41	99,32%	1.426,51	1.424,73	99,88%	-5,98%
Dana Desa	1.512,94	1.511,30	99,89%	1.525,77	1.515,41	99,32%	1.426,73	1.424,73	99,86%	-5,98%
SURPLUS/DEFISIT	(13.636,33)	(16.838,58)	123,48%	(15.814,02)	(14.529,21)	91,88%	(14.103,22)	(15.767,36)	111,80%	8,52%

Sumber: OMSPAN, Kanwil DJP Kalselteng dan Kanwil DJBC Kalbagsel (diolah)

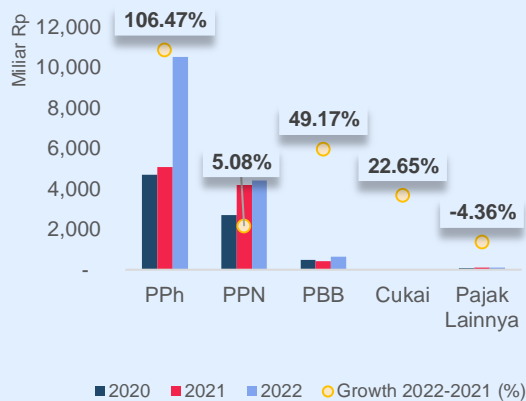
Realisasi pendapatan APBN di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh booming harga komoditas batubara dan minyak sawit mentah (CPO), meningkatnya konsumsi masyarakat, adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) serta kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Dari sisi belanja pemerintah pusat mengalami penurunan yang disebabkan oleh kontraksi alokasi dan realisasi belanja modal dan belanja barang. Belanja modal terkontraksi paling tinggi disebabkan adanya penundaan belanja modal di tahun 2020 akibat *refocusing* dan diberikan di tahun 2021 sehingga terlihat ditahun 2022 belanja modal terkontraksi tinggi.

3.1.1 Pendapatan Negara

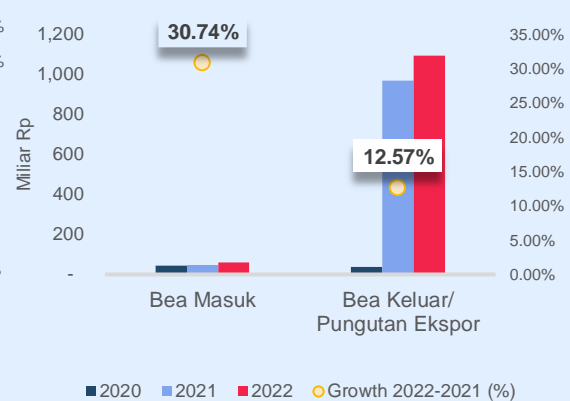
3.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

Secara agregat, penerimaan Perpajakan baik dalam negeri maupun perdagangan internasional mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2021. Berikut disajikan perkembangan pendapatan perpajakan pada grafik 3.1 dan grafik 3.2.

Grafik 3.1 Pajak Dalam Negeri 2020-2022



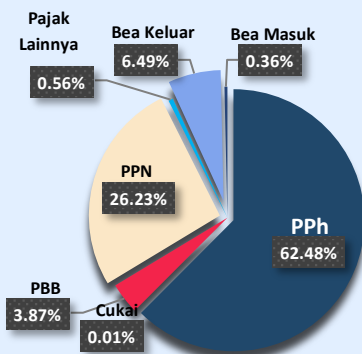
Grafik 3.2 Pajak Perdagangan Internasional 2020-2022



Sumber: GFS, Kanwil DJP Kalselteng dan Kanwil DJBC Kalbagsel (diolah)

Pendapatan Pajak Penghasilan dan Pajak Bea Keluar/Pungutan Ekspor mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut menandakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di Kalimantan Selatan. Tingginya nilai ekspor disebabkan oleh *windfall effect* dari kenaikan harga komoditas pertambangan di bulan Februari 2022 setelah adanya pencabutan kebijakan pelarangan ekspor batubara di bulan Januari 2022 oleh Pemerintah Pusat.

Grafik 3.3 Kontribusi Komponen Penerimaan terhadap Total Pendapatan Tahun 2022



Sumber: Kanwil DJP Kalselteng dan Kanwil DJBC Kalbagsel (diolah)

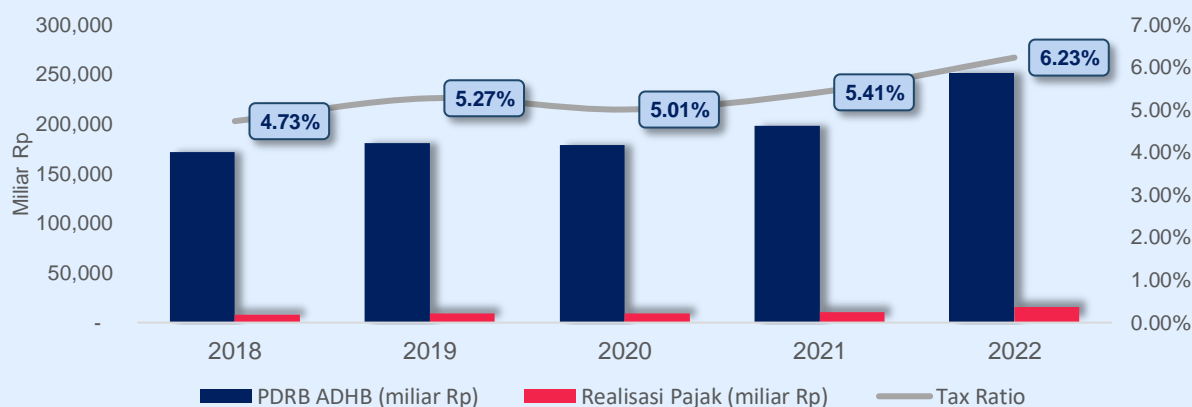
Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 telah mencapai Rp16,80 triliun atau 123,93% dari target penerimaan sebesar Rp13.56 triliun. Penerimaan perpajakan didominasi oleh penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp15.65 triliun atau 93,51% dari total penerimaan perpajakan. Pajak Penghasilan (PPh) menjadi sumber utama penerimaan pajak dalam negeri dengan kontribusi sebesar 67,08% dari total penerimaan pajak dalam negeri, capaian tersebut meningkat sebesar 106,47% secara *y-on-y* yang didominasi oleh peningkatan PPh Pasal 22 Impor/Ekspor akibat peningkatan harga komoditas serta PPh Pasal 21 sebagai dampak beroperasinya kembali perusahaan yang menyerap tenaga kerja. Selain itu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mendorong peningkatan



penerimaan perpajakan. Penerimaan PPN pada tahun 2022 mencapai Rp4.406,69 miliar dan mengalami peningkatan 5,08% (*y-on-y*) yang disebabkan terdapat perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 serta perubahan tata cara pemungutan oleh bendaharawan pemerintah. Penerimaan pajak perdagangan internasional ditopang oleh Bea Keluar/ Pungutan Ekspor dengan total realisasi Rp1.091,61 miliar atau meningkat 12,57% secara *y-on-y* yang dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas utama diekspor yang terkena Bea Keluar dan peningkatan permintaan dalam negeri terkait barang impor alat berat dari perusahaan pertambangan di Banjarmasin, Bea Keluar disebabkan *booming* harga komoditi sawit dan Cukai beras dari vape.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak di suatu daerah dapat diukur dari *tax ratio* atau perbandingan antar jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan PDRB suatu daerah. Berikut disajikan perkembangan rasio pajak sebagaimana pada grafik 3.4.

Grafik 3.4 *Tax Ratio* Kalimantan Selatan 2018-2022



Sumber: BPS dan Kanwil DJP (diolah)

Pada tahun 2022, *tax ratio* Kalimantan Selatan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disebabkan aktivitas ekonomi yang berangsur kembali normal setelah pemberlakuan pembatasan aktivitas sehingga mendorong peningkatan PDRB. Selain itu keberhasilan pelaksanaa kebijakan PPS dan kenaikan tarif PPN 11% yang masif memberikan dampak peningkatan penerimaan pajak. Pertumbuhan realisasi pajak yang lebih besar (46,14%) dibandingkan pertumbuhan PDRB (26,97%) mencerminkan keberhasilan kinerja Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak negara baik melalui kebijakan maupun pendekatan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3.2 Kontribusi Sektor LU terhadap Penerimaan Pajak

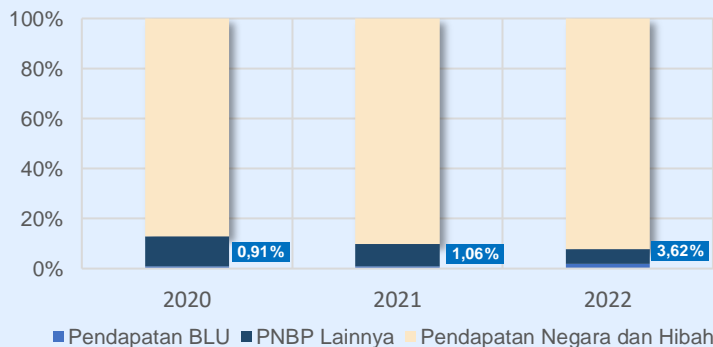
No	Nama Sektor	Realisasi	Growth	Kontribusi
1.	Pertambangan dan Penggalian	5.393,53	82,86%	34,46%
2.	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4.125,81	70,29%	26,36%
3.	Transportasi dan Pergudangan	1.562,49	44,93%	9,98%
4.	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan	1.438,63	81,44%	9,19%
5.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	596,23	15,02%	3,81%
6.	Kegiatan Jasa Lainnya	595,58	261,08%	3,81%
7.	Keuangan dan Asuransi	450,12	6,93%	2,88%
8.	Industri Pengolahan	331,66	17,91	2,12%
9.	Konstruksi	300,76	-36,90%	1,92%
10.	Sektor Lainnya	854,97	44,31%	5,46%

Penerimaan pajak di Kalimantan Selatan tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang signifikan disebabkan oleh kenaikan produksi dan harga komoditas batubara dan kelapa sawit beserta sektor pendukungnya, penerimaan pajak penghasilan final dari implementasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebesar Rp755,5 miliar, dan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 sebagai salah satu amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022

Grafik 3.5 PNBP 2020-2022



Sumber: OMSPAN (diolah)

memberikan kontribusi 7,85% terhadap pendapatan negara dan hibah. Distribusi pendapatan BLU terhadap PNBP mengalami pertumbuhan signifikan sebagaimana grafik 3.5. sebesar 242,42% yang disebabkan oleh penambahan status jumlah satker BLU yang ada di Kalimantan Selatan yaitu Universitas Lambung Mangkurat. dengan pendapatan sebesar Rp267,46 miliar.

3.1.2 Belanja Negara

3.1.2.1 Belanja Pemerintah Pusat

APBN 2022 telah bekerja keras sebagai *tools* untuk menjadi *shock absorber* untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Fungsi APBN untuk melindungi masyarakat tergambarkan dari sisi belanjanya. Belanja negara tahun 2022 tumbuh positif dan terus dioptimalkan yang mencatatkan realisasi Rp3.090,8



triliun tumbuh 10,9% atau 99,5% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Persentase total belanja Pemerintah Pusat di Kalimantan Selatan dibandingkan Nasional baru sebesar 0,26%. Berikut disajikan perkembangan alokasi dan realisasi belanja sebagaimana grafik 3.6.



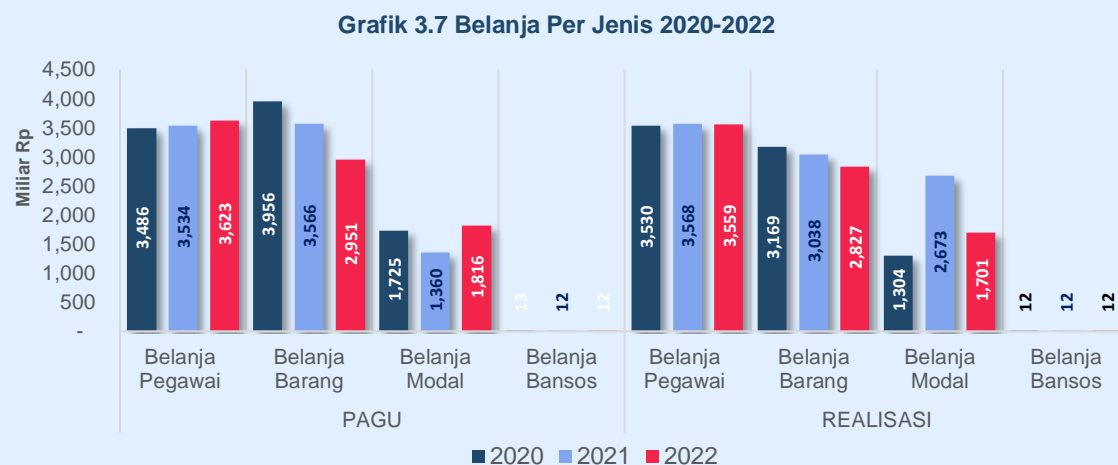
Sumber: OMSPAN (diolah)

Belanja Pemerintah di Kalimantan Selatan diprioritaskan pada belanja fungsi pendidikan dengan porsi 23% dari total alokasi belanja guna membangun SDM unggul dan produktif. Disisi lain belanja infrastruktur terjadi penurunan alokasi akibat terjadi pergeseran alokasi dimana ditahun 2021 Kalimantan Selatan

mengalami musibah bencana banjir sehingga alokasi infrastruktur difokuskan pada perbaikan infrastruktur yang terdampak banjir.

3.1.2.2 Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja tertinggi masih didominasi oleh belanja pegawai namun realisasi kinerja tertinggi terdapat pada jenis belanja modal sebesar 100%. Berikut disajikan grafik perkembangan realisasi belanja per jenis sebagaimana grafik 3.7.



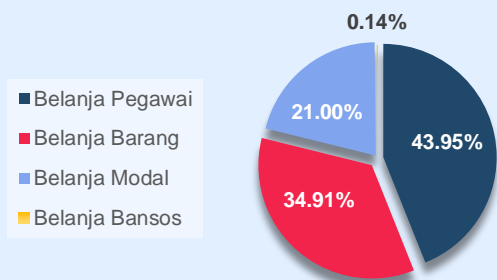
Sumber: OMSPAN (diolah)

Kenaikan signifikan belanja pegawai di bulan April dikarenakan adanya pembayaran gaji dan tunjangan kinerja keempatbelas atau THR berkontribusi besar terhadap capaian kinerja realisasi belanja pegawai. Di sisi lain, jenis belanja dengan fluktuasi realisasi bulanan paling ekstrem ialah belanja bantuan sosial. Realisasi belanja bantuan sosial terpusat di bulan April, mencapai 46,07%. Hal tersebut dikarenakan proses asesmen Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) membutuhkan waktu yang sangat lama.

Belanja barang di Kalimantan Selatan terdistribusi dalam 61 program dengan tingkat realisasi sebesar 95,81% dari pagu. Rendahnya realisasi di awal tahun menyebabkan kinerja realisasi semester I masih jauh dari target. Selain itu, penurunan signifikan realisasi belanja di bulan Mei turut berkontribusi atas tidak tercapainya target kinerja realisasi. Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa menjadi penyumbang utama buruknya kinerja belanja barang. Belanja modal terkontraksi akibat terjadi pergeseran alokasi dimana ditahun 2021 Kalimantan Selatan mengalami musibah bencana banjir sehingga belanja modal difokuskan pada perbaikan infrastruktur yang terdampak banjir.

Alokasi belanja mengalami tren menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2022 kecuali

Grafik 3.8 Proporsi Belanja Pemerintah 2022



Sumber: OMSPAN (diolah)

pada Belanja Pegawai yang tumbuh 2,61% dibandingkan alokasi tahun 2021. Berikut disajikan proporsi belanja pemerintah yang nampak pada grafik 3.8. Selain belanja barang, belanja modal merupakan belanja yang mengalami penurunan terbesar disebabkan oleh pagu yang menurun

dibandingkan tahun 2021 serta proses revisi blokir *Automatic Adjustment (AA)* pada belanja modal yang belum selesai dan bernilai signifikan. Capaian tertinggi belanja modal terdapat pada program infrastruktur konektivitas sebesar Rp676,98 miliar atau 39,81% dari total belanja modal, dan program terbesar kedua pada program ketahanan sumber daya air mencapai Rp301,77 miliar atau 17,75% dari total belanja modal. Ini menunjukkan bahwa meskipun dalam pagu anggaran mengalami penurunan, namun pembangunan untuk mendukung prioritas nasional tetap menjadi fokus utama.

3.1.2.3 Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga

Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan organisasi/sektoral dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan Bagian Anggarannya. Berikut perkembangan pagu realisasi pada 15 K/L dengan pagu anggaran terbesar sebagaimana tabel 3.3.

Tabel 3.3 Pagu dan Anggaran Belanja K/L 2020-2022

Kementerian/Lembaga	PAGU			Trendline Pagu	REALISASI			Trendline Pagu	Growth Realisasi (yoy)
	2020	2021	2022		2020	2021	2022		
BENDAHARA UMUM NEGARA	3.351,62	3.689,59	3.519,74		3.268,14	3.543,90	3.320,75		-6,30%
KEMENTERIAN AGAMA	1.686,91	1.607,99	1.615,49		1.695,32	1.614,35	1.569,64		-2,77%
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.373,66	2.771,72	1.509,07		1.291,56	2.715,25	1.410,89		-48,04%
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.123,64	1.163,37	1.341,35		1.110,99	1.158,71	1.335,06		15,22%
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	740,68	826,58	810,48		682,50	792,21	760,63		-3,99%
KEMENTERIAN PERTAHANAN	641,48	637,69	622,58		629,37	634,12	620,59		-2,13%
KEMENTERIAN PERTANIAN	265,93	348,37	253,15		255,26	337,33	238,40		-29,33%
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	188,02	203,47	241,42		181,72	199,24	236,69		18,80%
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	184,99	269,28	209,72		180,00	265,89	208,07		-21,75%
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	270,12	243,30	209,56		167,04	212,30	192,93		-9,13%
MAHKAMAH AGUNG	185,27	217,79	207,54		182,02	212,14	200,15		-5,65%
KEMENTERIAN KESEHATAN	126,12	147,69	174,07		111,91	135,98	154,40		13,55%
BADAN PUSAT STATISTIK	98,52	85,60	168,22		91,03	83,27	166,41		99,85%
KEMENTERIAN KEUANGAN	134,79	131,05	166,28		129,00	126,76	161,27		27,22%
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	207,02	160,11	146,14		200,78	158,79	144,65		-8,90%

Sumber: Aplikasi OMSPAN (diolah)



Berdasarkan tabel 3.3, terlihat bahwa tren alokasi 15 K/L terbesar di tahun 2022, 9 K/L mengalami penurunan pagu dibanding tahun sebelumnya. Hasil analisa yang dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metodologi analisis, seperti analisis *tracking* dan *tracing*, analisis *fishbone* serta analisis *USG (Urgency, Seriously and Growth)* masih ditemukan permasalahan-permasalahan dalam realisasi belanja K/L. Akar masalah realisasi belanja ini berasal dari penganggaran, pengadaan barang dan jasa, eksekusi kegiatan, dan mekanisme penyaluran belanja.

Dari sisi penganggaran, beberapa *bottlenecking* realisasi belanja yang teridentifikasi antara lain, adanya kebijakan *Automatic Adjustment (AA)* atau pencadangan dana pemerintah. Kebijakan ini menyebabkan perlunya penyesuaian berupa revisi DIPA yang bersifat terpusat dan umumnya memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses konsolidasi internal K/L. Akibatnya satker tidak memiliki fleksibilitas untuk mengeksekusi kegiatan selama proses revisi DIPA belum selesai pada tataran pusat. Keluhan ini menjadi permasalahan paling dominan yang menghambat proses realisasi belanja satker.

Dari sisi pengadaan barang dan jasa, permasalahan yang cukup dominan dibicarakan dalam berbagai kesempatan forum adalah kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kebijakan ini dirasakan menjadi hambatan bagi satker yang akan melakukan pengadaan barang yang spesifikasi barangnya belum tersedia dari produksi dalam negeri. Sementara untuk pengadaan produk ekspor yang bersifat mendesak dan memerlukan dispensasi, sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur dengan jelas. Kebijakan ini juga menyebabkan keterbatasan vendor penyedia barang jasa yang memenuhi spesifikasi pekerjaan sesuai ketentuan. Akibatnya satker mengalami keterlambatan eksekusi karena membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan vendor yang sesuai. Terlebih lagi kebijakan kontrak payung atau lelang terpusat pada K/L tertentu yang memakan waktu tidak sebentar. Kebijakan implementasi kontrak pra DIPA yang ditujukan untuk percepatan realisasi belanja ternyata belum banyak dimanfaatkan oleh satker-satker di Kalimantan Selatan. Hal yang menjadi kendala mereka antara lain, kompetensi SDM yang masih terbatas serta tidak adanya dorongan dari eselon I masing-masing untuk melakukan lelang dini pekerjaan. Begitupun dengan terbatasnya pejabat fungsional pengadaan barang jasa di unit vertikal menyebabkan proses lelang pekerjaan harus dilaksanakan melalui Kelompok Kerja (Pokja) pusat yang tentu saja akan memakan waktu yang lebih lama.

Bottlenecking realisasi belanja dari sisi eksekusi kegiatan, pada prinsipnya mungkin saja berawal dari permasalahan-permasalahan dari tahap penganggaran sampai dengan proses pengadaan barang dan jasanya. Namun permasalahan pada tahap eksekusi kegiatan ini masih didominasi oleh permasalahan yang senantiasa berulang setiap tahun

anggaran antara lain seperti keterlambatan diterimanya petunjuk teknis, terbatasnya SDM khusus pengelola keuangan, dan alokasi belanja pegawai dan operasional yang tidak sesuai dengan usulan dan kebutuhan dilapangan. Selain itu, permasalahan baru dalam tahap eksekusi kegiatan adalah adanya kenaikan tarif PPN 11% sebagai akibat dari pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menyebabkan satker perlu melakukan addendum dan penyesuaian pagu pada kontrak-kontrak pekerjaan mereka.

Terakhir dari sisi mekanisme penyaluran belanja berasal dari implementasi SAKTI *full module* serta kebijakan digipay yang melibatkan banyak pihak. Implementasi *full module* SAKTI dan digipay yang dilakukan dalam waktu bersamaan membutuhkan kesiapan dan *extra effort* SDM pada satker baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Implementasi di tahun pertama sejatinya memerlukan proses adaptasi dan penyesuaian metode kerja pada satker sehingga menjadi hambatan pada beberapa satker. Terlebih pada implementasi *digipay* yang melibatkan banyak pihak, baik internal satker, vendor UMKM maupun perbankan masih sering menemui hambatan dalam koordinasinya.

3.1.2.4 Berdasarkan Fungsi

Klasifikasi anggaran menurut fungsi merupakan pengelompokkan alokasi anggaran yang mencerminkan fungsi pemerintahan pada setiap satuan kerja dan bagian anggaran. Belanja Kementerian/Lembaga berdasarkan fungsi secara keseluruhan dilaksanakan oleh satuan kerja 44 K/L lingkup Kalimantan Selatan. Berikut disajikan perkembangan belanja per fungsi pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Pagu dan Anggaran Belanja Per Fungsi 2020-2022

dalam miliar Rp

Belanja Per Fungsi	PAGU			Trendline Pagu	REALISASI			Trendline Realisasi	Growth Realisasi (yoy)
	2020	2021	2022		2020	2021	2022		
AGAMA	206,07	213,37	232,18		197,89	211,50	228,85		8,20%
EKONOMI	1.560,83	2.933,04	1.911,15		1.487,01	2.875,21	1.792,58		-37,65%
KESIHATAN	207,40	239,29	297,93		187,50	226,86	278,17		22,62%
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.656,54	1.723,41	1.954,32		1.619,52	1.707,63	1.934,36		13,28%
LINGKUNGAN HIDUP	440,93	366,60	303,03		333,66	334,37	285,00		-14,77%
PARAWISATA DAN BUDAYA *)	0,14	-	1,40		0,13	-	1,35		-
PELAYANAN UMUM	4.370,16	4.152,59	4.084,65		4.021,65	3.989,38	3.865,42		-3,11%
PENDIDIKAN	2.342,37	2.307,77	2.323,75		2.293,27	2.273,86	2.225,25		-2,14%
PERLINDUNGAN SOSIAL	34,42	33,98	27,18		32,85	33,51	26,06		-22,22%
PERTAHANAN	641,48	637,69	622,58		629,37	634,12	620,59		-2,13%
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	352,58	566,70	162,51		329,94	550,82	160,98		-70,77%

*) data fungsi Parbud th 2021 perlu konfirmasi lebih lanjut

Sumber: Aplikasi SINTESA (diolah)

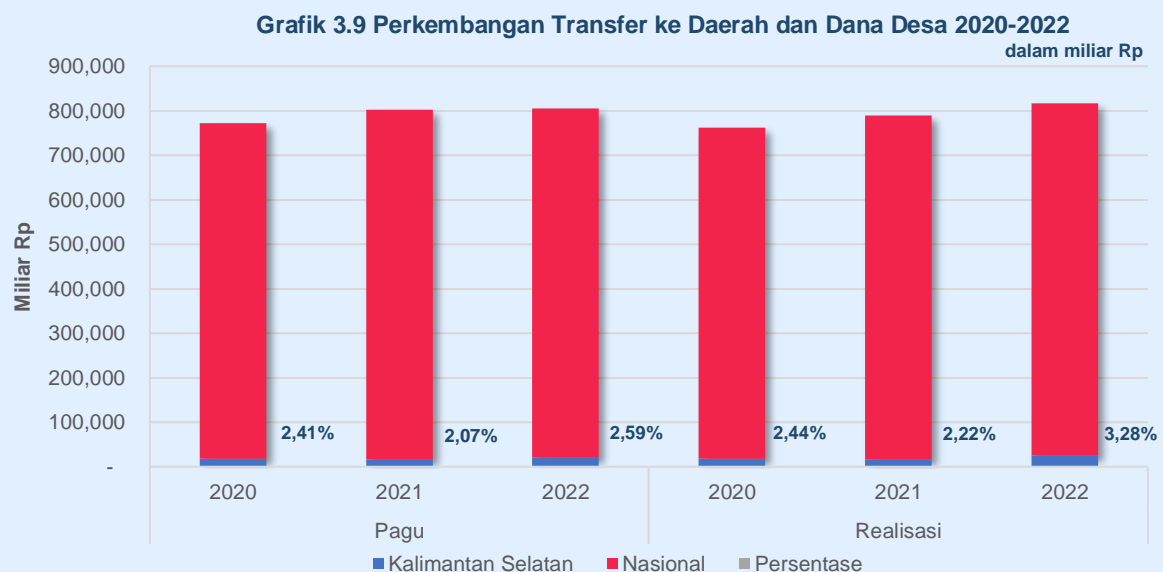
Sebagian besar fungsi pemerintahan telah dilaksanakan secara optimal di tahun 2022. Fungsi Pelayanan umum memiliki realisasi tertinggi, namun demikian, fungsi dengan kinerja realisasi tertinggi ialah fungsi Pertahanan mencapai 99,68%. Di sisi lain, fungsi Kesehatan terlihat memiliki kinerja terendah di tahun 2022 ini disebabkan oleh keterlambatan penyampaian juknis dari kantor pusat menyebabkan beberapa kegiatan



dalam rangka penyelenggaraan fungsi Kesehatan terlambat dilaksanakan. Sulitnya menemukan peralatan kesehatan dengan spesifikasi yang sesuai di dalam negeri juga memengaruhi kinerja penyelenggaraan fungsi Kesehatan. Selain itu, BLU Rumkit Bhayangkara Banjarmasin yang kegiatan operasionalnya ialah pelayanan kesehatan, berdasarkan klasifikasi anggaran menyelenggarakan fungsi Ketertiban dan Keamanan. Hal ini menunjukkan ketidakselarasan antara klasifikasi anggaran dan tugas dan fungsi yang secara nyata diselenggarakan Satker.

3.1.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD)

Salah satu aspek penting dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terefleksi dalam *intergovernmental fiscal relations*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Berikut disajikan perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) Kalimantan Selatan sebagaimana grafik 3.9.



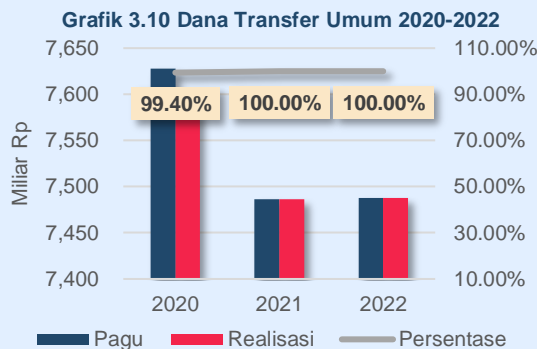
Sumber: Aplikasi SIMTRADA (diolah)

Transfer ke daerah merupakan bagian dari belanja Negara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terdiri dari Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Otonomi Khusus dan dana transfer lainnya serta Dana Desa. Kontribusi belanja negara terhadap komponen pendapatan daerah masih menjadi tumpuan utama pemerintah daerah dengan persentase sekitar 70%. Namun dari tahun 2020, persentase besaran pendapatan transfer pemerintah pusat terhadap pendapatan pemerintah daerah setiap tahun mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah sudah berusaha mengoptimalkan potensi daerah sehingga dapat menyumbang terhadap pendapatan asli daerahnya.

3.1.3.1 Dana Transfer Umum (DTU)

3.1.3.1.1 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan



Sumber: OMSPAN (diolah)

APBN yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan keuangan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal. Tampak pada grafik 3.10 perkembangan alokasi DAU tahun 2020-2022. Penyaluran DAU kepada Pemerintah Daerah se-Provinsi

Kalimantan Selatan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp7,50 triliun atau meningkat sebesar 0,03% dibanding tahun sebelumnya. Realisasi penyaluran DAU telah mencapai 100% dari pagu. Diharapkan dengan penyaluran yang optimal akan dapat mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasana layanan publik serta ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan, dan mendukung pembangunan SDM.

3.1.3.1.2 Dana Bagi Hasil

Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan Pemerintah Daerah dengan tujuan memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Perkembangan alokasi dan realisasi DBH di Kalimantan Selatan dapat dilihat



Sumber: Simtrada DJPK (diolah)

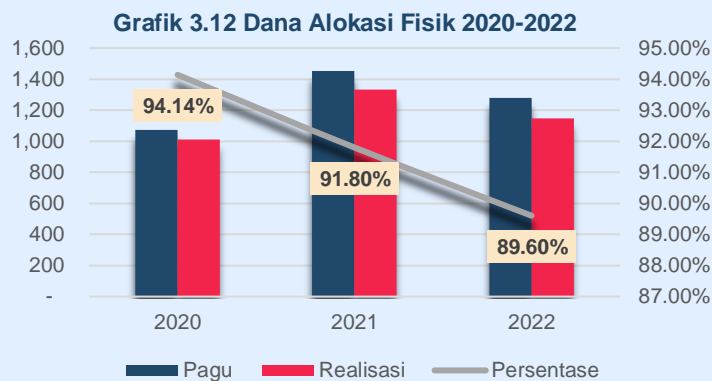
pada grafik 3.11. Penyaluran DBH secara agregat di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sebesar meningkat sebesar 235,11% dibandingkan tahun lalu. Alokasi DBH di Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan hingga 89,36% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi DBH disebabkan adanya pembayaran DBH ditahun 2021 yang masih tertunda. Penerimaan Negara yang dibagihasilkan terutama Penerimaan PBB yang turun 3,03% akibat anomali dari penerimaan PNPB dan Pajak dari sumber daya alam yang mengalami peningkatan di tahun 2021 sehingga DBH seyogyanya juga meningkat. Dengan demikian terjadi hutang DBH tahun 2021 yang disalurkan di tahun 2022. Berdasarkan persentase penyaluran, seluruh kabupaten/kota



lingkup Kalimantan Selatan telah menyalurkan 100% dari dana DBH yang telah dialokasikan.

3.1.3.2 Dana Transfer Khusus

3.1.3.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik



Sumber: Simtrada DJPK (diolah)

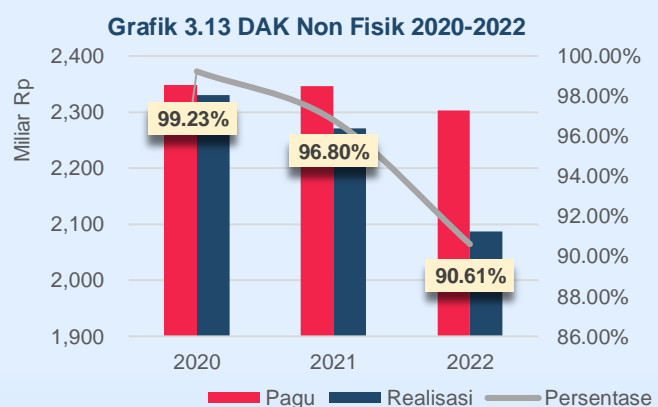
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional. Berikut disajikan perkembangan penyaluran

DAU pada grafik 3.12. Penyaluran DAK Fisik lingkup Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp1,15 triliun atau 89,60% terhadap pagu. Rendahnya penyaluran DAK Fisik disebabkan oleh realisasi kontrak terhadap pagu hanya sebesar 90,40%. Dari total penyaluran DAK Fisik s.d Desember 2022 terdapat pengendapan saldo di RKUD sebesar Rp194,62 miliar atau 16,6%. Hal ini disebabkan adanya selisih penyaluran dengan kebutuhan dana riil di lapangan. Secara persentase, penyaluran DAK Fisik tertinggi adalah Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp135,28 miliar atau 97,96% terhadap pagu. Alokasi DAK Fisik Kalimantan Selatan pada tahun 2022 menurun sebesar 11,84% dibandingkan dengan tahun 2021 yang disebabkan penghilangan alokasi DAK Fisik Penugasan seperti Bidang Kesehatan dan KB, Bidang Air Minum, Bidang Industri Kecil dan Menengah, serta Bidang Sanitasi yang terdapat alokasi di tahun 2021.

3.1.3.2.1 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) disalurkan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. Berikut disajikan perkembangan alokasi dan realisasi pada grafik 3.13.

Penyaluran DAK Non Fisik di Kalimantan Selatan sebesar Rp2,09 triliun terkontraksi signifikan sebesar 8,10% atau



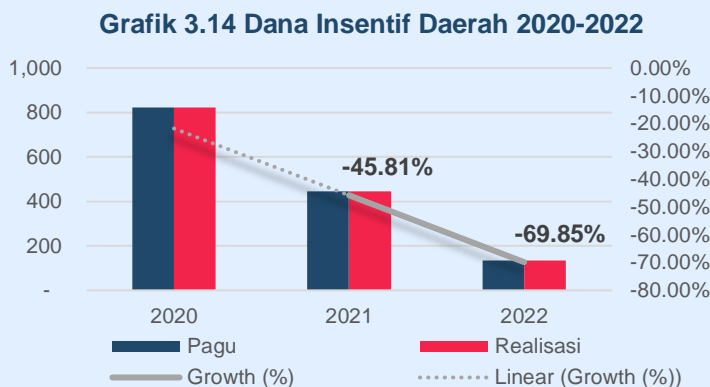
Sumber: Simtrada DJPK (diolah)

Rp183,92 miliar yang disebabkan antara lain penurunan kinerja pemerintah daerah dalam penyampaian laporan sebagai syarat penyaluran DAK non fisik terutama untuk Dana

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, dan Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah. Penyaluran DAK Non Fisik sebagian besar masih disalurkan pada Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus sebesar Rp1.017,23 miliar dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp649,00 miliar.

3.1.3.3 Dana Insentif Daerah (DID), Otonomi Khusus dan Keistimewaan

Dana Insentif Daerah (DID) disalurkan kepada daerah tertentu dengan tujuan



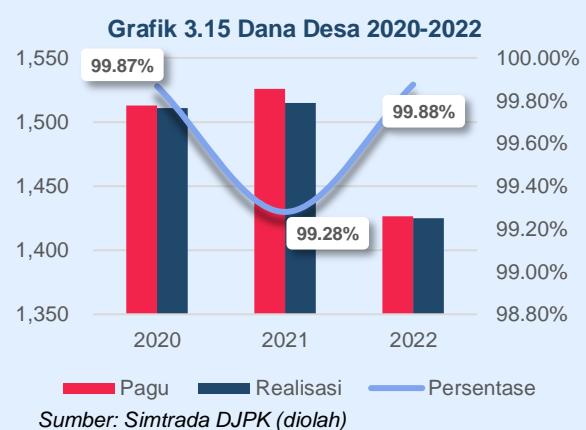
Sumber: Simtrada DJPK (diolah)

pemberian penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan penyaluran DID terlihat pada grafik 3.14. Penyaluran DID di

Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 telah terealisasi sebesar 100% di seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi DID dari tahun 2020-2022 memiliki tren penurunan. Pada tahun 2022 alokasi DID mengalami penurunan yang signifikan sebesar 69,85% dibandingkan pada tahun 2021. Penurunan pagu dan realisasi DID di tahun 2022 disebabkan oleh nilai kinerja dan kontribusi tahun 2021 yang belum optimal.

3.1.3.4 Dana Desa (DD)

Dana Desa disalurkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Dana Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk melakukan pembangunan dan pemerintahan secara lebih mandiri. Adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat mendorong tergalinya potensi yang dimiliki masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut disajikan perkembangan alokasi dan realisasi Dana Desa pada grafik 3.15.



Sumber: Simtrada DJPK (diolah)

Penyaluran Dana Desa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 disalurkan melalui 1.863 desa pada 11 kabupaten sebesar Rp1,42 triliun terkontraksi sebesar 5,98% karena pagu yang berkurang dari tahun 2021. Namun secara capaian kinerja mengalami



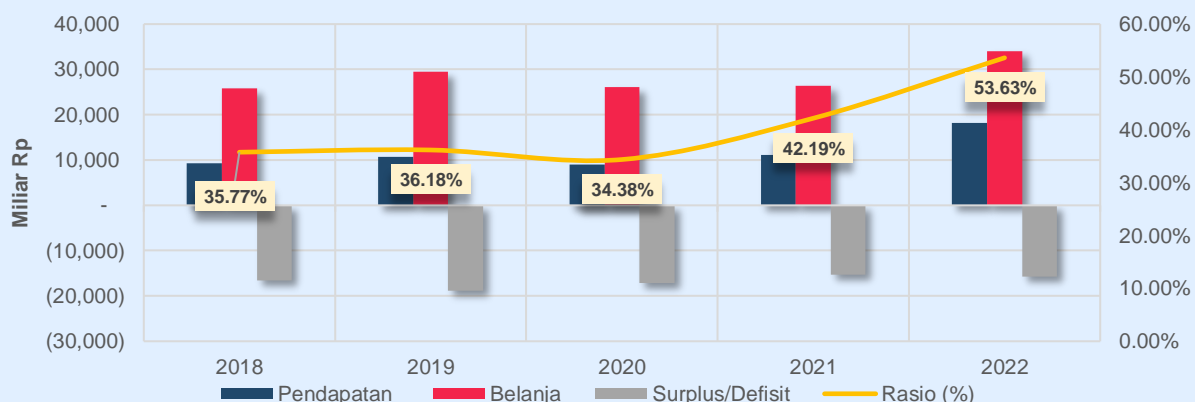
peningkatan 0,56%. Alokasi tertinggi dikelola Kabupaten Banjar sebesar Rp214,03 miliar yang disebabkan jumlah desa yang terbanyak dengan 277 desa. dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 24.359 KPM. Penyaluran Dana Desa disalurkan juga dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Alokasi BLT Dana Desa telah tersalur sebesar Rp574,97 miliar atau 100% dari pagu kepada 159.714 (KPM).

3.1.4 Surplus/Defisit APBN

Struktur anggaran suatu negara dapat berbentuk defisit, surplus maupun berimbang sesuai dengan kebijakan fiskal yang dijalankan oleh negara yang bersangkutan. Sebelum tahun 2000 Indonesia menganut sistem anggaran berimbang, namun kemudian digantikan dengan sistem defisit anggaran dimana pemerintah ingin mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu sehingga belanja pemerintah perlu diperbesar namun dari sisi penerimaan belum mampu mengimbangi sehingga terjadi defisit. Defisit keseimbangan primer yang konsisten turun menuju positif ini memberikan bukti kuat sekaligus sinyal positif bahwa pengelolaan APBN selama ini telah berada pada jalur yang tepat.

Arus kas Pemerintah Pusat di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami defisit selama 5 tahun terakhir. Berikut disajikan perkembangan surplus/defisit APBN sebagaimana grafik 3.16.

Grafik 3.16 Surplus/Defisit APBN 2018-2022



Sumber: OMSPAN (diolah)

Pada tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan mengalami defisit sebesar Rp15,77 triliun atau mengalami peningkatan 3,26% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan defisit ini disebabkan adanya pembayaran dana bagi hasil 2021 yang tertunda dan dibayarkan di tahun 2022. Kondisi defisit anggaran terjadi karena tingginya belanja terutama untuk belanja Dana Transfer Umum yang memegang porsi tertinggi sebesar 62,09% dari total belanja negara. Penerimaan PNBPN Sumber Daya Alam yang dikelola secara langsung di pusat dan jumlahnya cukup signifikan yaitu mencapai Rp12,33 triliun sebagai royalti sehingga diperlukan perbaikan pencatatan atau data spasial yang menjadikan data perhitungan lebih akurat.

3.1.5 Pengelolaan BLU Pusat

Jumlah satuan kerja BLU Pusat di wilayah Kalimantan Selatan sebanyak 2 satker yang terdiri dari RS Bhayangkara Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Universitas Lambung Mangkurat. Satker RS Bhayangkara Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) ditetapkan menjadi BLU sejak tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 203/KMK.05/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sedangkan untuk Universitas Lambung Mangkurat ditetapkan menjadi BLU sejak tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.05/2022 tentang Penetapan Universitas Lambung Mangkurat sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Sebagai satker BLU Pusat, RS Bhayangkara Polda Kalsel dan Universitas Lambung Mangkurat telah mencatatkan realisasi pendapatan dan belanja BLU sebagaimana nampak pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan dan Belanja BLU

Nama BLU	Jenis Belanja	Total Anggaran Belanja yang Dikelola		Realisasi Belanja (juta Rp)	Realisasi Belanja (%)	Target PNBPN (juta Rp)	Realisasi PNBPN (juta Rp)	Realisasi PNBPN (%)	Proporsi PNBPN BLU terhadap Total PNBPN (%)
		RM (juta Rp)	PNBPN (juta Rp)						
Rumkit Bhayangkara Banjarmasin	51	3.701,81	-	3.430,92	92,68	48.757,51	57.078,58	117,07	3,99
	52	2.150,88	55.638,51	52.538,17	90,91				
	53	-	1.614,43	853,46	52,86				
Universitas Lambung Mangkurat	51	180.837,39	-	178.743,84	98,84	290.102,00	267.457,20	92,19	18,69
	52	37.151,94	248.716,17	191.190,08	66,88				
	53	3.710,145	39.081,76	21.258,15	49,68				

Sumber: Laporan tahunan BLU Kanwil DJPB Kalsel (diolah)

Penerimaan kas Rumkit Bhayangkara Banjarmasin dominan berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang mencapai Rp46,46 miliar atau 81,40% dari total penerimaan kas. Di samping itu, sumber penerimaan kas yang cukup dominan ialah Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU dengan nominal mencapai Rp8,79 miliar atau mencapai 15,39% dari total penerimaan kas. Sumber pendapatan lain sisanya berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU dan Pendapatan Lain-lain BLU.

Selanjutnya, penerimaan kas Universitas Lambung Mangkurat yang paling besar berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan mencapai Rp139,84 miliar atau mencapai 52,29% dari total penerimaan kas. Di samping itu, Pendapatan yang berasal dari Biaya Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat mencapai Rp80,72 miliar atau 30,18% dari total penerimaan kas. Pendapatan tersebut merupakan setoran PNBPN sebelum



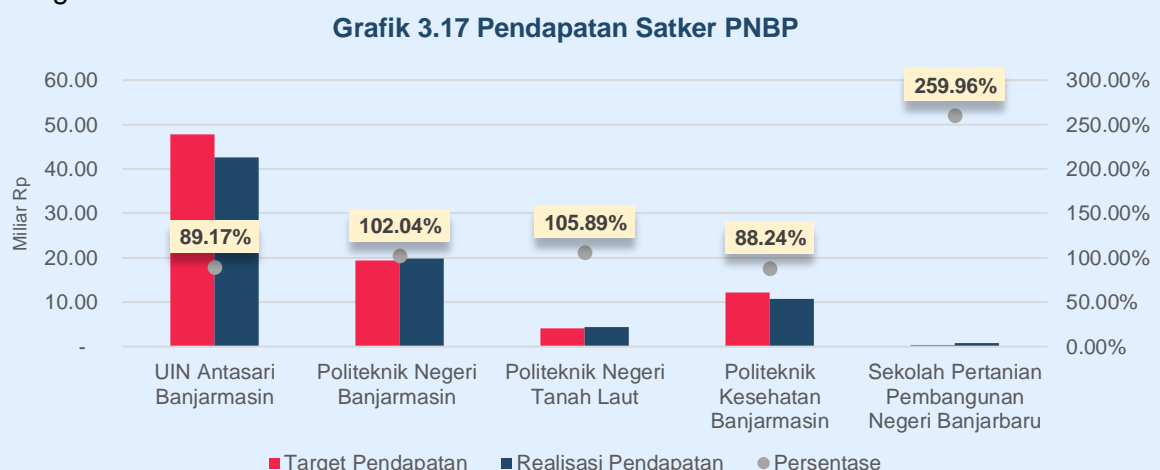
Universitas Lambung Mangkurat beralih status menjadi BLU. Sumber pendapatan lain Universitas Lambung Mangkurat dengan nilai yang besar ialah Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha yang mencapai Rp38,73 miliar. Adapun Standar Operasional Prosedur Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU Universitas Lambung Mangkurat sudah dibuat. Namun demikian, pada SK penunjukan petugas yang bertanggung jawab dalam pengiriman SPM belum ditambahkan tugas sebagai pengirim SP3B-BLU. Total dari pendapatan BLU Rumkit Bhayangkara Banjarmasin dan Universitas Lambung Mangkurat menyumbang PNPB sebesar 20,75% atau Rp324,53 miliar.

Dalam rangka pemanfaatan *idle cash*, Rumkit Bhayangkara Banjarmasin melakukan penempatan *idle cash* BLU dalam instrumen deposito dengan jangka waktu 3 bulan dengan opsi perpanjangan. Pemilihan bank sudah dilaksanakan melalui *beauty contest* dengan peserta sebanyak lima bank sesuai SOP nomor ADM.42.2017 tanggal 05 Juni 2017. Adapun jumlah yang ditempatkan ialah sebesar Rp30,00 miliar. Jumlah tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan rerata belanja BLU pada tahun 2021, sebesar Rp5,77 miliar serta kondisi kas BLU per 15 Maret 2022, sebesar Rp65,14 miliar.

Pada Universitas Lambung Mangkurat, pelaksanaan optimalisasi kas masih belum dilakukan. Hal ini mengingat Universitas Lambung Mangkurat baru saja ditetapkan sebagai Satker BLU di bulan Maret 2022 sehingga masih dalam masa transisi perubahan status Satker dan masih fokus pada penguatan tata kelola sebagai BLU.

3.1.5.1 Profil dan Layanan Satker PNPB

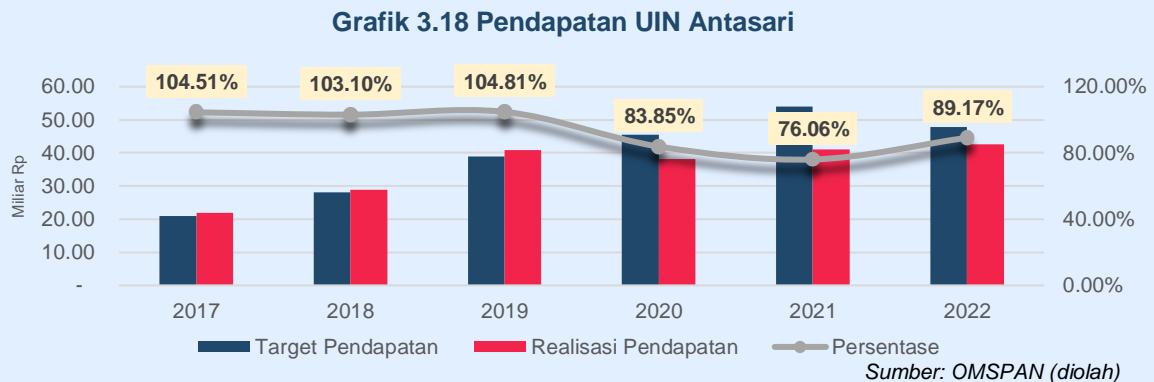
Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 5 satuan kerja yang menghasilkan PNPB pada fungsi pendidikan. Berikut disajikan perkembangan pendapatan PNPB fungsi pendidikan pada grafik 3.17.



Sumber: OMSPAN (diolah)

UIN Antasari Banjarmasin berpotensi menerapkan PPK BLU dengan bidang layanan pendidikan karena memiliki kinerja pendapatan yang sangat baik yang pada tahun 2022 berhasil memiliki pendapatan mencapai Rp42,66 miliar atau mengalami peningkatan

sebesar 3,87% dari tahun 2021. Berikut disajikan perkembangan pendapatan UIN Antasari Banjarmasin sebagaimana pada grafik 3.18.



Kinerja realisasi pendapatan UIN Antasari Banjarmasin pada periode 2017-2019 sangat baik karena mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Akan tetapi, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak akhir triwulan I 2020 menyebabkan penurunan kinerja realisasi pendapatan pada UIN Antasari Banjarmasin hingga tahun 2021. Realisasi pendapatan UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2022 telah mengalami pertumbuhan pendapatan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 3,87% atau meningkat sebesar Rp1,59 miliar. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam kurun 5 tahun terakhir.

UIN Antasari Banjarmasin memiliki layanan utama di bidang pendidikan tinggi. UIN Antasari Banjarmasin memiliki 5 fakultas yang terdiri dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Fakultas Syariah. Semua fakultas tersebut menyediakan program sarjana dengan total 27 program studi. Selain itu, UIN Antasari Banjarmasin juga menyediakan program pascasarjana untuk gelar Magister sebanyak 6 program studi dan gelar Doktor sebanyak 2 program studi.

Berdasarkan *current ratio*, likuiditas UIN Antasari Banjarmasin mengalami peningkatan signifikan sejak 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan UIN Antasari Banjarmasin dalam membayar kewajiban jangka pendek atau yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun makin baik setiap tahunnya sebagaimana nampak pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Current Ratio UIN Antasari

Dalam Rupiah

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Aset Lancar	25.368.900	14.308.100	35.945.925	27.845.700	49.842.100
Kewajiban Jangka Pendek	99.710.419	7.881.572	7.881.572	-	-
Current Rasio	0,25	1,82	4,56	-	-

Sumber: e-rekon LK Audited

Current ratio terendah terjadi pada tahun 2017 di mana UIN Antasari Banjarmasin hanya memiliki kemampuan untuk membayar seperempat dari kewajiban jangka



pendeknya. Dengan kata lain, risiko gagal bayar entitas saat itu sangat tinggi apabila dilihat dari sudut pandang bisnis. Sejak tahun 2018, current ratio entitas makin membaik. Di mana pada tahun 2018 likuiditas entitas berada pada level optimal. Entitas memiliki Rp1,82 aset lancar untuk setiap Rp1,00 kewajiban jangka pendek. Namun demikian, nilai current ratio yang sangat tinggi sejak tahun 2019 mengindikasikan bahwa entitas tidak menggunakan asetnya secara efisien dan produktif. Secara substantif UIN Antasari Banjarmasin dapat direkomendasi menjadi BLU.

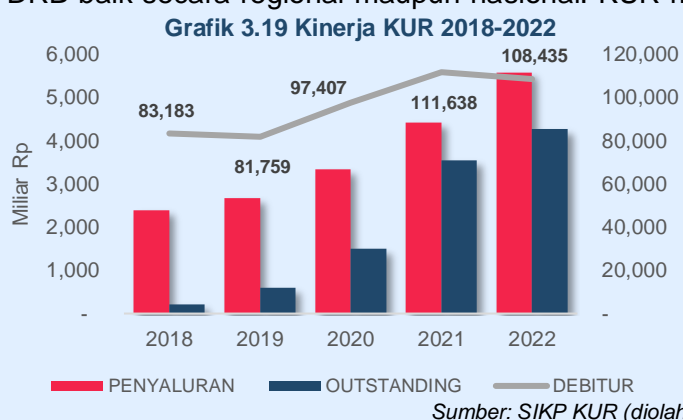
3.1.6 Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat

3.1.6.1 Penerusan Pinjaman

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Sistem Manajemen Investasi Nomor ND-13/PB.4/2022 tanggal 05 Januari 2022 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman Pemda, BUMD, dan Koperasi per 31 Desember 2021, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan tidak melaksanakan rekonsiliasi karena tidak terdapat debitur Pemda, BUMD dan Koperasi di wilayah kerja Kanwil DJPb bersangkutan.

3.1.6.2 Kredit Usaha Rakyat

Pada struktur ekonomi nasional, keberadaan Usaha Mikro dan Kecil memiliki peranan yang strategis terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi pada PDRB baik secara regional maupun nasional. KUR merupakan kredit/pembiayaan modal



kerja kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan. tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Kinerja penyaluran KUR dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan program Pemerintah untuk terus memberdayakan UMKM. Sebagaimana nampak pada grafik 3.19, Penyaluran KUR di Kalimantan Selatan s.d Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 26,12%, sedangkan jumlah debitur mengalami penurunan sebesar 2,87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Melalui survei KUR yang telah dilaksanakan, seluruh responden memberikan masukan agar program KUR dilanjutkan karena sangat membantu dalam permodalan usaha debitur yang didominasi sektor perdagangan sebesar 46,11% terhadap penyaluran KUR di Kalimantan Selatan.

Dalam melihat dampaknya terhadap perekonomian, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan analisis terkait Pengaruh Penyaluran KUR terhadap Tingkat Ketimpangan (*Gini Ratio*) di Kalimantan Selatan. Analisis dilakukan terhadap data penyaluran KUR, data sebaran tenaga kerja, dan *Gini Ratio* dari tahun 2017

s.d. 2022 meliputi 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari analisis tersebut diketahui penyaluran KUR baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan/*gini ratio* di Kalimantan Selatan. Hubungan antara penyaluran KUR dengan tingkat ketimpangan memiliki korelasi negatif dimana setiap 1% peningkatan penyaluran KUR akan menurunkan tingkat ketimpangan sebesar 0,028%. Meskipun pengaruhnya signifikan, kontribusi penyaluran KUR masih relatif rendah, yaitu sebesar 12,79% terhadap tingkat ketimpangan, sehingga 87,21% lainnya adalah pengaruh dari variabel lain di luar analisis yang telah dilakukan.

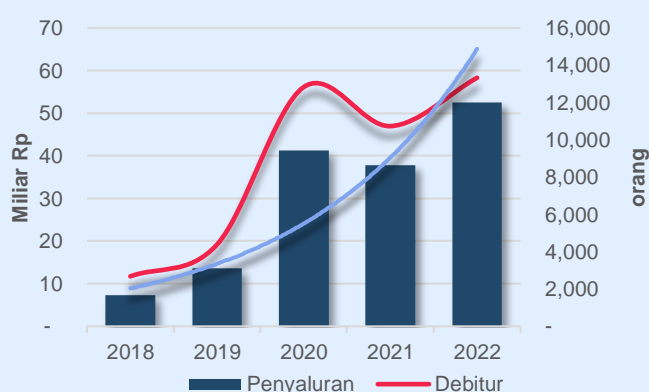
Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui penyaluran KUR memiliki dampak yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran KUR di Kalimantan Selatan perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan plafon pinjaman dan menjaring debitur-debitur baru agar dampaknya dapat secara merata dirasakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka ketimpangan. Selain penyaluran KUR, pemerintah dan berbagai instansi terkait perlu melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM agar dampak dari penyaluran KUR tidak hanya dapat diukur namun dapat dirasakan pula kualitas manfaatnya.

Analisis lainnya yang telah dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan adalah analisis terkait Penyaluran KUR terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Selatan. Berdasarkan analisis tersebut, diketahui bahwa setiap 1% kenaikan penyaluran KUR di Kalimantan Selatan bersama faktor lainnya dapat menurunkan 0,412% penduduk miskin di Kalimantan Selatan. Selain itu, diketahui pula setiap 1% penyaluran KUR di Kalimantan Selatan meskipun kecil namun secara signifikan Bersama faktor lainnya menyumbang secara tidak langsung terhadap PDRB Kalimantan Selatan sebesar 0,335%.

3.1.6.3 Kredit Ultra Mikro

Pembiayaan UMi ini menyasar para pelaku usaha mikro yang tidak bisa dijangkau oleh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebagai *coordinated fund* pembiayaan UMi, pemerintah telah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Saat ini ada 4 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang telah bekerja sama dengan BLU PIP untuk menyalurkan pembiayaan UMi yaitu Bahana Arta Ventura, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, dan PT. Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (REFI). Penyaluran UMi

Grafik 3.20 Kinerja UMi 2018-2021



Sumber: SIKP UMi (diolah)



di Kalimantan Selatan s.d Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 38,77%, dan jumlah debitur juga mengalami peningkatan sebesar 24,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sektor perdagangan mendominasi penyaluran UMi di Kalimantan Selatan sebesar 93,95% atau mencapai Rp49,32 miliar.

3.1.7 Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah

Secara umum pelaksanaan APBN di wilayah Kalimantan Selatan sangat terpengaruh oleh kondisi yang timbul akibat perubahan kebijakan dan regulasi sebagai konsekuensi adanya kenaikan harga komoditas dan risiko eskalasi ketidakpastian global, sehingga APBN sebagai *shock absorber* harus waspada, antisipatif, dan responsif. Beberapa isu strategis yang memicu kendala dan tantangan berkenaan pelaksanaan APBN di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Isu Strategis pada Bidang Penganggaran:
 - a. Penyelesaian revisi *Automatic Adjustment* (AA) yang menyebabkan penundaan penarikan dana sehingga menghambat pelaksanaan anggaran.
 - b. Penurunan tingkat penyerapan dana akibat adanya realokasi pagu atau penambahan pagu pada periode semester II serta penundaan eksekusi kegiatan akibat adanya restrukturisasi pada beberapa Kementerian/Lembaga.
 - c. Rendahnya akurasi dalam penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA.
- 2) Isu Strategis pada Bidang Pengadaan Barang dan Jasa:
 - a. Belum efektifnya implementasi kontrak Pra DIPA.
 - b. Penyelesaian kontrak payung yang membutuhkan waktu lama di tingkat pusat dan hingga akhir tahun belum dapat dituntaskan.
 - c. Keterbatasan jumlah vendor di lapangan menyebabkan kesulitan dalam menentukan penyedia barang atau jasa.
- 3) Isu Strategis pada Bidang Eksekusi Kegiatan:
 - a. Merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjadi kendala pengadaan hewan untuk bantuan pemerintah.
 - b. Kekurangan alokasi dana untuk belanja operasional.
- 4) Isu Strategis pada Bidang Mekanisme Pembayaran:

Belum efektifnya pemanfaatan *Digipay* serta KKP di lapangan, serta implementasi SAKTI *full module* masih ditemui ketidaklancaran pada beberapa satuan kerja.
- 5) *Internal management* di Pemda ikut mempengaruhi turunnya kinerja realisasi DAK Fisik dimana realisasi kontrak terhadap pagu hanya sebesar 90,40%. Beberapa faktor diantaranya berupa pergantian Kepala Daerah, pejabat pengadaan, dan operator SAKTI, serta adanya reorganisasi secara masif di Pemda.

- 6) Optimalisasi koordinasi dan sinergi dengan satker K/L pengelola anggaran belanja. Hal tersebut diperlukan sebagai *early warning system* bagi Satker terkait *deadline* pelaksanaan anggaran, yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, lokakarya atau FGD via daring maupun luring kepada Satker yang memiliki realisasi dan IKPA rendah agar diketahui latar belakang penyebab dari rendahnya realisasi dan IKPA Satker yang bersangkutan.

3.2 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu: “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Lingkungan” dengan empat fokus pembangunan yaitu (1) Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan; (2) Usaha Mikro Kecil dan Menengah; (3) Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata; dan (4) Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Covid-19. Berbagai macam metode dan pendekatan perencanaan dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Capaian pembangunan harus berkontribusi terhadap indikator makro daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkembang dan fokus terhadap sasaran prioritas. Pada RKPD tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 6 (enam) Prioritas Daerah yang di antaranya:

- 1) Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Petanian dan Pariwisata;
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- 3) Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian;
- 4) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
- 5) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana;
- 6) Kalsel sebagai Gerbang dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru.

RKPD yang telah disusun kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan Pemerintah Daerah atau instrumen fiskal yang dipergunakan untuk mencapai sasaran pembangunan di daerah. Kinerja APBD menjadi pendorong tercapainya berbagai target dan sasaran makro ekonomi daerah untuk mewujudkan berbagai rencana dalam rangka mencapai tujuan daerah seperti kemandirian dan kesejahteraan. Pelaksanaan APBD tentunya dihadapkan dengan berbagai tantangan yang terjadi di daerah, misalnya seperti pandemi Covid-19 yang lalu sehingga memerlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk dapat menangani masalah yang dihadapi bersama. Realisasi APBD didasarkan pada Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang di antaranya sebagai berikut:



- 1) Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - a. Optimalisasi pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terukur, rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum;
 - b. Identifikasi dan ekstensifikasi pendapatan di luar pajak daerah;
 - c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan;
 - d. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah.
- 2) Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - a. Kebijakan terkait pemenuhan belanja prioritas;
 - b. Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan;
 - c. Kebijakan terkait belanja Hibah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011).

Kinerja pendapatan APBD lingkup Kalimantan Selatan pada tahun 2022 mencapai Rp29.240,05 miliar, yang tumbuh 26,33% dari periode yang sama tahun 2021 atau senilai Rp6.093,81 miliar. Dalam hal ini, pertumbuhan tertinggi maupun komposisi pendapatan APBD masih didominasi oleh pendapatan transfer. Capaian pendapatan APBD ini tergolong impresif karena telah melebihi target yang ditentukan sebelumnya. Kinerja yang telah baik ini menunjukkan semakin pulihnya perekonomian di Kalimantan Selatan, sehingga PAD yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi masyarakat ikut tumbuh hingga akhir tahun 2022.

Di sisi lain, belanja APBD juga menunjukkan kinerja positif yang telah terealisasi sebesar Rp26.034,46 miliar dan tumbuh sebesar 7,99% atau senilai Rp1.927,13 dari tahun 2021. Belanja APBD di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 didominasi oleh belanja operasi, sedangkan pertumbuhan tertinggi berada pada belanja transfer. Jenis belanja operasi mengalami penurunan 0,35% dari tahun 2021 yang disumbang oleh turunnya belanja hibah pada tahun 2022. Di samping itu, belanja tak terduga juga mengalami penurunan yang signifikan yaitu 60,11% dari tahun 2021 sebagai dampak dari berkurangnya kasus pandemi Covid-19 serta penanganannya sehingga realisasi belanja tak terduga yang utamanya untuk mengatasi pandemi juga ikut turun dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.7 I-Account Realisasi APBD Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2020-2022

dalam Miliar Rp

URAIAN	2020 (Audited)			2021 (Audited)			2022 (Unaudited)			%Growth (2022 - 2021)
	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI	%REAL	
Pendapatan Daerah	23.957,35	23.576,01	98,41%	22.010,04	23.146,24	105,16%	28.868,98	29.240,05	101,29%	26,33%
Pendapatan Asli Daerah	5.580,88	5.097,73	91,34%	5.689,57	6.065,51	106,61%	6.733,63	6.643,46	98,66%	9,53%
Pendapatan Transfer	17.725,70	17.520,60	98,84%	15.844,32	16.458,57	103,88%	21.534,86	22.451,64	104,26%	36,41%
Transfer Pemerintah Pusat	16.696,11	17.518,95	100,82%	15.844,32	16.456,92	103,87%	19.760,92	20.284,70	102,65%	23,26%
Transfer Antar Daerah	1.029,59	1,65	0,16%	-	1,65	0,00%	1.773,93	2.166,94	122,15%	131230%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	650,77	957,68	147,16%	476,15	622,16	130,66%	600,49	144,95	24,14%	-76,70%
Belanja Daerah	27.412,83	23.857,67	87,03%	25.040,96	24.107,33	96,27%	31.281,27	26.178,46	83,69%	8,59%
Belanja Operasi	17.691,13	16.416,42	92,79%	17.234,49	17.008,73	98,69%	20.392,36	16.948,50	83,11%	-0,35%
Belanja Pegawai	9.959,03	8.092,09	81,25%	9.088,63	8.543,18	94,00%	9.781,04	8.686,01	88,80%	1,67%
Belanja Barang dan Jasa	6.176,19	6.564,49	106,29%	7.376,63	7.207,83	97,71%	9.521,89	7.357,85	77,27%	2,08%
Belanja Bunga	11,66	6,12	52,49%	25,05	9,24	36,88%	24,34	16,66	68,46%	80,34%
Belanja Subsidi	-	-	0,00%	-	-	0,00%	5,01	1,06	21,25%	0,00%
Belanja Hibah	1.438,57	1.645,88	114,41%	603,21	1.132,19	187,69%	878,99	720,80	82,00%	-36,34%
Belanja Bantuan Sosial	105,68	107,84	102,04%	140,97	116,28	82,49%	181,09	166,12	91,73%	42,86%
Belanja Modal	4.530,47	4.126,63	91,09%	4.171,29	4.400,78	105,50%	6.053,55	4.615,86	76,25%	4,89%
Belanja Modal	4.530,47	4.126,63	91,09%	4.171,29	4.400,78	105,50%	6.053,55	4.615,86	76,25%	4,89%
Belanja Tidak Terduga	1.303,18	955,72	73,34%	203,83	267,80	131,39%	212,07	106,83	50,37%	-60,11%
Belanja Tidak Terduga	1.303,18	955,72	73,34%	203,83	267,80	131,39%	212,07	106,83	50,37%	-60,11%
Belanja Transfer	3.888,05	2.358,90	60,67%	3.431,35	2.430,03	70,82%	4.623,29	4.507,27	97,49%	85,48%
Belanja Bagi Hasil	1.418,91	35,34	2,49%	1.256,42	46,51	3,70%	2.141,90	2.132,41	99,56%	4484,62%
Belanja Bantuan Keuangan	2.469,14	2.323,56	94,10%	2.174,93	2.383,51	109,59%	2.481,39	2.374,86	95,71%	-0,36%
SURPLUS/DEFISIT	(3.455,48)	(281,66)	8,15%	(3.030,92)	(961,09)	31,71%	(2.412,29)	3.061,59	-126,92%	-418,56%
PEMBIAYAAN	2.641,23	3.882,51	147,00%	3.266,88	3.629,49	1,11	2.459,74	1.474,85	59,96%	-59,36%
Penerimaan Pembiayaan	2.725,85	3.945,27	144,74%	3.364,22	3.749,54	1,11	3.006,46	1.886,44	62,75%	-49,69%
Pengeluaran Pembiayaan	84,62	62,76	74,17%	97,34	120,06	1,23	546,73	411,59	75,28%	242,83%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SikPA)	(814,25)	3.600,85	-442,23%	235,96	2.668,40	1130,88%	47,45	4.536,43	9560,86%	70,01%

Sumber: LRA Pemda (diolah)

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam hal ini, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Pemerintah lingkup Kalimantan pada tahun 2022 memperoleh capaian sebesar Rp29,24 triliun yang menunjukkan adanya kinerja pendapatan yang tumbuh dibandingkan tahun 2021.

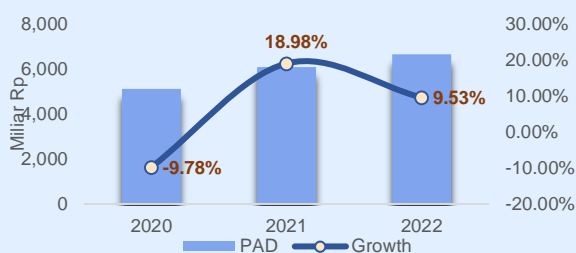
3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD yang diterima Pemerintah lingkup Kalimantan Selatan (Kalsel) pada tahun 2022 ini adalah sebesar Rp6,64 triliun dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 22,72%, sehingga belum menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhannya. Capaian tersebut cenderung menurun 3,48% poin dibandingkan dengan tahun 2021. Walaupun besaran PAD pada tahun 2022 ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun kontribusi



dari PAD terhadap pendapatan mengalami penurunan karena di sisi lain realisasi pendapatan transfer juga meningkat lebih pesat dari tahun sebelumnya. Komponen PAD yang memiliki kontribusi terbesar pada total pendapatan APBD di antaranya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 6,97%, Pendapatan BLUD sebesar 4,97%, dan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) sebesar 2,82%.

Grafik 3.21 Perkembangan PAD 2020 – 2022



Sumber: LRA Pemda (diolah)

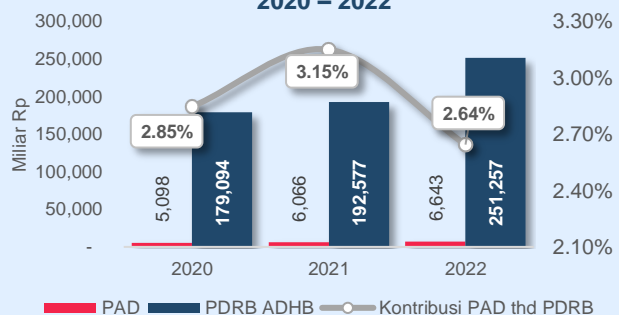
Realisasi PAD tahun 2022 meningkat senilai Rp577,95 miliar dibanding tahun 2021, capaian ini disebabkan dari meningkatnya pajak daerah yaitu PBBKB yang naik sebesar Rp899,27 miliar dari tahun 2021 dan PKB yang naik sebesar Rp54,87 miliar dari tahun 2021. Salah satu penyebab kenaikan ini adalah adanya kebijakan relaksasi penunggakan PKB yang diiringi banyaknya kepemilikan kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan, selain itu hal ini juga menunjukkan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah.

Rasio PAD terhadap Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) pada tahun 2022 yang ditunjukkan grafik 3.22 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya walaupun di sisi lain kinerja PAD tahun 2022 mengalami peningkatan. Capaian rasio ini menggambarkan bahwa realisasi PAD tidak begitu berpengaruh terhadap besaran PDRB pada periode tersebut di Kalimantan Selatan.

Hal ini disebabkan kenaikan dari PAD sebesar 9,53% dari tahun 2021 tidak sebanding dengan kenaikan pada PDRB sebesar 30,47% yang tergolong cukup signifikan, sehingga menyebabkan kontribusi PAD terhadap PDRB mengalami penurunan dari periode sebelumnya.

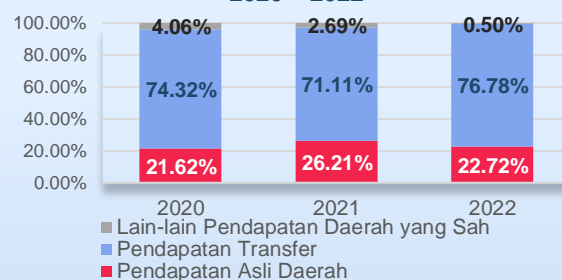
Berdasarkan proporsinya, PAD masih memiliki kontribusi lebih kecil dari pendapatan transfer seperti yang ditampilkan pada grafik 3.23. Pada tahun 2022 ini, PAD mengalami penurunan proporsi terhadap total pendapatan daerah yang mencerminkan rasio kemandirian keuangan daerah. Adapun Pemerintah Daerah yang memiliki kategori sangat baik rasio kemandirian keuangan

Grafik 3.22 Kontribusi PAD terhadap PDRB 2020 – 2022



Sumber: LRA Pemda dan BPS Prov. Kalsel (diolah)

Grafik 3.23 Komposisi Pendapatan Daerah 2020 – 2022



Sumber: LRA Pemda (diolah)

daerahnya (rasio lebih dari 50%), adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu penyebabnya adalah PAD pada Provinsi Kalimantan Selatan yang bernilai besar karena ditopang oleh jenis pajak yang memiliki volume dan nilai transaksi besar yang berada dalam wewenang provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, Pemprov Kalimantan Selatan merupakan pusat aktivitas perekonomian di Kalsel. Demikian juga dengan Pemkot Banjarmasin dan Pemkot Banjarbaru memperoleh kategori sedang yang merupakan daerah pusat aktivitas perekonomian di Kalimantan Selatan.

Dalam mengupayakan kemandirian fiskal daerah di Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah terus menggali potensi penerimaan yang memungkinkan untuk menambah kemampuan fiskal di Kalimantan Selatan agar tidak bergantung pada pendanaan transfer oleh Pemerintah Pusat. Potensi yang digali di antaranya potensi perpajakan seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan lainnya. Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan kebijakan berupa pemberian pengurangan/diskon pokok, pembebasan sanksi administrasi berupa denda PKB, dan pembebasan pokok, serta sanksi administrasi, berupa denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya.

3.2.1.2 Pendapatan Transfer

Grafik 3.24 Perkembangan Pendapatan Transfer 2020 – 2022



Sumber: LRA Pemda (diolah)

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Hingga akhir tahun 2022, realisasi pendapatan transfer yang diterima Pemerintah lingkup Kalimantan Selatan mencapai Rp22,45 triliun yang telah mencapai 104,26% dari pagu yang telah ditetapkan. Kinerja pendapatan transfer pada

tahun 2022 ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu mengalami kenaikan senilai Rp5,99 triliun. Capaian pendapatan transfer yang melonjak naik pada tahun 2022 disebabkan adanya penyaluran Kurang Bayar DBH SDA Mineral dan Batubara Tahun 2021 dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH berdasarkan KMK Nomor 37/KM.7/2022 pada TA 2022 di bulan Oktober 2022 dan PMK 127/PMK.07/2022 di bulan Desember 2022 yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah. Komponen pendapatan transfer yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan APBD yaitu Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) sebesar 25,89%, Dana Alokasi Umum sebesar 25,06%, dan Dana Alokasi Khusus sebesar 8,86%.



Pada capaian ini, pendapatan transfer masih mendominasi pendapatan daerah di Kalimantan Selatan yang mencapai 76,78% dari total pendapatan daerah. Seiring dengan kontribusinya yang besar terhadap pendapatan transfer, komponen transfer pemerintah pusat menjadi penyumbang terbesar pada total pendapatan daerah di Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan masih sangat bergantung dengan pendapatan transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, sehingga kemandirian fiskal daerah masih belum tercapai dengan maksimal.

3.2.1.3 Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS)

Grafik 3.25 LLPDyS 2020 – 2022



Sumber: LRA Pemda (diolah)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) terdiri dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya. Komponen pendapatan ini pada tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2022, LLPDyS telah mencapai Rp145 miliar dengan didominasi oleh pendapatan hibah

yang mencapai Rp133 miliar yang kemudian disusul oleh pendapatan lainnya sebesar Rp11,75 miliar. Capaian LLPDyS menurun Rp477,22 miliar dibandingkan tahun 2021.

Pendapatan hibah pada tahun 2022 disumbang dari hibah yang berasal dari kelompok masyarakat/perorangan mencapai Rp61,2 miliar, dari badan/Lembaga/ organisasi swasta dalam negeri sebesar Rp46,8 miliar, dari pemerintah pusat sebesar Rp25,2 miliar. Berdasarkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah, besaran dari LLPDyS ini tidak begitu signifikan, dapat terlihat pada kontribusinya yang hanya mencapai 0,50% terhadap pendapatan daerah pada tahun 2022 ini. Namun demikian, pendapatan daerah di Kalimantan Selatan terus mengalami pertumbuhan di tiap tahunnya.

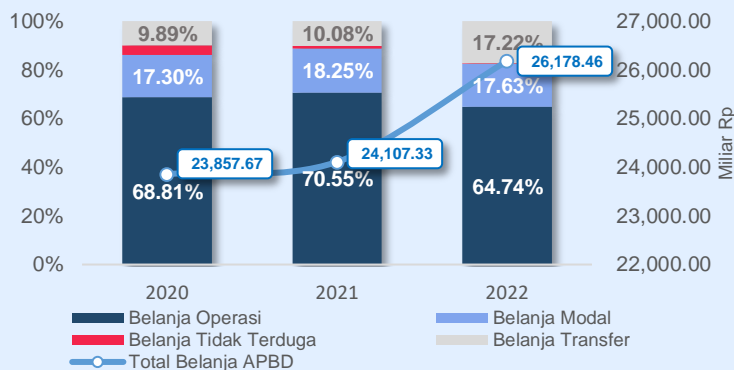
3.2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sampai dengan periode 31 Desember 2022, capaian realisasi belanja APBD lingkup Kalimantan Selatan masih belum maksimal yaitu hanya sebesar Rp26,18 triliun atau 83,69% dari pagu yang telah ditetapkan. Kinerja belanja APBD

ini dari sisi jumlah realisasi meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 8,59% atau senilai Rp2,07 triliun, namun jika dilihat dari sisi capaian terhadap pagu, realisasi belanja daerah hingga akhir tahun 2022 ini masih tergolong rendah.

Belanja APBD di Kalimantan Selatan masih didominasi oleh belanja operasi dari tahun ke tahun sebagaimana yang dapat dilihat pada grafik 3.26.

Grafik 3.26 Proporsi Jenis Belanja terhadap Belanja APBD



Sumber: LRA Pemda (diolah)

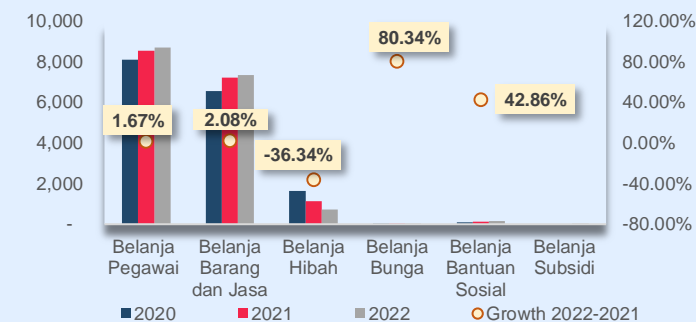
Berdasarkan proporsinya terhadap total belanja APBD, belanja operasi mengalami penurunan proporsi dari tahun 2021. Penurunan proporsi pada belanja operasi ini menunjukkan perkembangan yang relatif baik karena belanja yang tidak diperuntukkan langsung kepada pembangunan daerah berkurang

komposisinya terhadap total belanja APBD, sehingga anggaran dapat direalisasikan pada belanja lain yang dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Penurunan yang sama juga terjadi pada belanja tidak terduga yang turun dari tahun ke tahun seiring dengan pemulihan pandemi Covid-19.

3.2.2.1 Berdasarkan Jenis Belanja

3.2.2.1.1 Belanja Operasi

Grafik 3.27 Belanja Operasi 2020 – 2022



Sumber: LRA Pemda (diolah)

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Jenis belanja ini meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Pada tahun 2022, belanja operasi mengalami kontraksi sebesar 0,35% atau senilai Rp60,22 miliar dari tahun 2021, namun demikian realisasi pada tahun 2022 ini masih lebih tinggi dari tahun 2020. Penurunan ini utamanya disumbangkan oleh belanja hibah yang mengalami kontraksi sebesar Rp411,39 miliar. Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa di tiap tahunnya mengalami tren peningkatan seperti yang ditunjukkan grafik 3.27.

Belanja operasi pada tahun 2022 masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sehingga belanja daerah yang direalisasikan masih belum difokuskan



untuk pembangunan daerah secara langsung. Sampai dengan akhir tahun 2022, belanja pegawai serta belanja barang dan jasa masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp142,82 miliar dan Rp150,02 miliar dari tahun 2021. Di sisi lain, pada tahun 2022 belanja bantuan sosial juga mengalami kenaikan hingga 42,86% dari tahun 2021. Hal ini seiring dengan disalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di Kalimantan Selatan dalam rangka penanganan dampak inflasi yang disebabkan oleh pengalihan subsidi BBM.

3.2.2.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jika dilihat pada tiga tahun belakangan, capaian belanja modal semakin meningkat di tiap tahunnya.

Kinerja belanja modal pada tahun

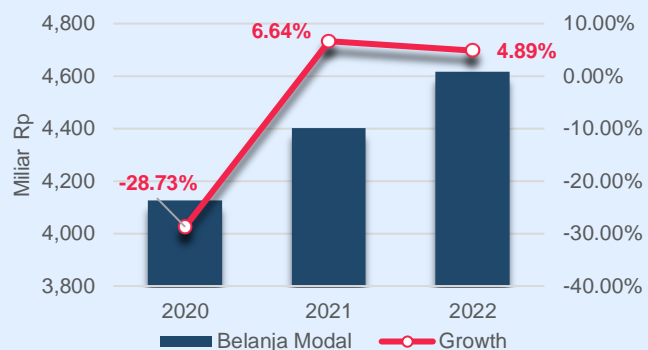
2022 mengalami kenaikan sebesar Rp215,09 miliar dari tahun 2021. Di balik capaian pertumbuhan ini, belanja modal hingga akhir tahun 2022 hanya mencapai 76,25% dari pagu yang ditetapkan. Penyerapan yang kurang optimal ini terjadi karena: (1) Kelemahan pada rencana atas tahapan pelaksanaan kegiatan; (2) Proses pelaksanaan lelang (gagal lelang, jangka waktu yang pendek); (3) Peran BUD yang tidak menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi yang optimal, sehingga realisasi belanja APBD tidak terkendali dengan baik; (4) Adanya pembatasan penggunaan barang impor terkait kandungan TKDN untuk PBJ, sementara barang yang dibutuhkan belum tersedia di *e-catalog*.

3.2.2.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan

pemerintah pusat/daerah. Realisasi belanja tidak terduga pada tiga tahun terakhir kian menunjukkan penurunan seiring dengan pemulihan pandemi Covid-19 sebagaimana dapat

**Grafik 3.28 Perkembangan Belanja Modal
2020 - 2022**



Sumber: LRA Pemda (diolah)

**Grafik 3.29 Perkembangan Belanja Tidak Terduga
2020 - 2022**



Sumber: LRA Pemda (diolah)

dilihat pada grafik 3.28. Pada tahun 2022, realisasi belanja tidak terduga telah mencapai Rp106,83 miliar atau turun 60,11% dari tahun 2021. Penurunan capaian ini merupakan dampak dari melandainya kasus Covid-19 dibandingkan kasus pada tahun 2021 yang menyebabkan kinerja realisasi belanja tidak terduga di Kalimantan Selatan ikut turun. Belanja tidak terduga pada tahun 2022 salah satunya dipergunakan untuk menekan tingkat inflasi di Kalimantan Selatan.

3.2.2.1.4 Belanja Transfer

Grafik 3.30 Perkembangan Belanja Transfer 2020 - 2022



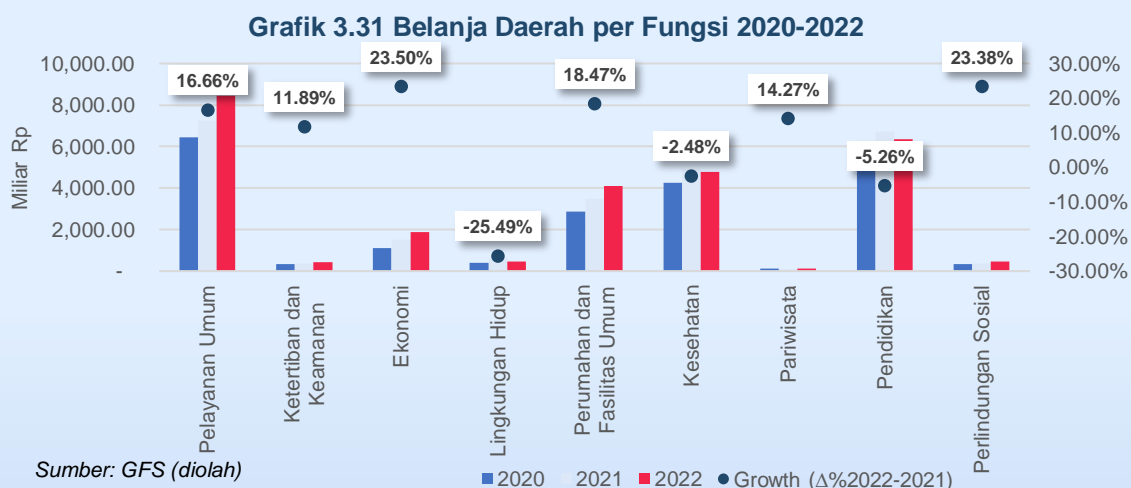
Sumber: LRA Pemda (diolah)

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

Belanja transfer menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 – 2022, terutama pada realisasi belanja bagi hasil. Pada tahun 2022, realisasi belanja transfer mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp2.077,24 miliar seperti yang ditunjukkan pada grafik 3.30. Peningkatan belanja transfer ini disebabkan karena adanya penyaluran Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara Tahun 2021 seperti yang diterima pada pendapatan transfer. Hal ini menyebabkan capaian realisasi dana bagi hasil mengalami pertumbuhan hingga 4.484,62% dibandingkan tahun 2021.

3.2.2.2 Berdasarkan Fungsi

Pelaksanaan belanja daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dapat diklasifikasikan menjadi sembilan fungsi. Pada tahun 2022, hampir seluruh fungsi mengalami kenaikan seperti yang ditampilkan pada grafik 3.31 berikut.





Kenaikan tertinggi pada belanja per fungsi di Kalimantan Selatan adalah belanja fungsi ekonomi yang dipergunakan untuk menggerakkan perekonomian di Kalimantan Selatan terutama pasca pandemi Covid-19, misalnya terkait ketenagakerjaan, UMKM, pertanian, perdagangan dan urusan lain yang berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian secara langsung. Di sisi yang sama, belanja perlindungan sosial juga mengalami kenaikan, salah satunya dikarenakan untuk memberikan bantalan sosial kepada masyarakat di Kalimantan Selatan akibat dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi dan inflasi yang melonjak naik sehingga memberatkan daya beli masyarakat.

Berdasarkan komposisi realisasi belanja APBD per fungsi terhadap total belanja APBD masing-masing Pemerintah Daerah sampai dengan akhir tahun 2022, diketahui bahwa prioritas belanja APBD secara keseluruhan berada pada fungsi Pelayanan Umum, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Fasilitas Umum, dan Ekonomi. Fungsi Pelayanan Umum memperoleh capaian realisasi tertinggi dari semua jenis fungsi, yaitu sebesar Rp8.459,80 miliar atau 31,32% dari total belanja per fungsi lingkup Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan, selanjutnya disusul oleh belanja fungsi Pendidikan sebesar Rp6.364,33 miliar atau 23,56% dari total belanja per fungsi APBD, dan fungsi Kesehatan sebesar Rp4.765,35 miliar atau 17,64% dari total belanja APBD.

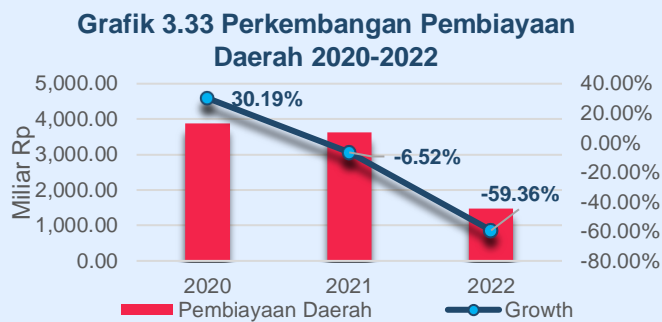
3.2.3 Surplus/ Defisit APBD



Sumber: LRA Pemda (diolah)

Hingga akhir tahun 2022, APBD agregat di Kalimantan Selatan adalah surplus sebesar Rp3.061,59 miliar. Besar surplus ini mengalami penurunan dari tahun 2021, yaitu senilai Rp4.022,67 miliar. Surplus tertinggi terjadi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hingga sebesar Rp734,45 miliar. Keadaan surplus pada tahun 2022 ini jauh berbeda dari dua tahun sebelumnya yang mengalami defisit. Surplus yang menandakan lebihnya sisi pendapatan daripada belanja mengindikasikan belum maksimalnya penyerapan belanja daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah. Dalam keadaan ini, ketika sudah tersedianya pembiayaan untuk menutupi defisit yang diperkirakan dan kemudian ditambah dengan surplus yang ada maka akan menyebabkan terbentuknya *idle cash* yang tidak digunakan secara optimal dalam percepatan membangun daerah di Kalimantan Selatan.

3.2.4 Pembiayaan Daerah

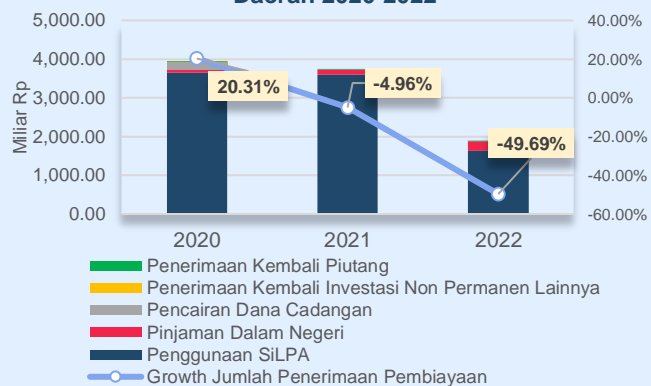


Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pada tahun 2022, pembiayaan daerah secara agregat di Kalimantan Selatan mencapai Rp1.474,85 miliar dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.886,44 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp411,59 miliar.

Penurunan pembiayaan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.154 miliar dari tahun 2021. Hal ini disebabkan turunnya penerimaan pembiayaan yang diterima Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan seperti yang terlihat pada grafik 3.32. Penerimaan pembiayaan APBD pada tahun 2022 secara agregat di Kalimantan Selatan dalam mendukung kebijakan fiskal daerah menurun sebesar 49,69% dari tahun 2021.

Kontributor terbesar dalam penerimaan pembiayaan daerah selama tahun 2020 hingga 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan adalah penggunaan SILPA tahun anggaran. Di sisi lain, dalam pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2022 ini didominasi oleh penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah yang tentunya diharapkan akan

Grafik 3.34 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah 2020-2022



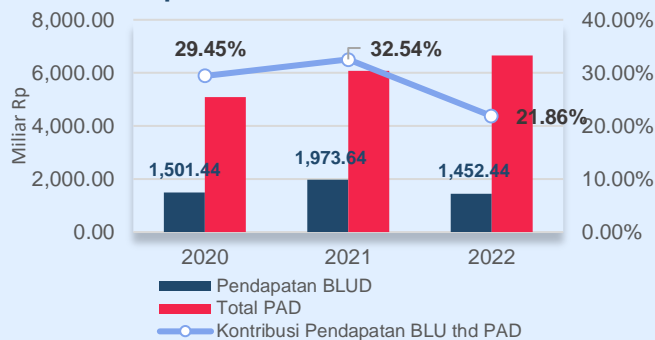
memberikan manfaat walaupun tidak secara langsung berdampak pada Kalimantan Selatan.

3.2.5 Perkembangan BLU Daerah

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 September 2022, jumlah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebanyak 92 unit kerja BLUD, yang didominasi oleh bidang kesehatan, yaitu sebesar 88%, yang terdiri dari 1 balai kesehatan, 18 rumah sakit dan 62 puskesmas. Selain itu, terdapat 7 BLUD di bidang penelitian, 2 BLUD di bidang pengelola kawasan dan 2 BLUD di bidang lainnya. Pada triwulan IV tahun 2022 ini pula, telah ditetapkan 9 SMK di Kalimantan Selatan yang menjadi BLUD sehingga formasi 92 unit kerja BLUD tersebut akan ditambah dengan 9 BLUD baru dari bidang pendidikan.



Grafik 3.35 Kontribusi Pendapatan BLUD terhadap Total PAD di Kalimantan Selatan

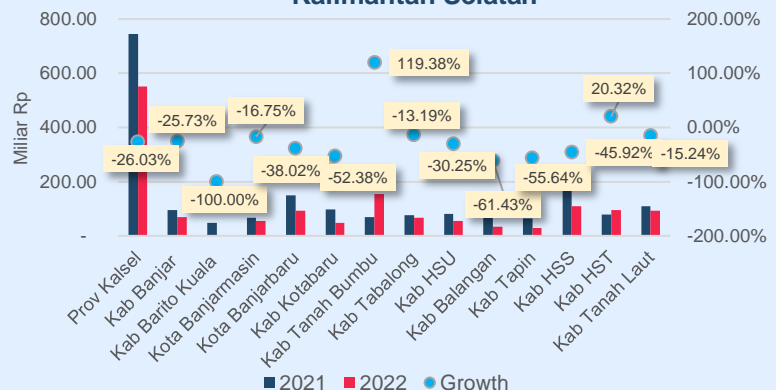


Sumber: LRA Pemda (diolah)

menyebabkan kontribusi pendapatan BLUD terhadap total PAD menjadi lebih rendah dari tahun 2021. Walaupun demikian, capaian pendapatan BLUD yang sebesar 21,86% dari total PAD merupakan salah satu komponen PAD yang menyumbang andil terbesar setelah pajak daerah yaitu 69,52% terhadap total PAD. Berdasarkan kontribusi pendapatan BLUD tersebut yang diiringi semakin bertambahnya jumlah BLUD di Kalimantan Selatan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan BLUD berpotensi untuk didorong menjadi lebih mandiri.

Pendapatan BLUD pada tahun 2022 ini didominasi oleh pendapatan BLUD dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Rp745,68 miliar), Pemerintah Kabupaten Hulu Tanah Bumbu, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan grafik 3.36 berikut, diketahui bahwa hampir seluruh

Grafik 3.36 Perkembangan Pendapatan BLUD di Kalimantan Selatan



Sumber: LRA Pemda (diolah)

BLUD pada masing-masing Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan mengalami penurunan, terkecuali BLUD pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tumbuh 119,38% dari tahun 2021.

Berdasarkan hasil survei dan asistensi terhadap BLUD yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, diketahui kendala/permasalahan dalam pengelolaan keuangan BLUD di Kalimantan Selatan yang di antaranya sebagai berikut:

1. Penetapan tarif terkendala proses penetapan Pergub/Perwali/Perbup yang cukup lama, sehingga tarif yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi terkini.
2. Beberapa Peraturan daerah tentang pelaksanaan fleksibilitas BLUD belum disahkan, sehingga menghambat operasional BLUD.

3. Unit kerja BLUD belum dapat mempergunakan dana SiLPA karena belum adanya ketentuan yang mengatur penggunaan SiLPA dari Kepala Daerah.
4. Belum meratanya sosialisasi aplikasi *e-BLUD*, sehingga belum semua BLUD menggunakan aplikasi tersebut untuk penatausahaan transaksi Keuangan.
5. Pelaporan akuntansi BLUD belum bisa dimasukkan ke dalam sistem aplikasi SIPD.
6. Kurangnya SDM secara kualitatif dan kuantitatif dalam pengelolaan keuangan BLUD.

3.2.6 Isu Strategis Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan APBD di Kalimantan Selatan mengalami berbagai tantangan yang kemudian mempengaruhi pencapaian Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan. Beberapa isu strategis yang menjadi permasalahan dan tantangan dalam tata kelola dan pencapaian belanja daerah serta upaya akselerasi belanja APBD di Kalimantan Selatan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian fiskal yang masih belum optimal dalam penyediaan sumber pendanaan pembangunan, sehingga diperlukan langkah-langkah inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan digitalisasi dan peluang dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
2. Proporsi penyerapan anggaran yang kurang optimal yaitu penyerapan yang rendah di awal dan menumpuk di akhir tahun anggaran. Kondisi ini kemudian menyebabkan diperlukannya *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan belanja APBD sebagai *early warning system* melalui penguatan peran Bendahara Umum Daerah (BUD) agar tidak hanya menjadi kasir, namun juga dapat mengupayakan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran daerah melalui perannya.
3. Masih tingginya proporsi belanja operasional (penunjang) sehingga belum dapat mengoptimalkan percepatan pembangunan. Dalam hal ini, diperlukan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam operasional, sehingga dapat mengurangi pekerjaan yang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh TI.
4. Belum optimalnya sinkronisasi anggaran daerah dan sasaran pembangunan nasional, sehingga diperlukan peningkatan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga di daerah serta mengefektifkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
5. Belum optimalnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan kajian efektivitas dan efisiensi sebagai dasar dalam ketepatan sasaran alokasi belanja.

3.3 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Sampai dengan akhir tahun 2022, pelaksanaan anggaran konsolidasian menunjukkan hasil yang cukup baik karena mampu tumbuh dari periode yang sama pada tahun 2021, baik

dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.8 yang menunjukkan pelaksanaan anggaran konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah di Kalimantan Selatan pada tahun 2022.

Tabel 3.8. LRA Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020-2022

dalam Miliar Rp

Uraian	2020 Realisasi (Audited)	2021 Realisasi (Audited)	2022 Realisasi (Preliminary)	Growth (Δ%2022-2021)
Pendapatan Konsolidasi	14.856,69	17.832,05	26.078,46	46,24%
Pendapatan Perpajakan	10.713,57	13.358,66	20.158,70	50,90%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.361,99	3.851,22	5.772,50	49,89%
Hibah	781,12	622,16	147,25	-76,33%
Belanja dan Transfer Pemerintah	32.267,20	34.062,53	40.437,70	18,72%
Belanja Pemerintah	29.425,05	30.973,60	30.598,80	-1,21%
Belanja Transfer	2.842,14	3.088,93	9.838,89	218,52%
Surplus/Defisit	(17.410,51)	(16.230,49)	(14.359,24)	-11,53%
Pembiayaan	3.882,52	3.629,49	2.070,74	-42,95%
Penerimaan Pembiayaan	3.945,27	3.749,54	2.497,34	-33,40%
Pengeluaran Pembiayaan	62,76	120,06	426,59	255,33%
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(13.527,99)	(12.601,00)	(12.288,50)	-2,48%

Sumber: GFS (diolah)

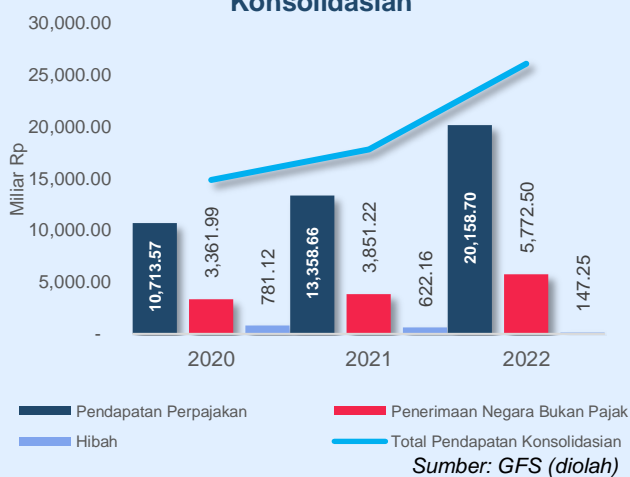
Di sisi lain, kenaikan pada capaian belanja konsolidasian dari tahun sebelumnya menandai terjadinya peningkatan pada salah satu komponen pengeluaran pembentuk PDRB di Kalimantan Selatan, yaitu komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Oleh karena itu, pertumbuhan yang cukup baik ini diharapkan dapat menjadi salah satu pemacu tumbuhnya perekonomian di Kalimantan Selatan.

3.3.1 Pendapatan Konsolidasian

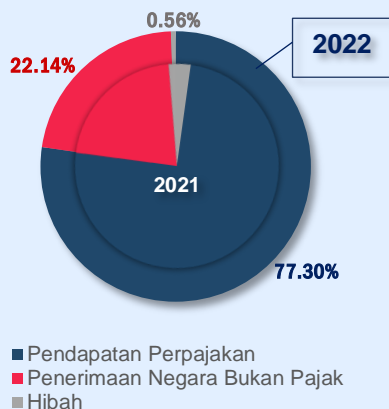
Pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sebagaimana dapat dilihat pada grafik 3.35. Pendapatan perpajakan menjadi komponen yang memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 50,90% dari tahun 2021 atau senilai Rp6.800,04 miliar. Capaian yang baik pada sektor perpajakan seiring dengan pulihnya pandemi yang kemudian mendorong naiknya aktivitas masyarakat dan

berdampak pada naiknya pendapatan dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Jika dilihat berdasarkan kontribusinya pendapatan perpajakan juga turut menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan pemerintah di Kalimantan Selatan dengan kontribusinya yang terus meningkat dari tahun 2020-2022 seperti yang ditunjukkan grafik 3.37.

Grafik 3.37 Perkembangan Pendapatan Konsolidasian



Grafik 3.38 Kontribusi Komponen Pendapatan Konsolidasian

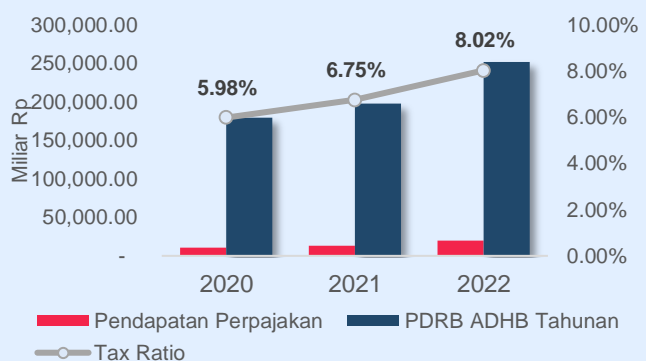


Sumber: GFS (diolah)

Komponen pendapatan konsolidasian berupa PNBP juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.921,28 miliar pada tahun 2022 yang menyebabkan naiknya kontribusi PNBP terhadap total pendapatan konsolidasian. Di sisi lain, pendapatan dari hibah mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp474,91 miliar atau turun 76,33% dibandingkan pendapatan hibah pada tahun 2021 yang kemudian menurunkan kontribusinya terhadap pendapatan konsolidasian.

Dalam rangka mengukur kinerja penerimaan pajak di Kalimantan Selatan, berikut *tax ratio* berdasarkan pendapatan perpajakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah di Kalimantan Selatan dan PDRB Kalimantan Selatan sebagaimana dapat dilihat pada grafik 3.39. Kinerja penerimaan perpajakan di Kalimantan Selatan menunjukkan kenaikan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Hal ini juga diiringi dengan *tax ratio* secara regional yang juga meningkat dari tahun 2021 hingga 2022. Kontributor utama pada besaran *tax ratio* pada tahun 2022 ini berasal dari pendapatan pajak Pemerintah Pusat yang mencapai Rp15.539,10 miliar, sedangkan pajak Pemerintah Daerah mencapai Rp4.619,59 miliar.

Grafik 3.39 Tax Ratio Kalimantan Selatan

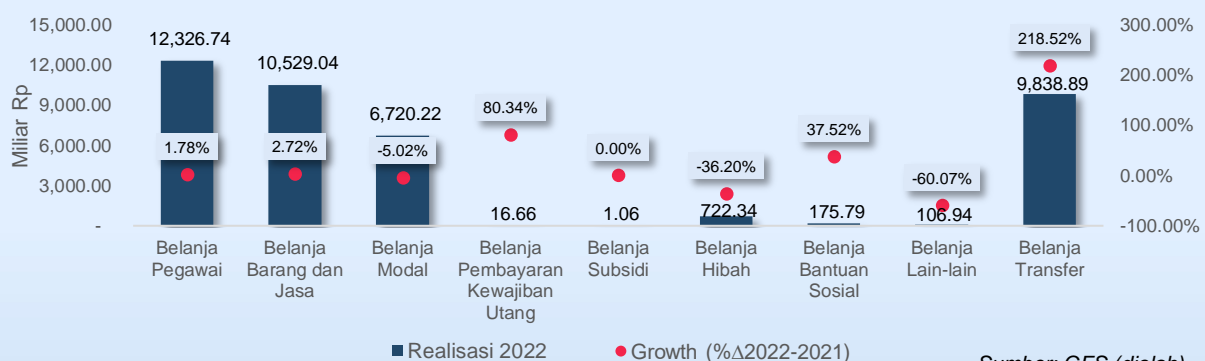


Sumber: GFS dan BPS Prov Kalsel (diolah)

3.3.2 Belanja Konsolidasian

Belanja konsolidasian di Kalimantan Selatan berdasarkan jenis belanjanya dapat dilihat pada grafik 3.40 berikut.

Grafik 3.40 Komponen Belanja Konsolidasian di Kalimantan Selatan

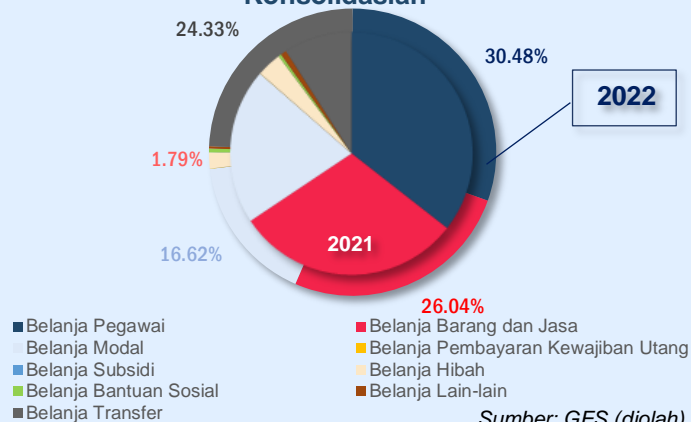


Sumber: GFS (diolah)



Pada tahun 2022, belanja konsolidasian di Kalimantan Selatan didominasi oleh belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Belanja yang bersifat operasional ini perlu menjadi perhatian karena jumlahnya yang tergolong besar jika dibandingkan dengan jenis belanja yang lain. Belanja jenis ini jika tidak dikontrol dengan tepat, maka akan menciptakan ketidakefisienan pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengefisienkan jenis belanja yang masih bersifat operasional ini dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang operasional. Penggunaan kedua komponen belanja pemerintah ini juga diharapkan dapat diarahkan dengan tepat sasaran dalam menyejahterakan masyarakat di Kalimantan Selatan.

Grafik 3.41 Kontribusi Komponen Belanja Konsolidasian



Belanja konsolidasian di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan yang cukup baik dengan peningkatan tertinggi oleh belanja transfer pada tahun 2022 ini yang menyebabkan kontribusinya naik seperti yang ditunjukkan grafik 3.41. Dengan meningkatnya belanja transfer ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mempergunakan

alokasi tersebut untuk mendorong perekonomian di daerahnya dengan lebih maksimal. Di sisi lain, belanja modal mengalami kontraksi yang kemudian menyebabkan turunnya kontribusi belanja modal terhadap belanja konsolidasian.

Belanja per kapita (*spending per citizen*) Provinsi Kalimantan Selatan meningkat dari tahun 2020 hingga 2022 seperti yang tampak pada grafik 3.42. Kenaikan di tiap periodenya terjadi seiring

Grafik 3.42 Perkembangan Belanja per Kapita



dengan belanja konsolidasian yang juga turut meningkat setiap tahunnya. Belanja per kapita pada tahun 2022 adalah sebesar Rp9.763.943,95 yang memiliki jumlah penduduk sekitar 4.141.533 jiwa pada semester I 2022. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah di Kalimantan Selatan telah merealisasikan belanja sebesar Rp9,76 juta per satu orang penduduk di Kalsel dalam satu tahun.

3.3.3 Surplus/Defisit



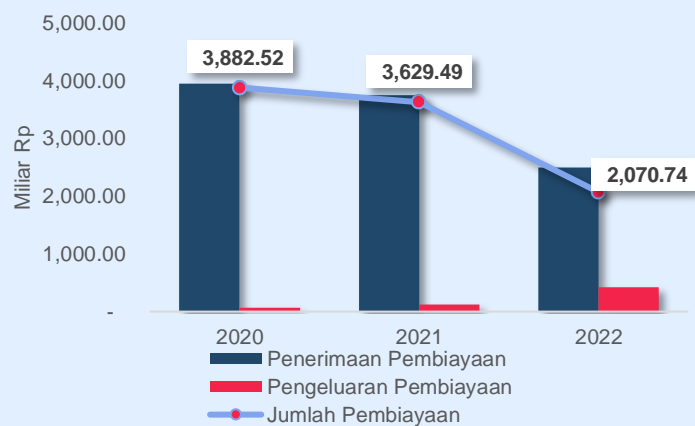
Keadaan defisit pelaksanaan anggaran konsolidasian di Kalimantan Selatan dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, defisit pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga 11,53% atau senilai Rp1.871,25

miliar. Penurunan dari jumlah defisit pada anggaran konsolidasian ini merupakan dampak dari meningkatnya pendapatan konsolidasian pada tahun 2022 yang naik hingga Rp8.246,41 miliar, sedangkan belanja konsolidasian yang merupakan pengurangnya hanya meningkat Rp6.375,16 miliar.

3.3.4 Pembiayaan Konsolidasian

Pembiayaan konsolidasian di Kalimantan Selatan menurun di tiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2022 sebagaimana dapat dilihat pada grafik 3.44 berikut. Pada tahun 2022, penurunan pada jumlah pembiayaan merupakan dampak dari menurunnya sejumlah penerimaan pembiayaan hingga mencapai Rp1.252,21 miliar,

Grafik 3.44 Pembiayaan Konsolidasian 2020-2022



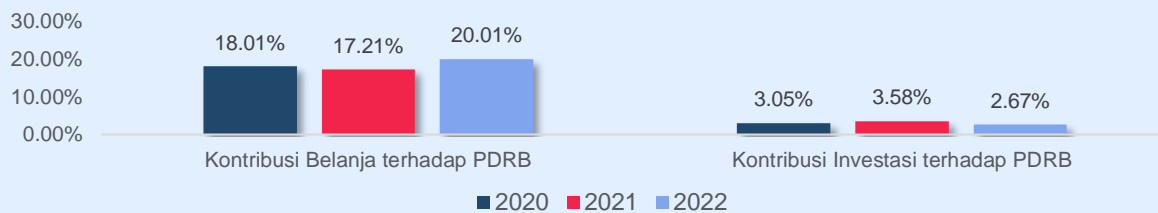
sedangkan di sisi lain pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan hingga Rp306,53 miliar dari tahun 2021. Besaran pembiayaan ini pada tahun 2022 kemudian secara konsolidasian menghasilkan angka SIKPA sebesar Rp12.288,50 miliar atau yang menurun hingga 2,48% dari tahun 2021.

3.3.5 Kontribusi Pengeluaran Pemerintah dalam Perekonomian

3.3.5.1 Kontribusi Belanja dan Investasi Pemerintah terhadap PDRB

Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dihitung dengan membandingkan belanja pemerintah terhadap PDRB dan belanja modal terhadap PDRB seperti grafik 3.45 berikut.

Grafik 3.45 Kontribusi Belanja dan Investasi Pemerintah terhadap PDRB



Sumber: GFS dan BPS Prov Kalsel (diolah)

Kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB menunjukkan angka yang semakin baik, hal ini berkebalikan dengan kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB yang digambarkan oleh belanja modal mengalami penurunan pada tiap tahunnya. Kontribusi akan belanja pemerintah ini diharapkan dapat terus meningkat untuk menstimulus perekonomian Kalimantan Selatan dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi.

3.3.5.2 Analisis Dampak Belanja Perlindungan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Negara hadir melalui bantuan yang diberikan untuk masyarakat miskin guna melindungi mereka dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Belanja Perlindungan Sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Adapun Realisasi Belanja Perlindungan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp245.168.821.154,00 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Realisasi Belanja Perlindungan Sosial di Kalimantan Selatan TA 2022

No	Program	Realisasi TA 2022
1	Program Perlindungan Sosial	11.664.329.654
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	78.316.100
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	124.430.673.141
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.160.800.000
5	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	2.263.599.700
6	Program Pengawasan Obat dan Makanan	160.578.115
7	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	91.215.602.379
8	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	2.085.633.259
9	Program Pendidikan Tinggi	11.160.600.000
10	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	948.688.806
Total		245.168.821.154

Sumber: SINTESA (diolah)

Analisis ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar dampak belanja perlindungan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan dalam analisis ini yaitu *Input-Output Model*. Tabel I-O memberikan gambaran mengenai struktur perekonomian nasional/regional yang mencakup struktur *output* dan nilai tambah masing-masing sektor; struktur *input* antara, yaitu penggunaan berbagai barang dan jasa oleh sektor produksi; struktur penyediaan barang dan jasa baik berupa produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor; dan struktur permintaan barang dan jasa, baik permintaan antara maupun permintaan akhir untuk konsumsi, investasi dan ekspor.

Tabel I-O pertama dikembangkan oleh Wassily Leontief pada akhir 1930-an. Tabel I-O ini mencerminkan transaksi antar sektor, sehingga tergambar keterkaitan antar sektor. Kegunaan Tabel I-O cukup banyak terutama di dalam perencanaan pembangunan dan memperkirakan potensi dampak kebijakan.

Tabel I-O merupakan uraian dasar statistik dalam bentuk matriks yang menyajikan transaksi barang dan jasa antar sektor selama kurun waktu tertentu. Isian baris matriks merupakan *output* yang dipakai oleh sektor lain dan permintaan akhir sedangkan isian kolom matriks merupakan pemakaian *input* antara dan *input* primer dalam proses produksi barang dan jasa antar sektor selama kurun waktu tertentu. Isian baris matriks merupakan *output* yang dipakai oleh sektor lain dan permintaan akhir sedangkan isian kolom matriks merupakan pemakaian *input* antara dan *input* primer dalam proses produksi.

Gambar 3.1 Kerangka Umum Tabel I-O

I (n x n) Transaksi antar sektor	II (n x m) Permintaan Akhir
III (p x n) Input Primer	IV (p x m)

Gambar di atas merupakan Kerangka Umum Tabel I-O, Kuadran I menunjukkan arus barang dan jasa yang dihasilkan dan digunakan oleh sektor-sektor dalam suatu perekonomian; Kuadran II menunjukkan permintaan akhir (*final demand*); Kuadran III memperlihatkan *input* primer sektor-sektor produksi; dan Kuadran IV memperlihatkan *input* primer yang langsung didistribusikan ke sektor-sektor.

Beberapa konsep penting dari variabel yang digunakan dalam analisis *input output* yaitu:

1. *Output*: nilai hasil seluruh produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi dengan memanfaatkan faktor yang tersedia di suatu wilayah.



2. *Input Antara*: seluruh biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa yang digunakan habis pakai dalam proses produksi.
3. *Input Primer*: *input* atau biaya yang timbul sebagai akibat dari pemakaian faktor produksi dalam suatu kegiatan. Faktor produksi antara lain tenaga kerja, tanah, modal, dan kewiraswastaan.
4. *Permintaan Akhir*: barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir.
5. *Impor*: komponen penyediaan dan bukan bagian permintaan akhir.

Pada analisis ini, yang digunakan sebagai dasar perhitungan yaitu tabel I-O Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 dengan 17 sektor (lapangan usaha) yang dikelompokkan dalam 52 klasifikasi usaha, mulai dari pertanian tanaman pangan (I-01) sampai jasa lainnya (I-52). Kemudian, tabel I-O tersebut diberikan *shock* berupa belanja perlindungan sosial yang diperoleh dari data Realisasi Perlindungan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022. Data Belanja Perlindungan Sosial tersebut didistribusikan berdasarkan pola konsumsi masyarakat yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Selanjutnya, dilakukan perhitungan dampak perubahan (kenaikan) *output* akibat belanja perlindungan sosial tersebut. Kemudian, berdasarkan perubahan *output* tersebut dapat dihitung kenaikan nilai tambah bruto sebagai pendorong peningkatan PDRB atau pertumbuhan ekonomi.

Belanja Perlindungan Sosial sebagai *Shock* dalam *Input-Output Model*

Realisasi Belanja Perlindungan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp245.168.821.154,00 tersebut kemudian didistribusikan berdasarkan pola konsumsi masyarakat yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sesuai persentase masing-masing komoditas. Selanjutnya, berdasarkan tabel tersebut dilakukan pengelompokan kembali distribusi belanja perlindungan sosial ke dalam 52 klasifikasi usaha.

Berikutnya, dilakukan perhitungan perubahan *output* akibat adanya belanja perlindungan sosial. Struktur tabel *input-output* adalah sebagai berikut:

$$(I - A)X = Y$$

Persamaan tersebut dapat mengukur dampak variabel eksogen (perubahan permintaan akhir Y) terhadap perubahan *output*. Sebagaimana $(I - A)X = Y$, kemudian, $X = (I - A)^{-1}Y$, di mana $(I - A)^{-1}$ merupakan matriks kebalikan Leontief atau B .

Kemudian, simulasi yang dapat dilakukan adalah memberikan dampak perubahan variabel eksogen berupa bagian dari permintaan akhir terhadap berbagai *input* primer seperti nilai tambah, pendapatan, kesempatan kerja, dan penerimaan pajak minus subsidi terhadap produksi sebagai berikut:

$$X = BYx$$

Y_x = perubahan belanja pajak/subsidi/bansos

Untuk mengukur dampak nilai tambah maka didapat:

$$V = \tilde{V}X$$

V = matriks nilai tambah

\tilde{V} = diagonal matriks nilai tambah

Matriks Pengganda

Matriks ini digunakan untuk menilai dampak perubahan variabel eksogen (permintaan akhir) suatu sektor terhadap penciptaan *output* atau total nilai produksi dari semua sektor ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan. Di dalam teori ekonomi makro Keynes kita mengenal angka pengganda (angka *multiplier*). Di dalam I-O, pengertiannya sama, tetapi bisa dirinci per sektor.

Perhitungan Matriks Pengganda:

Pertama, hitung Koefisien *Input*

$$a_{ij} = x_{ij}/X_j$$

a_{ij} = koefisien *input* sektor ke- i oleh sektor j

x_{ij} = penggunaan *input* sektor ke- i oleh sektor j (dalam nilai rupiah)

X_j = *output* sektor ke- j (dalam nilai rupiah)

Kedua, hitung Matriks Pengganda

$$B = (I-A)^{-1}$$

B = matriks pengganda

A = matriks koefisien *input*/teknik

I = matriks identitas

Dampak Belanja Perlindungan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran dampak pertumbuhan ekonomi diawali dengan perhitungan perubahan nilai tambah akibat adanya *shock* berupa belanja perlindungan sosial dilakukan dengan cara mengalikan diagonal matriks nilai tambah dengan matriks pengganda dikalikan lagi dengan *shock* belanja perlindungan sosial atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$V = \tilde{V}X$$

$$V = \tilde{V}BY_x$$

Belanja perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat berdampak pada kenaikan nilai tambah hampir di semua sektor. Menurut Haller dan Stolowy (1995) *Value Added* (VA) atau Nilai Tambah adalah pengukuran *performance*



entitas ekonomi yang memiliki sejarah panjang pada aplikasinya dalam ilmu ekonomi. Arti nilai tambah adalah perbedaan antara nilai dari *output* suatu perusahaan atau suatu industri, yaitu total pendapatan yang diterima dari penjualan *output* tersebut, dan biaya masukan dari bahan-bahan mentah, komponen-komponen atau jasa-jasa yang dibeli untuk memproduksi komponen tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Maka, setelah diperoleh kenaikan nilai tambah maka kenaikan PDRB dapat dihitung yang selanjutnya digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi.

Langkah selanjutnya adalah melakukan reklasifikasi 52 klasifikasi usaha ke dalam 17 lapangan usaha. Data PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 dari BPS digunakan untuk menghitung asumsi PDRB sebelum adanya kenaikan nilai tambah bruto akibat adanya belanja perlindungan sosial. Dengan begitu, persentase kenaikan PDRB dapat dihitung untuk mengetahui seberapa besar dampak belanja perlindungan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.10 Persentase Kenaikan Nilai Tambah Bruto terhadap PDRB

Lapangan Usaha	Kenaikan Nilai Tambah Bruto (jutaan Rp)	PDRB Tahun 2022 (jutaan Rp)	Asumsi PDRB sebelum Kenaikan Nilai Tambah Bruto (jutaan Rp)	Kenaikan Nilai Tambah Bruto terhadap PDRB (%)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	73.144	28.635.330	28.562.186	0,256%
Pertambangan dan Penggalian	575	80.520.100	80.519.525	0,001%
Industri Pengolahan	36.408	28.615.170	28.578.762	0,127%
Pengadaan Listrik dan Gas	221	320.960	320.739	0,069%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	374	912.800	912.426	0,041%
Konstruksi	2.976	17.267.780	17.264.804	0,017%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.665	22.758.700	22.752.035	0,029%
Transportasi dan Pergudangan	3.259	15.764.970	15.761.711	0,021%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	954	4.506.710	4.505.756	0,021%
Informasi dan Komunikasi	1.986	8.298.940	8.296.954	0,024%

Lapangan Usaha	Kenaikan Nilai Tambah Bruto (jutaan Rp)	PDRB Tahun 2022 (jutaan Rp)	Asumsi PDRB sebelum Kenaikan Nilai Tambah Bruto (jutaan Rp)	Kenaikan Nilai Tambah Bruto terhadap PDRB (%)
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.008	7.461.550	7.456.542	0,067%
Perumahan	53.524	5.072.210	5.018.686	1,066%
Jasa Perusahaan	1.210	1.543.080	1.541.870	0,078%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	115	12.024.990	12.024.875	0,001%
Jasa Pendidikan	7.708	9.932.270	9.924.562	0,078%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.372	4.864.990	4.856.618	0,172%
Jasa Lainnya	9.113	2.755.990	2.746.877	0,332%
Total	211.612	251.256.540	251.044.928	0,084%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sektor Perumahan, Jasa Lainnya, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang terkena dampak paling besar akibat adanya belanja perlindungan sosial berupa kenaikan nilai tambah bruto. Kenaikan nilai tambah bruto tersebut kemudian berdampak pada kenaikan PDRB yang pada akhirnya menstimulus pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa belanja perlindungan sosial dari pemerintah telah mampu memberikan akses pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar manusia, termasuk akses pada pendapatan, kehidupan, pekerjaan, kesehatan dan pendidikan, gizi, dan tempat tinggal. Dengan demikian, belanja perlindungan sosial yang diberikan pemerintah telah mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka menstimulus pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat mengambil kebijakan berupa distribusi bantuan sosial secara lebih tepat sasaran ke tiga sektor yang mengalami kenaikan nilai tambah bruto tertinggi tersebut. Dengan begitu, maka PDRB juga akan meningkat dan hal ini tentunya akan menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Bab IV

Analisis Sektor Unggulan dan Potensial Daerah

Highlight

- Sektor lapangan usaha di Kalimantan Selatan mayoritas masih merupakan non basis. Dari 17 total sektor lapangan usaha, baru 7 sektor yang merupakan basis ditahun 2022.
- Sektor unggulan di Kalimantan Selatan masih terdapat pada sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang berkontribusi terhadap PDRB sebesar 32,05%.
- Sektor potensial di Kalimantan Selatan terdapat pada sektor industri pengolahan seiring pembangunan dan pengembangan industri hilirisasi batubara.
- Diproyeksikan tahun 2023 industri pengolahan menjadi sektor basis yang sebelumnya ditahun 2022 masih merupakan sektor nonbasis.



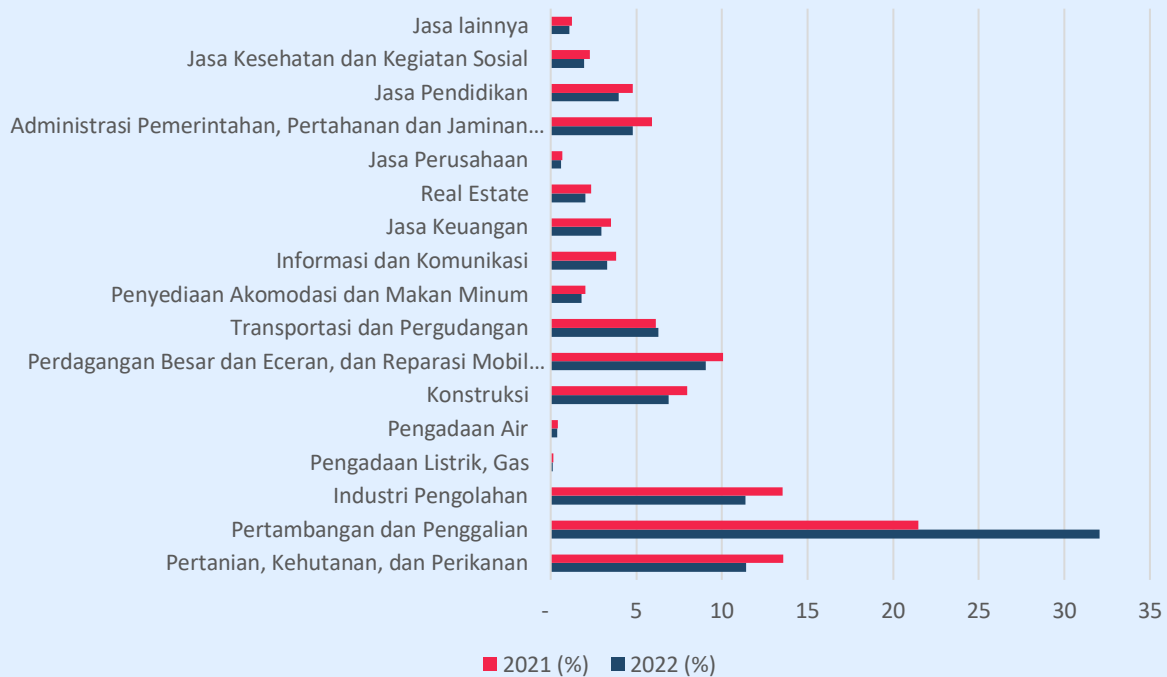
Festival Budaya Saijaan **1-5 juni 2022**

“ Festival Budaya Saijaan (FBS) merupakan salah satu parade kebudayaan yang masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI yang digelar di Taman Siring Laut. Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Masyarakat dimanjakan dengan semilir angin laut dan berbagai pertunjukan berkualitas dan meliputi *Exhibition International of Art*, Pementasan Sendratari Legenda Putri Suwangi, Gelar Seni Budaya Multietnik Kotabaru, hingga ekshibisi paralayang dan gantole di Bukit Mamake. ”

4.1 Pendahuluan

Struktur PDRB Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 per kelompok Lapangan Usaha (LU) masih didominasi oleh distribusi dari Sektor Pertambangan dan Penggalian sebagaimana dapat terlihat pada grafik 4.1.

Grafik 4.1 Distribusi PDRB Kalimantan Selatan per Lapangan Usaha Tahun 2021-2022



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Peningkatan kinerja LU sektor pertambangan dan penggalian didorong oleh peningkatan produksi batubara dalam rangka *carry over* produksi setelah sempat terjadi larangan ekspor batubara pada bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya dilakukan pemetaan terhadap sektor unggulan dan potensial Kalimantan Selatan tahun 2022 yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ), analisis *Shift Share*, analisis dan Tipologi Klassen.

1) Analisis *Location Quotient* (LQ)

Berdasarkan perhitungan hasil analisis LQ diketahui posisi sektor-sektor ekonomi unggulan yang ditandai dengan nilai $LQ \geq 1,0$ sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1 Sebaran *Location Quotient* Lapangan Usaha Kalimantan Selatan tahun 2018 - 2022

SEKTOR	LQ				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,067	1,079	1,012	1,007	0,879
Pertambangan dan Penggalian	2,453	2,517	2,733	2,071	2,508
Industri Pengolahan	0,678	0,665	0,656	0,695	0,594
Pengadaan Listrik dan Gas	0,111	0,116	0,127	0,131	0,117
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,866	5,912	5,920	6,014	5,428
Konstruksi	0,726	0,737	0,744	0,751	0,673
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,739	0,777	0,780	0,761	0,674
Transportasi dan Pergudangan	1,184	1,189	1,421	1,424	1,195
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,696	0,732	0,811	0,822	0,712
Informasi dan Komunikasi	0,900	0,882	0,839	0,857	0,761
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,835	0,808	0,784	0,796	0,687
Real Estate	0,775	0,788	0,797	0,845	0,774
Jasa Perusahaan	0,365	0,361	0,370	0,387	0,337
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,565	1,632	1,625	1,696	1,481
Jasa Pendidikan	1,379	1,419	1,374	1,439	1,307
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,765	1,746	1,645	1,693	1,536
Jasa lainnya	0,664	0,649	0,658	0,666	0,580

Sumber: BPS dan BPS Prov.Kalsel (diolah).

Secara agregat, lapangan usaha di Kalimantan Selatan memiliki nilai LQ < 1,0 yang menunjukkan bahwa mayoritas komoditas atau lapangan usaha masih tergolong non basis, tidak memiliki keunggulan komparatif. Namun secara parsial terdapat beberapa lapangan usaha yang memiliki LQ > 1,0 yang menandakan bahwa lapangan usaha tersebut memiliki keunggulan dan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan lokal serta diekspor.

Hasil analisis LQ diketahui bahwa dari total 17 sektor lapangan usaha, terdapat 6 sektor usaha yang menjadi sektor basis Kalimantan Selatan pada tahun 2022 yaitu Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

2) Analisis *Shift Share*

Analisis ini digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor pada perekonomian yang menggambarkan kinerja masing-masing sektor dalam PDRB Kalimantan Selatan dibandingkan dengan nasional sebagai daerah acuan. Kemudian dilakukan analisis terhadap pergeseran yang terjadi sebagai hasil perbandingan. Bila pergeseran positif, maka dapat dikatakan suatu sektor memiliki keunggulan komparatif begitu juga sebaliknya. Berikut disajikan hasil *Shift Share* Kalimantan Selatan tahun 2012-2022 pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Analisis *Shift Share* Klasik Kalimantan Selatan 2012 – 2022 *Juta Rupiah*

Sektor	Komponen Pertumbuhan Nasional	Komponen Pertumbuhan Proporsional	Komponen Keunggulan Komparatif	Pergeseran Bersih
	(Nij)	(Mij)	(Cij)	(Dij)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23.438.297,63	1.875.275,75	(4.189.285,28)	21.124.288,11
Pertambangan dan Penggalian	47.863.987,36	16.382.287,06	31.233.749,16	95.480.023,59
Industri Pengolahan	22.596.256,40	1.956.464,76	1.080.703,20	25.633.424,36
Pengadaan Listrik dan Gas	210.288,77	18.092,42	166.299,48	394.680,67
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	680.174,00	39.818,50	154.090,66	874.083,17
Konstruksi	13.021.890,94	1.273.698,82	(128.520,31)	14.167.069,45
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.374.405,80	1.861.446,31	3.786.390,60	22.022.242,71
Transportasi dan Pergudangan	11.112.173,17	2.674.853,68	(1.798.854,58)	11.988.172,27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.343.801,55	361.422,88	883.484,75	4.588.709,18
Informasi dan Komunikasi	5.995.109,17	566.044,28	(380.532,91)	6.180.620,55
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.779.507,17	603.106,23	(573.183,04)	5.809.430,36
Real Estate	3.793.115,69	251.668,95	580.900,81	4.625.685,45
Jasa Perusahaan	1.119.976,56	138.498,15	12.831,74	1.271.306,45
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.659.043,29	546.714,62	1.785.744,82	11.991.502,73
Jasa Pendidikan	7.503.415,88	449.264,30	1.115.864,09	9.068.544,27
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.403.781,83	271.272,85	182.207,20	3.857.261,88
Jasa lainnya	2.022.548,89	257.111,21	(237.530,64)	2.042.129,46

Sumber: BPS dan BPS Prov. Kalsel (diolah).

Hasil analisis *shift share* menunjukkan bahwa seluruh lapangan usaha yang ada di Kalimantan Selatan memiliki pergeseran bersih positif (+). Dari 17 sektor lapangan usaha, 11 sektor lapangan usaha berkesempatan untuk dikembangkan karena memiliki daya saing atau

keunggulan komparatif yang cukup kuat. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki skor pergeseran paling tinggi yang menunjukkan bahwa sektor ini memiliki daya saing paling baik di tingkat regional.

3) Analisis Tipologi Klassen

Analisis ini dimaksudkan untuk menetapkan sektor-sektor atau lapangan usaha yang paling tinggi potensinya serta yang masih berpeluang untuk dikembangkan potensinya di Kalimantan Selatan. Elemen penghitungan didasarkan pada perbandingan antara laju pertumbuhan ekonomi per sektor dan kontribusi per sektor terhadap PDRB total Kalimantan Selatan dengan Nasional yang menjadi daerah acuan. Analisis Tipologi Klassen ini pada dasarnya mengelompokkan/mengklasifikasikan sektor ekonomi suatu wilayah dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu Daerah. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen terdapat 4 (empat) kategori/kriteria sektor ekonomi pada suatu wilayah. Berikut disajikan hasil analisis kuadran Tipologi Klassen pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Kuadran Tipologi Klassen Lapangan Usaha Kalimantan Selatan 2018 –2022

Kuadran (1) Sektor Ekonomi Potensial	Kuadran (3) Sektor Ekonomi Berkembang Cepat
1. Pertambangan dan Penggalian; 2. Industri Pengolahan; 3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 4. Jasa Perusahaan.	1. Transportasi dan Pergudangan; 2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 3. Jasa lainnya.
Kuadran (2) Sektor Ekonomi Maju namun Tertekan	Kuadran (4) Sektor Ekonomi Relatif Tertinggal
1. Pengadaan Listrik dan Gas; 2. Informasi dan Komunikasi; 3. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 3. Konstruksi; 4. Jasa Keuangan dan Asuransi; 5. <i>Real Estate</i> ; 6. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 7. Jasa Pendidikan.

Sumber: BPS dan BPS Prov. Kalsel (diolah).

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen terhadap kondisi pada tahun 2018 s.d. 2022 diketahui bahwa terdapat 4 sektor lapangan usaha potensial dan 3 sektor usaha berkembang pesat yang dapat dieksplorasi serta dikembangkan lagi di Kalimantan Selatan. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan pertumbuhan pendapatan suatu sektor di wilayah yang lebih kecil dengan wilayah yang lebih besar. Analisis MRP dilakukan dengan cara membandingkan pertumbuhan suatu sektor yang terdapat di Provinsi dengan pertumbuhan sektor yang sama di Nasional sebagaimana tabel 4.4 berikut



Tabel 4.4 Hasil Perhitungan MRP Kalimantan Selatan 2021- 2022

Sektor	2022-2021			
	RPs		RPr	
	Riil	Nominal	Riil	Nominal
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,34	-	0,59	-
Pertambangan dan Penggalian	1,46	+	5,02	+
Industri Pengolahan	2,78	+	0,53	-
Pengadaan Listrik dan Gas	1,19	+	0,45	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,85	-	0,51	-
Konstruksi	0,65	-	0,60	-
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,54	-	0,77	-
Transportasi dan Pergudangan	0,35	-	0,66	-
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,49	-	0,25	-
Informasi dan Komunikasi	0,79	-	0,85	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,35	-	0,54	-
Real Estate	0,61	-	0,47	-
Jasa Perusahaan	0,62	-	0,50	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,33	-	0,15	-
Jasa Pendidikan	0,34	-	0,29	-
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,32	+	1,23	+
Jasa lainnya	0,28	-	0,69	-

Sumber: BPS dan BPS Prov. Kalsel (diolah).

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang mempunyai nilai Rasio Pertumbuhan wilayah Studi (RPs) dan Rasio Pertumbuhan wilayah Referensi (RPr) yaitu sektor Industri Pertambangan dan Penggalian.

Pada sektor-sektor basis perlu dilakukan upaya ekstensifikasi, ekspansi kewilayahan, serta strategi penetrasi investasi lebih intensif untuk meyakinkan para investor bahwa kebutuhan pada sektor-sektor ini relatif tinggi namun belum dapat dipenuhi secara memadai.

4.2 Sektor Unggulan Daerah

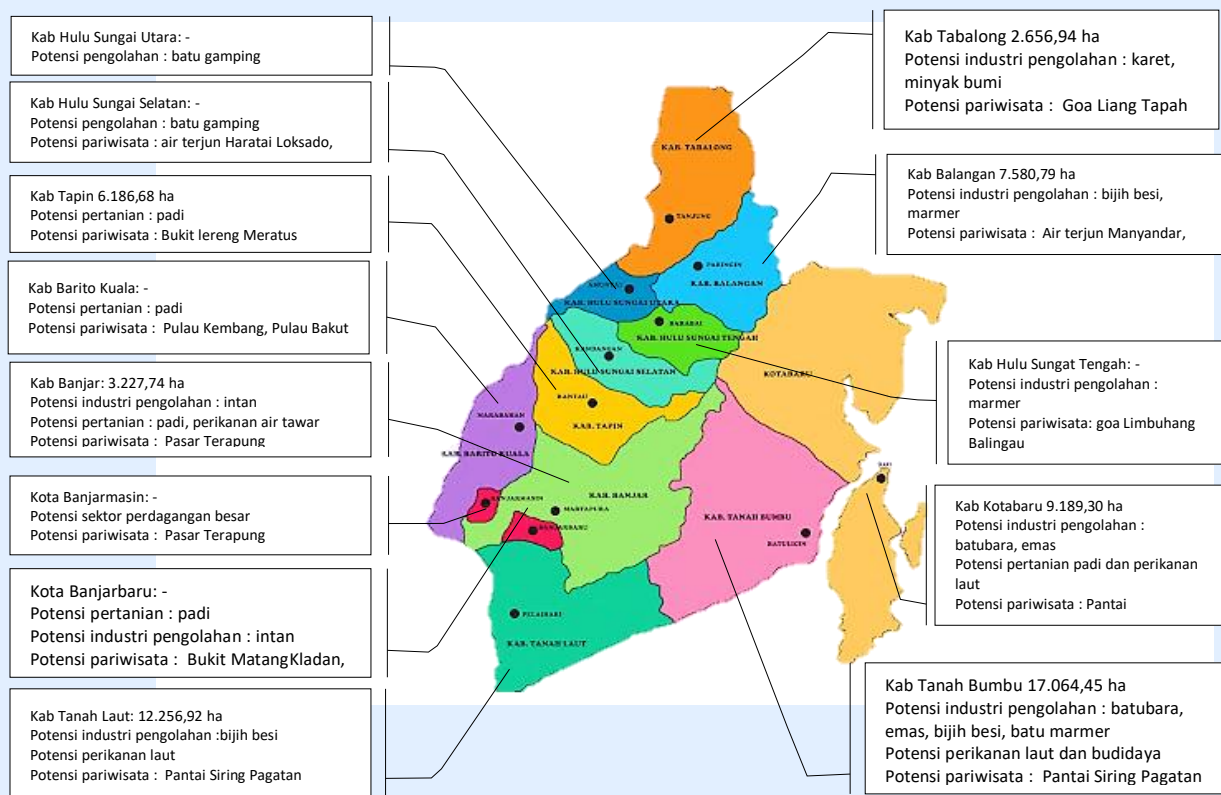
4.2.1 Profil Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Lapangan Usaha

Pada dasarnya setiap sektor atau lapangan usaha yang ada di Kalimantan Selatan memiliki peluang untuk lebih dikembangkan melalui investasi. Jika mengacu pada teori *Local Economic Development (LED)* dalam jurnal Adi (2012) menekankan pada optimalisasi potensi daerah melalui komoditas unggulan, maka tentunya investasi akan lebih tepat dilakukan pada sektor-sektor yang masuk pada kategori sektor ekonomi basis seperti:

- 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
- 4) Transportasi dan Pergudangan;
- 5) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
- 6) Jasa Pendidikan;
- 7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;

Berdasarkan basis wilayah, sektor unggulan per Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

Gambar 4.1 Luas Wilayah Penggunaan Lahan Pertambangan



Sumber: RPJMD Prov. Kalsel 2021-2026 (diolah).

Sektor Pertambangan dan Penggalian ini sebagai sektor basis yang merupakan tumpuan kontribusi utama PDRB di Kalimantan Selatan. Selain itu, sektor ini juga merupakan

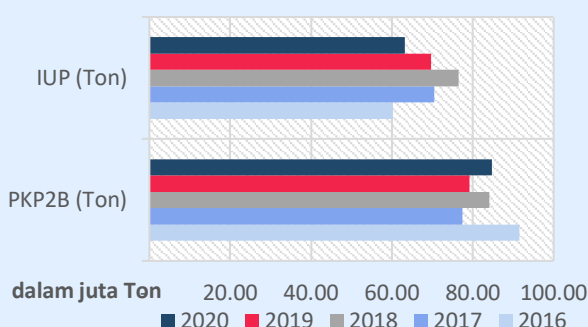


sektor ekonomi yang menjadi salah satu target transformasi struktur ekonomi berkelanjutan mengingat sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang tidak dapat diperbaharui sumber dayanya dalam rangka mempertahankan kinerja perekonomian daerah untuk ke depannya sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan terpilih yang tertuang pada RPJMD 2021-2026.

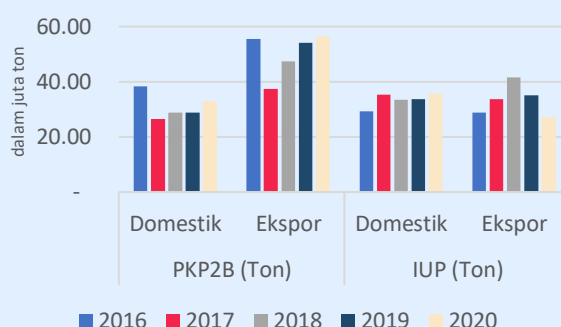
4.2.1.1 Pertambangan dan Penggalian

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi pertambangan yang didominasi oleh komoditas batubara, dimana sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi PDRB yang signifikan. Berikut disajikan jumlah produksi dan penjualan batubara Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tampak pada grafik 4.2 dan 4.3.

Grafik 4.2 Produksi Batu Bara Prov. Kalsel



Grafik 4.3 Penjualan Batu Bara Prov. Kalsel

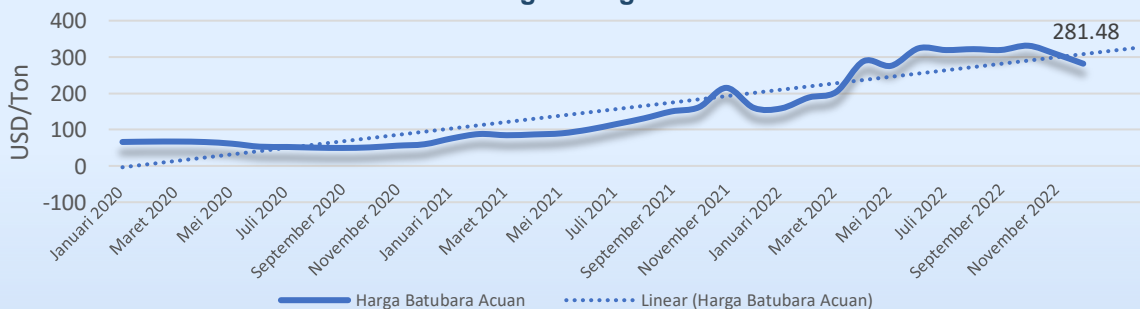


Sumber: Dinas ESDM Prov. Kalsel

Perkembangan produksi dan penjualan batubara memiliki pertumbuhan yang berfluktuatif. Produksi melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada tahun 2020 masing-masing sebesar 84,69 juta ton atau tumbuh 6,98% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan produksi batu bara dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berkontraksi 9,27% dibanding tahun sebelumnya atau sebesar 63,17 juta ton. Penjualan batubara Provinsi Kalimantan Selatan dengan PKP2B sebesar 61,74% total penjualan dikirim ke pangsa luar negeri (ekspor).

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 288.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan bulan Desember 2022 sebesar 281,48 USD/Ton. Berikut disajikan perkembangan HBA pada grafik 4.4.

Grafik 4.4 Perkembangan Harga Batu Bara Acuan



Sumber: Kementerian ESDM (diolah)

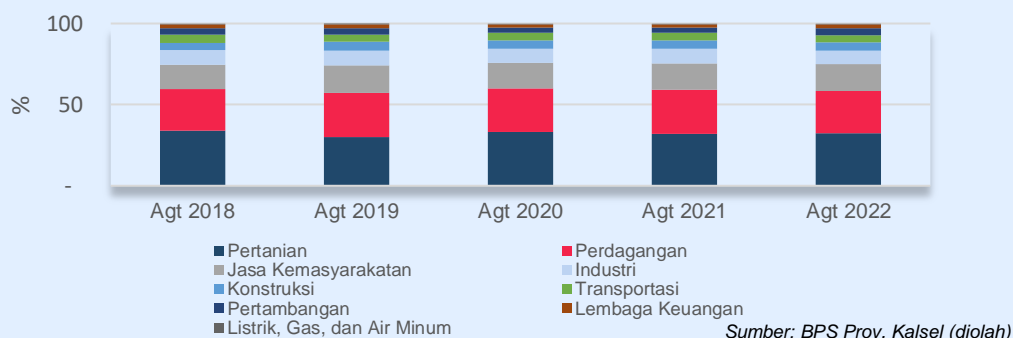
Bulan Desember tahun 2022 Harga Batubara Acuan (HBA) menurun 8,67% dibanding bulan sebelumnya. Namun penurunan di akhir tahun merupakan siklus yang biasa terjadi sama halnya diakhir tahun 2021 yang mengalami penurunan. Bulan Januari 2023 mengalami koreksi ke angka USD305,21 per ton. Angka tersebut naik 8,43% atau USD23,73 per ton dari bulan Desember 2022. Kenaikan tersebut salah satunya dipicu karena terjadinya gangguan distribusi batubara di Australia sebagai salah satu pemasok batubara global.

Terdapat 2 faktor turunan yang mempengaruhi pergerakan HBA yaitu, *supply* dan *demand*. Pada faktor turunan *supply* dipengaruhi oleh *season* (cuaca), teknis tambang, kebijakan negara supplier, hingga teknis di *supply chain* seperti kereta, tongkang, maupun loading terminal. Sementara untuk faktor turunan *demand* dipengaruhi oleh kebutuhan listrik yang turut berkorelasi dengan kondisi industri, kebijakan impor, dan kompetisi dengan komoditas energi lain, seperti *liquefied natural gas* (LNG), nuklir, dan hidro.

4.2.2 Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Ketenagakerjaan

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berikut disajikan komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama tampak pada grafik 4.5.

Grafik 4.5 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama Kalimantan Selatan tahun 2018-2022



Pola dan dominasi sektor Pertanian, Perdagangan, dan Jasa Kemasyarakatan dalam menyerap tenaga kerja masih sama dengan Agustus 2020 maupun Agustus 2021. Namun jika dilihat dari rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2018-2022, sektor pertanian memiliki pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar 0,71%. Sedangkan sektor Perdagangan dan Jasa Kemasyarakatan mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 0,30% dan 2,51%.

Terdapat kecenderungan perubahan struktur komposisi tenaga kerja. Selama periode waktu 5 (lima) tahun, data menunjukkan penurunan jumlah tenaga kerja pada Sektor Pertanian di Kalimantan Selatan. Sementara itu, peningkatan persentase jumlah tenaga kerja terjadi pada sektor Jasa Kemasyarakatan, Konstruksi, dan sektor lainnya yang meliputi Pertambangan dan Lembaga Keuangan.



4.2.3 Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan Daerah

Kontribusi dari sektor unggulan Kalimantan Selatan terhadap pendapatan negara dan daerah berasal dari penerimaan Pajak. Berikut disajikan kontribusi penerimaan pajak sektor unggulan terhadap total penerimaan pajak di Kalimantan Selatan sebagaimana tampak pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Penerimaan Pajak Sektor Unggulan Kalimantan Selatan Terhadap Pendapatan Negara/Daerah

Sektor Lapangan Usaha	Realisasi s.d. Desember 2022 (dalam miliar Rp)	Persentase thd Total Realisasi 2022
Pertambangan dan Penggalian	17.219,63	37,73%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	71,37	0,16%
Transportasi dan Pergudangan	4.298,36	9,42%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.849,76	6,24%
Jasa Pendidikan	20,90	0,05%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124,29	0,27%
TOTAL	24.584,31	53,87%

Sumber: Kanwil DJP Kalselteng (diolah)

Sampai dengan akhir tahun 2022, realisasi total sektor unggulan mencapai 53,87% dari total sebesar Rp45,64 triliun yang berasal dari realisasi pajak seluruh kelompok Lapangan Usaha.

4.2.4 Dukungan Alokasi APBN dan APBD

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan telah memberikan dukungan alokasi melalui APBN maupun APBD yang terkait dengan sektor Pertambangan dan Penggalian yang secara umum terdapat pada alokasi belanja satker vertikal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu program kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan pemulihan, pemantauan, dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut; pemulihan kerusakan lingkungan; dan pencegahan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan penggalian.

Tabel 4.6 Alokasi Belanja APBN terkait Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2022

Alokasi Belanja	Pagu	Realisasi	%Realisasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.195.921.500,00	2.997.685.825,00	93,80%

Kegiatan tersebut telah dialokasikan sebesar Rp3,19 miliar dan terealisasi sebesar Rp2,99 miliar atau 93,80%. Dukungan Pemerintah melalui alokasi ini menunjukkan bahwa

Pemerintah juga memiliki perhatian terhadap sektor Pertambangan dan Penggalian kepada masyarakat.

4.2.5 Tantangan Fiskal pada Sektor Unggulan Daerah

Sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi salah satu fokus sektor pada RPJMD Kalimantan Selatan 2021-2026 sebagai bagian dari misi memperkuat sarana dan prasarana perekonomian dengan sasaran meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar untuk pemenuhan standar hidup layak.

Ada beberapa tantangan fiskal yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan misi tersebut, diantaranya adalah keterbatasan anggaran untuk merevitalisasi lahan bekas galian tambang serta penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang ada.

4.2.6 Dukungan Kebijakan dan Stimulus Fiskal yang Diperlukan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut antara lain melakukan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi dilakukan agar tidak terus menerus ketergantungan atas sumber daya alam sehingga dapat diwujudkan daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran masyarakat. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah diatur bahwa pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi yang melakukan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara yang dapat berupa pengenaan iuran produksi/royalti sebesar 0%. Ini merupakan insentif yang diberikan oleh Pemerintah kepada perusahaan tambang batubara yang serius melakukan pengolahan serta pemurnian dalam negeri.

Sejauh ini hilirisasi batubara yang didorong pemerintah antara lain gasifikasi untuk menghasilkan *Dimethyl Ether* (DME), gasifikasi menuju methanol, semis kokas, dan *Underground Coal Gasification* (UCG). Pelaksanaan program percepatan transformasi ekonomi ini juga membutuhkan komitmen dan upaya dari berbagai pihak, tak terkecuali Pemerintah Kab/Kota agar sesuai target *Sustainable Development Goals* (SDG) dan penurunan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari komitmen dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC).

4.3 Sektor Potensial Daerah

4.3.1 Profil Sektor Potensial Daerah Berdasarkan Lapangan Usaha

Salah satu metode untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah adalah dengan meningkatkan potensi berbagai sektor agar dapat mendorong pembangunan ekonomi (Aryanti & Indarti, 2009). Sektor potensial merupakan sektor yang mempunyai kemampuan untuk dikembangkan guna mencapai penambahan



output yang diukur melalui PDB maupun PDRB suatu wilayah. Sektor potensial di Kalimantan Selatan berdasarkan tipologi klassen meliputi sektor-sektor sebagai berikut.

- 1) Pertambangan dan Penggalian;
- 2) Industri Pengolahan;
- 3) Konstruksi; dan
- 4) Transportasi dan Pergudangan.

Sektor Industri Pengolahan sangat potensial untuk dikembangkan terlebih dalam rangka mengimplementasikan transformasi ekonomi berupa hilirisasi hasil batubara dan CPO Kalimantan Selatan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan pengembangan industri pengolahan difokuskan pada penguatan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan energi yang berkesinambungan serta terjangkau.

Dalam hal ini, pembangunan dan pengembangan industri hilirisasi batubara khususnya di Kalimantan Selatan perlu terus didorong agar dapat menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, termasuk untuk substitusi impor, penciptaan lapangan kerja, dan sekaligus transisi energi bersih (*green economy*). Berdasarkan Buku *Road Map* Pengembangan dan Pemanfaatan Batu Bara, terdapat sekurangnya-kurangnya 7 (tujuh) peluang pembangunan industri hilirisasi batubara yang di antaranya:

- 1) Industri gasifikasi batubara (*coal gasification*) berfungsi untuk smelter minerba;
- 2) Industri pembuatan kokas (*cokes making*) berfungsi untuk peleburan pada industri besi dan baja dalam rantai pasok *circle* industri otomotif;
- 3) Industri produksi *underground coal gasification* (UCG) yang merupakan bahan baku untuk diproses lebih lanjut menjadi *Dimethyl Eter* (DME) sebagai bahan bakar dan substitusi impor LPG, urea, serta polypropylene sebagai bahan baku plastik;
- 4) Industri produksi pencairan batubara (*coal liquefaction*) berfungsi untuk mengkonversi atau *upgrading* batubara;
- 5) Industri *Upgrading Brown Coal* (UBC) berfungsi untuk meningkatkan nilai kalor batubara berperingkat rendah;
- 6) Industri pembuatan briket batubara (*coal briquetting*) untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, karena mampu digunakan sebagai pengganti minyak tanah; dan
- 7) Industri produksi *coal slurry* yang berfungsi agar batubara memiliki kandungan yang lebih ramah lingkungan dan mudah ditransportasikan.

(Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, 2021)

Berdasarkan hal tersebut, salah satu industri pengolahan (hilirisasi) dan linkage antar industri terutama atas hasil ekstraksi tambang batubara mentah yang selama ini menjadi tulang punggung Kalimantan Selatan merupakan bagian potensial untuk dibangun dan dikembangkan di Kalimantan Selatan.

4.3.2 Kontribusi Sektor Potensial Daerah Terhadap Ketenagakerjaan

Sebagaimana telah dijelaskan pada data subbab sebelumnya, persentase porsi ketenagakerjaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pada industri pengolahan di Kalimantan Selatan cenderung tetap, berkisar di angka 8% sampai 9% dari total jumlah tenaga kerja yang bekerja. Dari sisi ketenagakerjaan tahun 2022, sektor potensial daerah mengambil porsi penyerapan ketenagakerjaan sebesar 18,36%. Ini menjadi peluang untuk lebih bisa menyerap dari sisi ketenagakerjaan karena sektor potensi Kalimantan Selatan bukan merupakan *sunset sector* terkecuali sektor pertambangan dan penggalian. Namun sektor pertambangan dan penggalian sudah dimulainya hilirisasi searah dengan kebijakan transformasi ekonomi.

4.3.3 Kontribusi Sektor Potensial Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan Daerah

Kontribusi dari sektor potensial Kalimantan Selatan terhadap Pendapatan Negara dan Daerah berasal dari penerimaan Pajak. Berikut disajikan persentase penerimaan pajak dari sektor potensial Kalimantan Selatan sebagaimana tabel 4.7.

Tabel 4.7 Penerimaan Pajak Sektor Potensial Kalimantan Selatan Terhadap Pendapatan Negara/Daerah

Sektor Lapangan Usaha	Realisasi s.d. Desember 2022 (dalam miliar Rp)	Persentase thd Total Realisasi 2022
Pertambangan dan Penggalian	17.219,63	37,73%
Industri Pengolahan	1.280,08	2,80%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.356,78	24,88%
Jasa Perusahaan	2.100,56	4,6%
TOTAL	31.957,05	70,01%

Sumber: Kanwil DJP Kalselteng (diolah)

Sampai dengan akhir tahun 2022, realisasi penerimaan Pajak dari kegiatan sektor potensial Kalimantan Selatan mencapai Rp31,95 triliun dari total Rp45,64 triliun yang berasal dari realisasi Pajak kegiatan seluruh sektor KLU.

4.3.4 Dukungan Alokasi Anggaran APBN dan APBD

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan telah memberikan dukungan alokasi melalui APBN maupun APBD yang terkait dengan sektor Industri Pengolahan yang secara umum terdapat pada alokasi belanja satker vertikal Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program nilai tambah dan daya saing industri.



Tabel 1.8 Alokasi Belanja APBN terkait Sektor Industri Pengolahan Tahun 2022

Alokasi Belanja	Pagu	Realisasi	%Realisasi
Kementerian Pertanian	13.570.400.280,00	12.956.996.264,00	95,48%
Kementerian Perindustrian	3.400.671.630,00	3.359.828.565,00	98,80%
Kementerian Kelautan dan Perikanan	357.395.000,00	356.911.800,00	99,86%
Total	17.328.466.910,00	16.673.736.629,00	96,22%

sumber: SINTESA, diolah

Program tersebut secara total telah dialokasikan sebesar Rp17,32 miliar dan terealisasi sebesar Rp16,67 miliar atau 96,22%. Dukungan Pemerintah melalui alokasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah juga memiliki perhatian terhadap sektor industri pengolahan kepada masyarakat.

4.3.5 Tantangan Fiskal pada Sektor Potensial Daerah

Invensi dan inovasi di dalam dunia bisnis pada dasarnya berkaitan erat dengan strategi perusahaan industri dalam menguasai keadaan pasar (Sri, dkk, 2013). Dalam kaitannya dengan invensi dan inovasi setidaknya strategi perusahaan muncul dalam bentuk dan pengembangan produk baru dan dipasok untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pengembangan produk merupakan hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan. Disisi lain pengembangan produk membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk memulai dan *research* produk yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan pasar.

Terdapat tantangan fiskal pada sektor industri pengolahan yaitu modal. Modal yang dibutuhkan terkait bahan bahan penunjang, infrastruktur, utilitas, ketersediaan tenaga ahli, tekanan produk impor, pengolahan limbah plastik sebagai limbah B3, logistik sektor industri, serta mengenai penguatan basis data sektor industri tidaklah kecil. Modal yang besar tentu tidak bisa bergantung dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dibutuhkan investor untuk memenuhi modal yang dibutuhkan. Tentu investor dalam memberikan modal tidak sembarang harus terdapat perhitungan dan faktor-faktor yang mendukung dalam melakukan investasi seperti rasa aman baik dari segi lingkungan maupun regulasi dalam menjalankan bisnis.

Tantangan dari perekonomian di Kalimantan Selatan adalah melakukan transformasi struktur ke sektor non pertambangan dan sektor jasa ke sektor manufaktur yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA). Strategi untuk melakukan transformasi ini di Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk melakukan hilirisasi sektor pertambangan batu bara menjadi berbagai bentuk olahan seperti gas dan cairan serta untuk industri lainnya. Strategi untuk hilirisasi kelapa sawit telah dilakukan dengan membangun pabrik minyak nabati. Hilirisasi hasil tambang batu bara dan kelapa sawit akan menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja serta menarik industri lainnya untuk berkembang dan menciptakan industri baru pendukung.

Oleh karena itu, sebaiknya pendapatan dari batu bara disisihkan untuk dana abadi yang dipergunakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalsel agar dapat mengelola proses tranformasi berbasis SDA. Berbagai kemudahan dalam proses membuka usaha di Kalsel juga sebaiknya dipermudah sehingga memancing investor masuk ke industri tranformasi tersebut dan tantangan fiskal pada sektor industri pengolahan tersebut yang berupa modal dapat teratasi.

4.3.6 Dukungan Kebijakan dan Stimulus Fiskal yang Diperlukan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pengolahan sumber-sumber mineral maupun batubara mewajibkan diolah lebih lanjut sehingga bisa memberikan nilai tambah. Melalui Kementerian ESDM maupun Kementerian Perindustrian serta Kementerian terkait terus berupaya untuk menjembatani kebutuhan para investor. Hal ini juga bertujuan mewujudkan cita-cita Indonesia membangun industri hilirisasi dari hulu ke hilir agar dapat meningkatkan nilai tambah yang tinggi serta penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak.

Berdasarkan realitas dan analisis potensi investasi yang dilakukan, maka strategi yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk pengembangan investasi dimasa datang antara lain seperti: 1) Menciptakan iklim investasi yang kondusif yang harus ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi; 2) Mewujudkan infrastruktur investasi secara memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak berupa jalan, air bersih, listrik, dan fasilitas lain berstandar nasional; 3) Menjamin kepastian hukum yang ditandai dengan terdapatnya regulasi bidang investasi yang berpihak kepada investor dan sekaligus menjamin hak-hak pekerja; 4) Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro; dan 5) Melakukan reformasi birokrasi yang ditandai dengan meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu untuk para investor dalam urusan investasi.

Bab V

Analisis Tematik: Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Highlight

- Pelaksanaan kegiatan pada kategori belanja K/L dan bidang DAK Fisik di Kalimantan Selatan secara umum telah selaras penggunaannya untuk pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik, serta selaras untuk output dari kegiatan di wilayah/lokasi yang sama.
- DAK Non Fisik sejalan dengan belanja satker K/L di Kalimantan selatan



Tradisi Baayun Maulid

7-8 Oktober 2022

“ Ada banyak tradisi yang dilakukan masyarakat Kalimantan Selatan saat memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal 1440 H. Salah satu tradisi yang selalu digelar adalah Baayun Maulid. Baayun Maulid adalah kegiatan mengayun bayi atau anak sambil membaca syair Maulid. Tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat Banjar sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tujuan tradisi ini adalah anak-anak Banjar jika sudah besar bisa mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW dan berbakti kepada kedua orang tua. ”



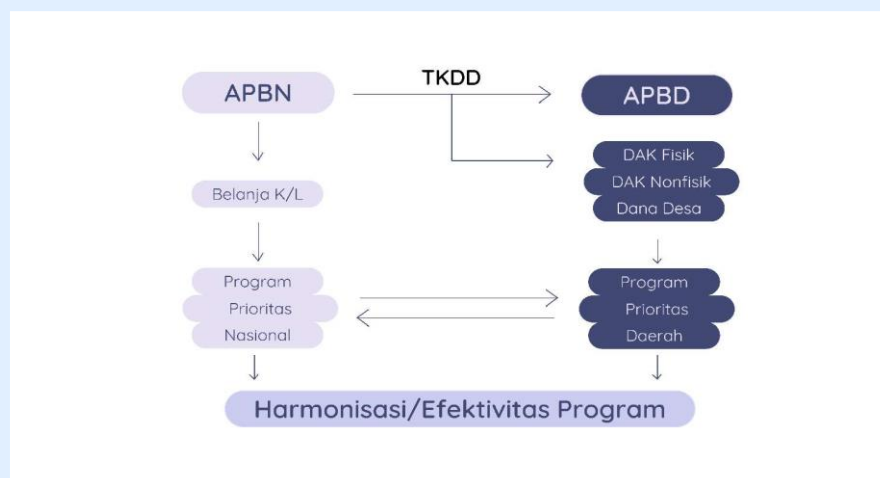
5.1 Pendahuluan

Dalam mewujudkan tujuan nasional yang dilakukan melalui pembangunan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional sebagaimana telah diatur dalam PP No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan.

Peningkatan kualitas dan efisiensi capaian sasaran pembangunan nasional dibutuhkan sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan dan penganggaran agar selaras dengan visi dan misi Presiden 5 tahun kedepan yang dituangkan dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dijabarkan per tahun dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP disusun menggunakan pendekatan tematik, holistik, intergratif dan spasial dengan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program*.

Harmonisasi antara belanja pusat dengan belanja daerah dilakukan dengan identifikasi menggunakan data realisasi dan capaian output dari belanja pusat dan belanja daerah kemudian dilakukan sinkronisasi data dan melakukan reviu keselarasan belanja.

Gambar 5.1 Harmonisasi/Efektivitas Program APBN dan APBD



Analisis tentang harmonisasi antara belanja pemerintah pusat dan daerah fokus kepada dua topik:

- Harmonisasi belanja K/L dengan DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa yang disalurkan oleh KPPN;
- Harmonisasi pelaksanaan anggaran *Major Project* (MP) Prioritas Nasional sesuai target RKP Tahun 2021 yang dikorelasikan dengan dukungan anggaran daerah.

5.2 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa

5.2.1 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik

5.2.1.1 Capaian *Output* dan Realisasi Anggaran

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional yang bertujuan untuk mendorong penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik, pemenuhan SPM, pencapaian Prioritas Nasional RKP, serta percepatan pembangunan daerah dan Kawasan.

DAK Fisik diutamakan bagi kegiatan yang dapat berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat yang dialokasikan berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik serta percepatan pembangunan aksesibilitas dan konektivitas daerah.

Harmonisasi antara Belanja K/L yang dilaksanakan oleh satker K/L dan DAK oleh SKPD tercipta sejak dari proses perencanaan dan penganggarannya. Oleh karena itu, pada tahap pelaksanaannya sudah seharusnya tercipta sinkronisasi yang mengarah pada tujuan yang sama.

Untuk melihat harmonisasi antara Belanja K/L dengan DAK Fisik terdapat beberapa kategori/bidang yang menjadi referensi untuk diperbandingkan antara Belanja K/L dengan DAK Fisik terkait capaian *output* dengan realisasi anggarannya. Bidang terpilih yang terkait infrastruktur yang dihasilkan atau menjadi output dari Belanja K/L maupun DAK Fisik.

Bidang yang akan dianalisis diantaranya pembangunan jalan, irigasi, sanitasi dan air minum yang didanai oleh Belanja K/L dan DAK Fisik. Reviu dilakukan untuk melihat keselarasan antara capaian *output* (volume dan satuan) belanja K/L dengan DAK Fisik, serta kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan harmonisasi antara belanja K/L dengan DAK Fisik sebagaimana di tampilkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik

Reviu Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik						
Kategori	K/L		Bidang	DAK Fisik		Hasil Reviu
	Capaian Output	Realisasi Anggaran (miliar Rp)		Capaian Output	Realisasi Anggaran (miliar Rp)	
Jalan (nasional)	1499 km	461,59	Penanganan Jalan (provinsi dan kabupaten)	145 km	334,65	Pembangunan jalan: K/L untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN) DAK Fisik untuk jalan regular dan pengembangan <i>food estate</i> dan sentra produksi



Reviu Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik

Kategori	K/L		Bidang	DAK Fisik		Hasil Reviu
	Capaian Output	Realisasi Anggaran (miliar Rp)		Capaian Output	Realisasi Anggaran (miliar Rp)	
						pangan di Pemda Kalsel, Banjar, Barito Kuala, Banjarmasin dan Banjarbaru. Telah selaras tidak terdapat duplikasi.
Irigasi	21 unit	38,20	Jaringan Irigasi	10,095 hektar	52,73	Belanja K/L untuk Pembangunan waduk <i>multipurpose</i> dan modernisasi irigasi di Tapin (PN) untuk memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar DAK Fisik untuk Pengembangan <i>food estate</i> dan sentra industri pangan. Telah selaras, tidak terdapat duplikasi.
Sanitasi	13 daerah	0,84	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	3447 unit	48,22	Belanja K/L untuk pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi (PN) dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman wilayah Kalimantan Selatan DAK Fisik untuk sanitasi di kabupaten Banjar, Barito Kuala dan Kota Banjarbaru. Telah selaras tidak terdapat duplikasi
Pasar	2 unit	2,64	Revitalisasi Pasar	—	—	Belanja K/L Pembangunan revitalisasi pasar rakyat (PN) untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Untuk DAK Fisik tidak ada program untuk pembangunan/revitalisasi pasar
UMKM	48 UMKM	1,18	Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	—	—	Belanja K/L untuk dukungan pemberdayaan UMKM, pendampingan, peningkatan kualitas SDM Usaha Mikro dan penguatan kewirausahaan UMKM untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN) Untuk DAK Fisik Tidak ada
Air Minum/ Air Baku	25.00 km	34,22	SPAM Jaringan Perpipaan	11,217 sambungan rumah	94,69	Pelaksanaan Bidang Air Minum telah selaras, (prasarana air baku tapin) untuk Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Reviu Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik

Kategori	K/L		Bidang	DAK Fisik		Hasil Reviu
	Capaian Output	Realisasi Anggaran (miliar Rp)		Capaian Output	Realisasi Anggaran (miliar Rp)	
						(PN), pengalokasiannya DAK Fisik air minum di Pemda Kalimantan Selatan, Banjar, Barito Kuala dan Banjar Baru, telah selaras
Industri	329 izin usaha 106 pendampingan	2,99	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	—	—	Belanja K/L untuk kewirausahaan, pemberdayaan, pendampingan, pelatihan untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN), DAK fisik tidak ada kegiatan
Kelautan dan Perikanan	5.905.631 ekor 144 unit	13,99	Perbenihan dan Sarpras Usaha Pembudidayaan Ikan	2.415 unit	12.35	Belanja K/L untuk peningkatan produksi perikanan untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN) Belanja DAK Fisik untuk pengembangan <i>food estate</i> dan industri pangan di Kalimantan Selatan, Banjar dan Barito Kuala telah selaras antara belanja K/L dan DAK Fisik
Kesehatan	12.500 paket	107,94	Kesehatan dan Keluarga Berencana, Obat-obatan dan sarpras puskesmas	2362	210.27	Belanja K/L digunakan untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi serta penurunan <i>stunting</i> (PN) untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing DAK Fisik untuk penguatan kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan bayi dan keluarga berencana di Kalimantan Selatan, Banjar, Barito Kuala, Banjarmasin dan Banjarbaru, telah selaras antara belanja K/L dan DAK Fisik
Lingkungan Hidup dan Hutan	365,54 unit	22,14	EWS Pengendalian Bencana Lingkungan Hidup	5 unit	6,31	Belanja K/L untuk ketahanan bencana, kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan hutan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan (PN) meningkatkan



Reviu Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik

Kategori	K/L		Bidang	DAK Fisik		Hasil Reviu
	Capaian Output	Realisasi Anggaran (miliar Rp)		Capaian Output	Realisasi Anggaran (miliar Rp)	
						sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memperkuat ketahanan ekonomi dan membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana, telah selaras antara belanja K/L dan DAK Fisik
Pendidikan	2500 unit	434,74	Revitalisasi Gedung Sekolah	1.583 unit	305,46	Belanja K/L digunakan untuk prioritas nasional meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing (PN) Belanja DAK Fisik untuk revitalisasi gedung sekolah, telah selaras antara belanja K/L dan DAK fisik
Pertanian	89.100 unit	38,91	Lumbung Balai Penyuluhan dan sarpras pasca panen	162 unit	71,65	Kegiatan belanja K/L bidang pertanian merupakan prioritas nasional untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN). Belanja DAK Fisik untuk pengembangan <i>food estate</i> dan sentra produksi pangan di Banjar, Banjarmasin dan Barito Kuala. Telah selaras antara belanja K/L dan DAK fisik
Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.184 unit	105,58	Perumahan dan permukiman	427 unit	8,96	Belanja K/L untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN), DAK Fisik berupa bantuan stimultan penyediaan rumah swadaya. Telah selaras antara belanja K/L dan DAK fisik

Sumber: Aplikasi MEBE dan OMSPAN (data diolah)

Anggaran DAK Fisik 2022 diarahkan mempertajam implementasi dalam rangka pencapaian *outcome* optimal, meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan, memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya.

Data realisasi dan capaian *output* Belanja K/L dihasilkan dari *input* satker K/L pada OMSPAN. Sedangkan capaian output DAK Fisik dihasilkan dari *input* yang dilakukan oleh Pemda pada OMSPAN. Keakuratan data capaian output tersebut bergantung pada keakuratan Satker K/L dan Pemda sesuai dengan progres penyelesaian kegiatan.

5.2.1.2 Analisis

1) Keselarasan antara Belanja K/L dengan DAK Fisik

Hasil revidi terkait keselarasan antara Belanja K/L dengan DAK Fisik, sebagai berikut:

- a. Bidang jalan memiliki satuan *output* yang sama baik pada Belanja K/L dan DAK Fisik yang dapat memudahkan dalam mengakumulasi data capaian *output* di wilayah Kalsel
- b. Kategori/bidang Irigasi dan Sanitasi memiliki satuan capaian *output* yang berbeda antara Belanja K/L dengan DAK Fisik, sehingga perlu dilakukan proses lebih lanjut untuk mendapatkan data capaian *output* yang akurat.
- c. Hasil *tracking analysis* menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada kategori belanja K/L dan bidang DAK Fisik di Kalimantan Selatan secara umum telah selaras penggunaannya untuk pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik. Hal ini memberikan pengaruh positif untuk pencapaian prioritas nasional penguatan perekonomian dan infrastruktur dasar. Namun terdapat beberapa kategori yang masih kurang selaras terkait satuan capaian.
- d. Adanya keselarasan kebijakan terkait penggunaan belanja pemerintah pusat dan penggunaan DAK Fisik dalam rangka meminimalisasi ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah pada level yang sama melalui pemerataan penyediaan infrastruktur serta percepatan pembangunan aksesibilitas dan konektivitas daerah pada lokasi yang terpisah.

2) Tantangan ke depan

Berdasarkan hasil harmonisasi antara Belanja K/L dengan DAK Fisik di wilayah Kalimantan Selatan, terdapat beberapa tantangan ke depan yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- a. Masih terdapat perbedaan satuan dalam satu karakteristik *output* yang sama.
- b. Data capaian *output* belanja K/L sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan keakuratan Satker K/L dan Pemda dalam mengisi capaian output dalam OMSPAN.

5.2.2 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Non Fisik

5.2.2.1 Capaian Output dan Realisasi Anggaran

Harmonisasi antara Belanja K/L dengan DAK Nonfisik, dilakukan dengan melihat realisasi dan capaian *output*. DAK Nonfisik tahun 2022 diarahkan untuk Dana Bantuan



Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Keselarasan. Identifikasi harmonisasi antara Belanja K/L dengan DAK Nonfisik sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Non Fisik

Kertas Kerja Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Non Fisik						
Kategori	K/L		Bidang	DAK NonFisik		Hasil Reviu
	Capaian Output	Realisasi Anggaran (miliar Rp)		Capaian Output	Realisasi Anggaran (miliar Rp)	
Belanja Sektor Pendidikan sumber	183 lembaga	434,74	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	631.466 siswa/4.015 sekolah kinerja	649,01	Belanja K/L untuk penyediaan dana bantuan operasional Perguruan Tinggi Negeri, peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi dan pembinaan bahasa dan sastra untuk revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dan meningkatkan sdm berkualitas dan berdaya saing (PN). Dana Bantuan operasional sekolah belanja K/L disalurkan untuk sekolah 99egular dan kinerja DAK Non Fisik Melalui KPPN Kotabaru, Barabai, Tanjung, Pelaihari dan Banjarmasin
			Bantuan operasional (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini	113.919 siswa/3.886 PAUD Penggerak	72,46	
			Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan	16.948 siswa/166 satuan pendidikan	28,65	

Sumber: Aplikasi MEBE dan OMSPAN (data diolah)

Rincian sebaran dana BOS di masing-masing tingkatan sekolah, BOS Reguler diberikan untuk membantu belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan Pendidikan dasar dan menengah dengan perhitungan jumlah peserta didik dikalikan dengan biaya satuan per peserta didik, BOS Kinerja dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dengan perhitungan alokasi jumlah satuan pendidikan berkinerja terbaik dikalikan dengan biaya satuan per jenjang Pendidikan dan BOS Afirmasi dialokasikan untuk mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan perhitungan alokasi sebesar jumlah satuan pendidikan pada daerah kriteria khusus dikalikan dengan biaya satuan per jenjang pendidikan.

5.2.2.2 Analisis

1) Keselarasan antara Belanja K/L dengan DAK Nonfisik

Berdasarkan hasil *tracking analysis* diketahui bahwa DAK Non Fisik di Kalimantan Selatan diarahkan untuk pembangunan kualitas SDM, dan hal tersebut sejalan dengan belanja satker K/L di Kalimantan Selatan. Dalam hal ini, anggaran belanja satker K/L

diarahkan pada Pendidikan tinggi, sedangkan alokasi belanja dalam DAK Non Fisik diarahkan untuk pembangunan pendidikan dasar dan menengah di Kalimantan Selatan. Realisasi anggaran pada dana BOS pada DAK Nonfisik juga selaras dengan sebaran murid dan sekolah untuk tiap-tiap tingkatan/jenjang sekolah. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kalimantan Selatan, arah alokasi DAK Non Fisik telah selaras dan memiliki pengaruh mengurangi gap yang terjadi antara target Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dengan kondisi Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) di Kalimantan Selatan.

2) Tantangan ke depan

Dengan melihat hasil harmonisasi antara Belanja K/L dengan DAK Nonfisik di Kalimantan Selatan, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bahwa Data capaian *output* BOS dan BOP memerlukan keakuratan dalam melakukan *input* data

5.2.3 Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa

5.2.3.1 Capaian *Output* dan Realisasi Anggaran

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan sejalan dengan PN dan prioritas daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan perekonomian desa, dan penggunaannya difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi desa melalui Bantuan Langsung Tunai Desa dan pengembangan sektor prioritas di desa seperti pengembangan desa digital dan desa wisata.

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Kewenangan Desa. Arah kebijakan Dana Desa tahun 2022 mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020-2024 antara lain: 1) Menyempurnakan formulasi pengalokasian Dana Desa melalui (a) penyesuaian bobot alokasi dasar, (b) peningkatan bobot alokasi formula termasuk internalisasi kebijakan insentif di dalamnya, serta (c) pemberian afirmasi secara proporsional kepada desa-desa sangat tertinggal; 2) Mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu berkurangnya 10.000 desa tertinggal dan meningkatnya 5.000 desa mandiri, mempercepat pengurangan kemiskinan perdesaan, berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa; dan 3) Mempercepat penyaluran dana desa melalui penyederhanaan regulasi dan administrasi dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka melihat harmonisasi antara Belanja K/L dengan Dana Desa, terdapat beberapa kategori/bidang yang dapat diperbandingkan antara Belanja K/L dengan Dana Desa terkait capaian output dengan realisasi anggarannya. Kategori/bidang yang dipilih



menjadi acuan adalah bidang infrastruktur yang dihasilkan dari Belanja K/L maupun Dana Desa.

Bidang yang akan dianalisis yaitu pembangunan atau pemeliharaan jalan, Irigasi Pasar, Air Minum/Air Bersih, Embung, dan desa siaga Kesehatan. Pelaksanaan harmonisasi antara Belanja K/L dengan Dana Desa sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa

Kertas Kerja Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa						
Kategori	K/L		Bidang	Dana Desa		Hasil Reviu
	Capaian Output	Realisasi Anggaran (miliar Rp)		Capaian Output	Realisasi Anggaran (miliar Rp)	
Jalan	1499 km	461,59	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan jalan usaha tani/jalan desa/jalan lingkungan pemukiman	7.181 meter	23,87	Pembangunan jalan: K/L untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN) Dana Desa pembangunan jalan di Kab Balangan, Batola, HSU, HSS, HST, Kotabaru, Tabalong, Tanah bumbu, tanah laut dan Tapin. Telah selaras tidak ada duplikasi
Jembatan	157.240.000 meter	119,12	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan jembatan milik desa	896 unit	7,31	Belanja K/L merupakan PN untuk memperkuat infrastruktur dan mengurangi kesenjangan untuk pemerataan Dana desa pembangunan jalan di Kab Balangan, Batola, HSU, HSS, HST, Kotabaru, Tabalong, Tanah bumbu, tanah laut dan Tapin. Telah selaras tidak ada duplikasi
Pasar	2 unit	2,64	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	3 unit	0,82	Belanja K/L Pembangunan revitalisasi pasar rakyat (PN) untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kertas Kerja Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa

Kategori	K/L		Bidang	Dana Desa		Hasil Reviu
	Capaian Output	Realisasi Anggaran (miliar Rp)		Capaian Output	Realisasi Anggaran (miliar Rp)	
						Pembangunan dan rehabilitasi pasar desa/kios di tapin dan kota baru. Telah selaras tidak ada dupliasi
Embung	9 unit	1,75	Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	1 unit	0,60	Belanja K/L untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Pembangunan/rehabilitasi embung desa di Banjar, Tabalong dan Tanah Bumbu. Telah selaras tidak ada dupliasi
Irigasi	21 Unit	38,20	Pembangunan saluran irigasi	19.168 hektar	3,94	Belanja K/L untuk Pembangunan waduk multipurpose dan modernisasi irigasi di Tapin (PN) untuk memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Dana Desa pembangunan dan pemeliharaan irigasi di Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tapin, HSS, HST, Batola, Tabalong, HSU dan Balangan. Telah selaras tidak ada dupliasi
Ketahanan bencana	2 unit	0,09	Penahan tanah	1.721 meter	1,15	Belanja K/L membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (PN) Dana desa untuk penanggulangan bencana di Barito Kuala. Telah selaras tidak ada dupliasi
Sarana Olah Raga	30.00 orang	1,58	Sarana Olah Raga	180 unit	2,59	Belanja K/L untuk Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN) Dana desa untuk pembangunan/



Kertas Kerja Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa

Kategori	K/L		Bidang	Dana Desa		Hasil Reviu
	Capaian Output	Realisasi Anggaran (miliar Rp)		Capaian Output	Realisasi Anggaran (miliar Rp)	
						pemeliharaan/rehabilitasi sarana olah raga dan pembinaan karang taruna di Kabupaten Banjar, Tanah laut, Tapin, HSS, Batola, Tabalong, HSU, Tanah Bumbu dan Balangan. Telah selaras tidak ada duplikasi
SPAM Air Bersih	25.00 km	34,22	Air Bersih	465 unit	9,56	Belanja K/L prasarana air baku tapin Dana Desa untuk pembangunan/rehabilitasi dan peningkatan air bersih di Banjar, Tanah Laut, Tapin, HSS, HST, Batola, Tabalong, Kotabaru dan Hulu Sungai Utara. Telah selaras tidak ada duplikasi
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	108 kk	7,17	Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.331 unit	6,52	Belanja K/L untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sistem pembuangan air limbah di Banjarmasin, Barabai dan Tanjung. Telah selaras tidak ada duplikasi
Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD Diknas Dikmen dan Dikmas	50 lembaga 3800 orang	87,01	Pendidikan Usia Dini (PAUD)	136 unit	49,82	Belanja K/L untuk Fasilitas dan pembinaan Lembaga untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN) Dana Desa untuk penyelenggaraan Paud di Kabupaten Banjar, Tanah Laut, HSS, HST, Tapin, Batola, Balangan. Telah selaras tidak ada duplikasi

Kertas Kerja Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa						
Kategori	K/L		Bidang	Dana Desa		Hasil Reviu
	Capaian Output	Realisasi Anggaran (miliar Rp)		Capaian Output	Realisasi Anggaran (miliar Rp)	
Sanitasi	13 daerah	0,84	MCK	496 unit	3,02	Belanja K/L untuk pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi (PN) dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman wilayah Kalimantan Selatan. Telah selaras tidak ada dupliasi
Kesehatan Ibu dan anak			Pondok Bersalin	845 unit	62,76	Dana desa pembangunan pondok bersalin untuk meningkatkan kesehatan Ibu dan anak.
Perlindungan sosial			BLT Desa	159.714 KPM	57,4	BLT desa bersifat wajib untuk perlindungan sosial
Desa Siaga Kesehatan			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.164 paket	29,14	Banjar, Tanah Laut, Tapin, HSS, HST, Batola, Tabalong, Kotabaru, HSU, tanah Bumbu, Balangan
Pencegahan stunting	3.00 paket	0,97	Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (<i>stunting</i>)	12.273 paket	8,12	Belanja K/L untuk penurunan kematian ibu dan bayi. Kegiatan Promotif dan Preventif Pencegahan <i>Stunting</i> Desa melalui Rumah Desa Sehat di Kabupaten Batola dan HSU. Telah selaras tidak ada dupliasi

Sumber: Aplikasi MEBE dan OMSPAN (data diolah)

Data-data realisasi dan capaian output tergantung pada keakuratan pengisian Satker K/L dan Pemda sesuai dengan progress penyelesaian kegiatan. Keterlambatan pengisian capaian *output* akan mengakibatkan data progres penyelesaian kegiatan menjadi tidak akurat.

5.2.3.2 Analisis

1) Keselarasan antara Belanja K/L dengan Dana Desa

Terdapat beberapa hasil reviu terkait keselarasan antara Belanja K/L dengan Dana Desa, sebagai berikut:



- a. Secara umum, berdasarkan kategori bidang yang dianalisis, antara Belanja K/L dengan Dana Desa di wilayah Kalimantan Selatan sudah selaras, walaupun terdapat beberapa kategori yang masih kurang selaras terkait satuan capaian.
- b. Perbedaan capaian output diantaranya bidang jalan, jembatan dan irigasi memiliki satuan output yang berbeda antara Belanja K/L dengan Dana Desa sehingga diperlukan proses lebih lanjut untuk mendapatkan data capaian output yang akurat.
- c. Penurunan *stunting* sudah dilaksanakan dan terealisasi di desa melalui perbaikan gizi serta pendampingan. Satker K/L di Kalimantan Selatan yang memiliki keterkaitan program dan kegiatan dengan pembangunan desa diantaranya meliputi satker Kementerian Kesehatan (BA029), BKKBN (BA068) dan Kementerian Pertanian (BA018). Dalam alokasinya, belanja satker-satker K/L tersebut lebih ditujukan untuk menurunkan angka *stunting*, perbaikan gizi dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi, hal ini diharapkan akan memberi pengaruh terhadap penurunan angka *stunting* di Kalimantan selatan.

2) Tantangan ke depan

Dengan melihat hasil harmonisasi antara Belanja K/L dengan Dana Desa di Kalimantan Selatan, terdapat beberapa tantangan ke depan yang perlu menjadi perhatian yaitu:

- a. Masih adanya perbedaan satuan dalam satu karakteristik *output* yang sama sehingga menyulitkan ketika dilakukan sinkronisasi untuk mendapatkan data capaian *output* yang valid
- b. Data capaian *output* belanja K/L sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan keakuratan dalam mengisi capaian *output* dalam OMSPAN.

5.3 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah Berbasis Prioritas Nasional pada RPJMN/RPJMD

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yaitu 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional diatas, tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan antara pemerintah kab/kota dengan pemerintah pusat dan pemprov. Sinkronisasi kebijakan

Pembangunan Daerah dengan rencana pembangunan lainnya dituangkan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunann nasional dan pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, serta pembangunan antar daerah. Pada Subbab ini akan dilakukan penyajian dan penjelasan hasil reuiu belanja pusat-daerah dengan 6 (enam) Prioritas Nasional (PN).

5.3.1 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)

Peningkatan kualitas investasi dan inovasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Di Kalimantan Selatan terdapat 2 *Major Project* sebagai berikut:

Tabel 5.4 Harmonisasi Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Prioritas Nasional	Major Project	Target 2022	Belanja Pusat (K/L)	Lokasi	Capaian Belanja Pusat	Capaian Belanja Daerah	Hasil Reviu
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Industri 4.0 di 6 Sub-Sektor Prioritas: makanan dan minuman, tekstil, kimia dan farmasi, elektronik otomotif, dan alat kesehatan	Pertumbuhan PDB industri pengolahan sebesar 5,3 - 5,7 persen Kontribusi PDB Industri Pengolahan sebesar 19,9 – 20,0 persen Meningkatnya nilai ekspor produk industri berteknologi tinggi 153,7 miliar US\$ Pertumbuhan ekspor industri berteknologi tinggi 8,2-10,1 persen	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kalsel	Capaian output proyek 1 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp175 juta dari pagu 175 juta	-	Belanja K/L sudah mengalokasikan untuk peningkatan sektor makanan dengan cara melakukan pengawasan mutu. Belanja daerah sudah teralokasi seluruh Pemda
	2. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter 10 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	1 Unit Smelter konsentrat besi di Kalsel	-	Kalsel	-	-	Pembangunan smelter nikel di Kabupaten Tanah Bumbu di atas lahan seluas 329 hektar atau masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) milik Jhonlin Group

Sumber: OMSPAN (diolah)



Kegiatan Prioritas Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0 dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangan melalui peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan.

Kegiatan dalam rangka pengembangan industri 4.0 di daerah capaian output dan realisasinya belum dapat teridentifikasi dalam RPJMD dan RKPD Provinsi Kalsel maupun Kab/Kota di wilayah Kalsel. Sehingga tidak dapat dilakukan harmonisasi antara belanja pusat dan daerah di Kalsel untuk *Major Project* PN 1.

5.3.2 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan inklusif dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah; dan 3) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim. Kalimantan Selatan terdapat 1 *Major Project* yang mendukung pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan yaitu pada belanja K/L terdapat Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM) Banjarmasin dengan output berbentuk Publikasi Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) namun dihentikan pelaksanaannya sedangkan belanja Pemerintah Daerah belum dapat teridentifikasi di RPJMD dan RKPD.

Tabel 5.5 Harmonisasi Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Prioritas Nasional	Major Project	Target 2022	Belanja Pusat (K/L)	Lokasi	Capaian Belanja Pusat	Capaian Belanja Daerah	Hasil Reviu
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan fokus pembangunan IKN dan kota besar penyangga, Wilayah Metropolitan (WM): Banjarmasin, Kota Baru Tanjung Selor, Pontianak, Singkawang, Palangkaraya, Tarakan	Publikasi/ Laporan Metropolitan Statistical Area (MAS)	Publikasi Laporan Metropolitan Statistical Area (MAS)	Pemprov Kalsel, Kota BJM, Kota Bjb, Kab. Banjar, Kab. Bartola, dan Kab Tanah Laut	-	-	Kegiatan dihentikan pelaksanaannya

Sumber: OMSPAN (diolah)

5.3.3 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM dapat terlihat dari manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Terdapat 4 *Major Project* (MP) di Kalimantan Selatan yang mendukung peningkatan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing salah satunya melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0.

Tabel 5.6 Harmonisasi Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Prioritas Nasional	Major Project	Target 2022	Belanja Pusat (K/L)	Lokasi	Capaian Belanja Pusat	Capaian Belanja Daerah	Hasil Reviu
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Project Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i>	AKI turun menjadi 205/100.000 kelahiran hidup di 320 kab/kota Menurunkan prevalensi <i>stunting</i> pada balita menjadi 18,40% pada tahun 2022 di 514 kab/kota	Kemenkes, BKKBN, Pemda	Kalsel dan Kota Bjm	Terdapat beberapa subkegiatan yang terkait dengan <i>project</i> percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi realisasi 1,2 miliar, penurunan <i>stunting</i> dengan capaian <i>output</i> total 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp12,5 miliar dari total pagu yang tersedia sebesar Rp13,2 miliar	Capaian <i>output</i> subbidang percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi sebesar 81,97 persen realisasi 35,9 miliar, pengendalian penduduk dan keluarga mencapai 99,87% dengan realisasi anggaran sebesar Rp8,4 miliar dari total pagu yang tersedia sebesar Rp92,1 miliar.	Sudah Selaras, untuk project percepatan penurunan kematian ibu dan <i>stunting</i> teralokasi pada belanja K/L.
	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Meningkatkan lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun sebesar 41,92 Meningkatkan proporsi tenaga kerja berkeahlian menengah dan	Kemendikbud-ristek dan Kemenaker	Kalsel	Capaian <i>output</i> proyek sebesar 84,76% dengan realisasi anggaran sebesar Rp38,7 Miliar dari total pagu yang tersedia sebesar		Belanja daerah belum teridentifikasi



Prioritas Nasional	Major Project	Target 2022	Belanja Pusat (K/L)	Lokasi	Capaian Belanja Pusat	Capaian Belanja Daerah	Hasil Reviu
		tinggi sebesar 41,92%			Rp39,09 Miliar.		
	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Tingkat kemiskinan 8,5-9 persen Proporsi penduduk yang tercakup program jaminan sosial 50 persen RT miskin dan rentan dengan akses layanan keuangan 60 persen Data sosial ekonomi, ketersediaan layanan dan infrastruktur digital	Bappeda, Dinsos, Dukcapil, Dinas PMD, dan BPS Pemerintah Desa/ kelurahan	Kalsel	Capaian <i>output</i> proyek sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp51,6 Miliar dari total pagu yang tersedia sebesar Rp52,4 Miliar.		Belanja daerah belum teridentifikasi kasi
	Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	Memperkuat sistem kesehatan nasional untuk memperkuat upaya promotif dan preventif (meningkatkan ketahanan kesehatan (<i>health security</i>) serta pemenuhan sumber daya kesehatan (sarpras, farmasi, dan alkes) dan tenaga kesehatan.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan. (Kemenkes, Kemendikbudristek, BPOM, Kemen PUPR, Pemda)	Pemprov Kalsel, Kota Bjm, dan Kota Bjb	Capaian <i>output</i> proyek telah mencapai 88,20% dengan realisasi anggaran sebesar Rp58,4 Miliar dari pagu yang tersedia sebesar Rp63,03 Miliar.	Teralokasi disemua Pemda dengan capaian output subbidang kesehatan mencapai 79,39% dengan realisasi anggaran sebesar Rp4,57 triliun dari pagu yang tersedia sebesar Rp5,66 triliun.	Sudah Selaras meskipun terdapat wilayah yang sama namun <i>output</i> kegiatan nya berbeda.

Sumber: OMSPAN (diolah)

Penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi dan percepatan penurunan *stunting* serta keluarga berencana di Pemda Kalsel, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kota Banjarmasin, Kab. Kotabaru, Kab. Tanah Bumbu, Kab. tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Tabalong, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Balangan dan Kab. Tanah Laut. dilaksanakan oleh satker lingkup Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN. Untuk belanja daerah dalam rangka penanganan *stunting* diidentifikasi terhadap belanja daerah yang bersumber dari DAK Fisik.

Apabila dilihat dari karakteristik Belanja K/L, kegiatan dalam rangka penurunan *stunting* dilaksanakan melalui:

Tabel 5.7 Belanja K/L untuk Penurunan *Stunting*

Proyek Prioritas	Capaian output		Realisasi
Revitalasi Posyandu	Kelompok Masyarakat	1,00	Revitalasi Posyandu
Kampanye Gemarikan yang dilaksanakan oleh daerah (Dekonsentrasi)	Promosi	1,00	Kampanye Gemarikan yang dilaksanakan oleh daerah (Dekonsentrasi)
KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Orang	1.472,00	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT
Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	Sampel	110,00	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT
KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Orang	640,00	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT
KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Orang	714,00	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT
Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus <i>Stunting</i> provinsi	Rekomendasi Kebijakan	2,00	Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus <i>Stunting</i> provinsi
Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Provinsi dan kab/kota	Kegiatan	14,00	Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Provinsi dan kab/kota
Pelaksanaan layanan Audit <i>Stunting</i> Manajemen Kasus <i>Stunting</i> Kab/Kota dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes	Kab/Kota	13,00	Pelaksanaan layanan Audit <i>Stunting</i> Manajemen Kasus <i>Stunting</i> Kab/Kota dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes
PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitas dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Kelompok Masyarakat	655,00	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitas dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu
Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HPK	Keluarga	115.118,00	Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HPK
Data kasus <i>stunting</i> dan keluarga resiko <i>stunting</i> yang terverifikasi	Layanan	1,00	Data kasus <i>stunting</i> dan keluarga resiko <i>stunting</i> yang terverifikasi
Kampanye Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Provinsi dan kab/kota	Layanan	1,00	Kampanye Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Provinsi dan kab/kota
Pelatihan dan <i>Refreshing</i> dalam rangka percepatan penurunan <i>stunting</i>	Orang	9.383,00	Pelatihan dan <i>Refreshing</i> dalam rangka percepatan penurunan <i>stunting</i>
Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan <i>stunting</i>	Daerah (Prov/Kab/Kota)	13,00	Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan <i>stunting</i>
Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Provinsi	Kegiatan	1,00	Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Provinsi
Layanan Humas Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Provinsi	Layanan	1,00	Layanan Humas Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Provinsi

Sumber: OMSPAN (diolah)



5.3.4 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)

Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan di Kalimantan Selatan untuk mendukung beberapa *Major Project* Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*.

Tabel 5.8 Harmonisasi Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Prioritas Nasional	Major Project	Target 2022	Belanja Pusat (K/L)	Lokasi	Capaian Belanja Pusat	Capaian Belanja Daerah	Hasil Reviu
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i>	Penyiapan kehidupan berkeluarga dan bimbingan perkawinan calon pengantin	Kementerian agama, BKKBN	Kalsel	Capaian <i>output</i> proyek sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp481 juta dari total pagu Rp481 juta.	-	Belanja daerah belum terindenti fikasi

Sumber: OMSPAN (diolah)

5.3.5 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional dengan cara: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan infrastruktur perkotaan; dan 3) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan. Kalimantan Selatan telah mengalokasikan proyek yang mendukung hal tersebut yaitu adanya fasilitas dan pembinaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Tabel 5.9 Harmonisasi Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Prioritas Nasional	Major Project	Target 2022	Belanja Pusat (K/L)	Lokasi	Capaian Belanja Pusat	Capaian Belanja Daerah	Hasil Reviu
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Rumah Susun Perkotaan	Rumah susun Perkotaan (1 Juta)	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Rumah Susun Hunian ASN/TNI/ POLRI (KemenPUPR)	Kota Bjm	Capaian <i>output</i> proyek sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp50,01 Miliar dari total pagu yang tersedia sebesar Rp50,12 Miliar.	Seluruh Pemda Kalsel teralokasi subbidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan capaian <i>output</i> mencapai 87,67%	Masih terdapat kesamaan belanja di satu wilayah yakni Pemda Kota Bjm. Namun untuk belanja daerah tidak dapat terlihat diwilayah tepatnya.

Prioritas Nasional	Major Project	Target 2022	Belanja Pusat (K/L)	Lokasi	Capaian Belanja Pusat	Capaian Belanja Daerah	Hasil Reviu
						dengan realisasi anggaran sebesar Rp308,34 miliar dari total pagu yang tersedia sebesar Rp344,87 miliar.	
	Akses Air Minum Perpipaan (10 juta Sambungan Rumah)	Meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan 25,57 persen Akses air minum aman dengan standar kesehatan 13,45 persen	Pengembangan sistem penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman Kemen PUPR, Pemda, dan KPBU	Kalsel dan Kota Bjm	Capaian output proyek sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp58,47 Miliar dari total pagu yang tersedia sebesar Rp58,06 Miliar.	Seluruh Pemda Kalsel teralokasi subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan capaian output mencapai 79,98% dengan realisasi anggaran sebesar Rp2,98 triliun dari total pagu yang tersedia sebesar Rp3,64 triliun.	Belanja akses air minum perpipaan dilakukan seluruhnya oleh Pemda.
	Waduk Multiguna	Tersedianya pasokan air minum dari waduk 23,5 m2/det, pasokan air, listrik, mereduksi risiko banjir	Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi Bendungan Riam Kiwa yang dibangun (Kementerian PUPR)	Waduk Riam Kiwa	Capaian output proyek sebesar 80% dengan realisasi anggaran sebesar Rp61,4 Miliar dari total pagu yang tersedia sebesar Rp61,4 Miliar. Pekerjaan belum selesai dan perpanjangan waktu 90 hari dengan denda	Belum teralokasi pada Pemda Kalsel di tahun 2022	
	Pembangkit listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS, dan Gardu Induk 38.000 MVA	Meningkatkan akses, keandalan, dan keberlanjutan tenaga listrik: Rasio listrik 100 persen, pemenuhan kebutuhan konsumsi listrik 1.268 kW/h, penurunan	-	Kalsel	Sudah teralokasikan pada RPJMN namun ditahun 2022 tidak berada di Kalsel	Belum teralokasi pada Pemda Kalsel di tahun 2021	



Prioritas Nasional	Major Project	Target 2022	Belanja Pusat (K/L)	Lokasi	Capaian Belanja Pusat	Capaian Belanja Daerah	Hasil Reviu
		gas GRK sektor energi 91 juta ton					
	Pipa gas bumi trans Kalimantan (2.219 km)		Badan Usaha	Bontang-Bjm dan Bjm-Palangka raya	Sudah teralokasikan pada RPJMN namun ditahun 2022 tidak berada di Kalsel		
	Transformasi digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK 9,8-10 persen Meningkatnya kecamatan terjangkau jaringan serat optik, instansi pemerintah, pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK, Digitalisasi dan meningkatnya <i>global cyber security</i> 0,826	Kemenkominfo	Kalsel	Sudah teralokasikan pada RPJMN namun ditahun 2022 tidak berada di Kalsel		Di tahun 2021 belum teralokasi dikedua jenis belanja.

Sumber: OMSPAN (diolah)

5.3.6 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim di Kalimantan Selatan diarahkan melalui peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Tabel 5.10 Harmonisasi Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Prioritas Nasional	Major Project	Target 2022	Belanja Pusat (K/L)	Lokasi	Capaian Belanja Pusat	Capaian Belanja Daerah	Hasil Reviu
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Menurunkan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim sebesar 0,91 persen	BMKG	Kalsel	Sudah teralokasikan pada RPJMN namun ditahun 2022 tidak berada di Kalsel	Belum teralokasi pada Pemda Kalsel di tahun 2021	Di tahun 2021 belum teralokasi dikedua jenis belanja.

Sumber: OMSPAN (diolah)

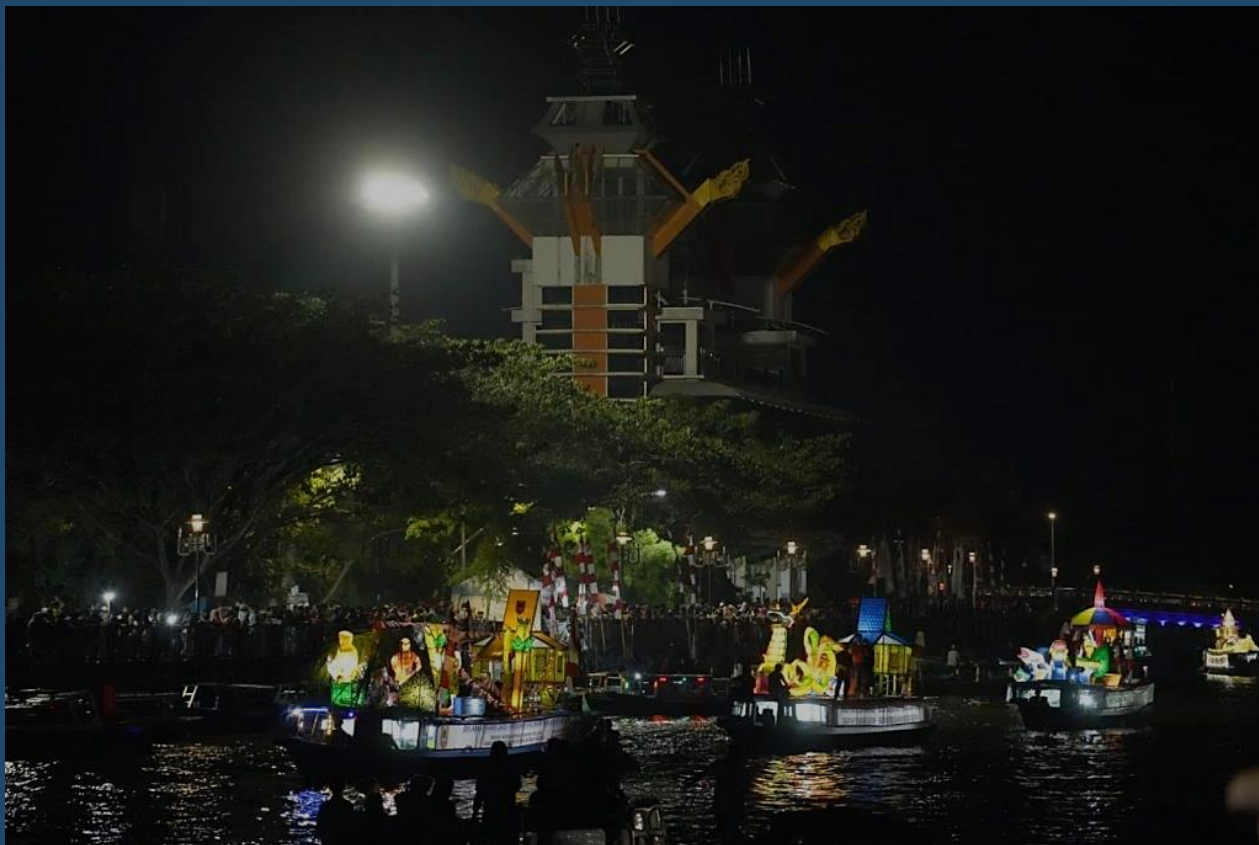
5.3.7 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan Negara antara lain dalam bentuk: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber. Sementara seluruh proyek belum teralokasi di Kalimantan Selatan, semua proyek masih berlokasi di Pusat.



Bab VI

Kesimpulan dan Rekomendasi



Festival Budaya Pasar Terapung **12-15 Agustus 2022**

“ Festival Budaya Pasar Terapung merupakan acara yang diselenggarakan guna menampilkan kekayaan budaya Banjar dan kearifan lokalnya yang telah dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Atraksi di tengah pasar terapung menggunakan jukung sebagai sarana transportasi. Festival ini merupakan media yang baik untuk mengangkat tradisi ekonomi, kerajinan bahkan pengembangan budaya sungai. Tujuan dilaksanakannya festival wisata budaya pasar terapung ini adalah dalam rangka meramaikan kegiatan hari jadi ke-72 Provinsi Kalimantan Selatan yang dipusatkan di kawasan Siring Kilometer 0 Kota Banjarmasin. Acara ini juga turut serta membangkitkan kembali para pelaku ekonomi kreatif dan meningkatkan pembangunan sektor wisata di Banua. ”



6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada dari bab-bab terdahulu, beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan *highlight* meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur Sejahtera Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibu Kota Negara. Dan untuk mewujudkan visi tersebut memiliki lima misi yaitu: Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berbudi pekerti luhur, Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, Memperkuat sarana dan prasarana dasar perekonomian, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik, dan Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan bencana. Namun dalam pelaksanaannya Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi banyak tantangan, antara lain Tantangan Ekonomi Daerah, Tantangan Sosial Kependudukan, Tantangan Geografi Wilayah, Tantangan Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Daerah.
2. Pada tahun 2022, kondisi perekonomian global mengalami berbagai guncangan dan tantangan, seperti adanya gejolak geopolitik dan ketidaksesuaian penawaran-permintaan yang kemudian memperlambat prospek ekonomi global. Kondisi ini mengakibatkan kekhawatiran pada ekonomi di Indonesia yang juga berimbas pada Kalimantan Selatan. Pada triwulan IV tahun 2022, ekonomi di Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,32% (*y-o-y*), -0,28% (*q-to-q*), dan 5,11% (*c-to-c*). Pertumbuhan ekonomi tersebut melambat dari periode sebelumnya. Dalam kondisi ini, inflasi di Kalimantan Selatan akhir tahun 2022 melonjak naik hingga mencapai 6,99% (*year-on-year*) atau melebihi angka nasional. Angka inflasi yang naik secara global ini kemudian direspon oleh bank sentral di berbagai negara untuk menaikkan suku bunga acuan, tak terkecuali Bank Indonesia yang juga menaikkan suku bunga BI7DRR hingga Desember tahun 2022 menjadi sebesar 5,50%. Kondisi inflasi yang mengkhawatirkan berbagai negara kemudian juga berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang dan neraca perdagangan seperti di Kalimantan Selatan.
3. Pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami kemajuan yang hingga pada tahun 2022 telah mencapai 71,84, walaupun angka tersebut masih rendah dari angka nasional. Kesejahteraan di Kalimantan Selatan yang diukur dengan tingkat kemiskinan masih tergolong baik dengan tingkat kemiskinan nomor 2 terendah di Indonesia, *gini ratio* yang juga turut mengalami penurunan menunjukkan pemerataan, dan tingkat pengangguran yang turut menurun dari periode sebelumnya. Namun demikian, Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2022 ini cenderung menurun dari tahun sebelumnya.

4. Secara agregat, realisasi pendapatan negara pada tahun 2022 di Kalimantan Selatan telah mencapai 125% dari pagu dan mengalami kenaikan hingga 53,51% dari tahun 2021. Pencapaian ini utamanya didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi di Kalimantan Selatan dan adanya *windfall effect* terhadap ekspor di Kalimantan Selatan dari kenaikan harga komoditas pertambangan. Dari sisi belanja, realisasi telah mencapai 118% dari pagu dan mengalami pertumbuhan 28,76% dari tahun sebelumnya yang didorong oleh belanja Transfer ke Daerah (TKD). Di sisi lain, komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mengalami penurunan yang disebabkan adanya (1) realokasi pagu, penambahan pagu, dan penambahan satker baru pada akhir tahun anggaran, (2) keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena perubahan nomenklatur K/L dan proses kontrak payung yang memerlukan waktu lama, (3) gangguan cuaca pada pekerjaan fisik dan wabah PMK yang belum reda pada penyaluran bantuan pemerintah, dan (4) proses revisi blokir AA pada belanja modal yang belum selesai dan bernilai signifikan.
5. Capaian pendapatan APBD oleh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan menunjukkan realisasi 101,29% dari pagu dan tumbuh sebesar 26,33% dari tahun 2021. Komponen pendapatan ini masih didominasi oleh pendapatan dari dana transfer yang menunjukkan bahwa pendapatan dari dana transfer yang diberikan Pemerintah Pusat masih menjadi penopang utama pada APBD di Kalimantan Selatan. Dari sisi belanja, realisasi belanja daerah telah mencapai 83,69% dari pagu dan mengalami kenaikan 8,59% dari tahun sebelumnya. Realisasi belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi sehingga masih belum difokuskan untuk pembangunan daerah secara langsung. Di sisi lain, komponen belanja modal masih terealisasi 76,25% dari pagu, pencapaian yang belum optimal ini disebabkan hal-hal seperti terhambatnya proses pelaksanaan lelang (gagal lelang, jangka waktu yang pendek), peran BUD yang tidak menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi dengan optimal, dan adanya pembatasan penggunaan barang impor terkait kandungan TKDN untuk PBJ, sementara barang yang dibutuhkan belum tersedia di *e-catalog*.
6. Isu strategis APBN dan APBD di Kalimantan Selatan secara ringkas meliputi hal-hal sebagai berikut:
APBN
 - a. Penyelesaian revisi *Automatic Adjustment* (AA) yang menyebabkan penundaan penarikan dana sehingga menghambat pelaksanaan anggaran.
 - b. Belum efektifnya implementasi kontrak Pra DIPA.
 - c. Penyelesaian kontrak payung yang membutuhkan waktu lama di tingkat pusat dan hingga akhir tahun belum dapat dituntaskan.
 - d. Keterbatasan jumlah vendor di lapangan menyebabkan kesulitan dalam menentukan penyedia barang atau jasa.



- e. Merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjadi kendala pengadaan hewan untuk bantuan pemerintah.
 - f. Belum efektifnya pemanfaatan *Digipay* serta KKP di lapangan, serta implementasi SAKTI *full module* masih ditemui ketidaklancaran pada beberapa satuan kerja.
 - g. *Internal management* di Pemda ikut mempengaruhi turunnya kinerja realisasi DAK Fisik. Beberapa faktor diantaranya berupa pergantian Kepala Daerah, pejabat pengadaan, dan operator SAKTI, serta adanya reorganisasi secara masif di Pemda.
 - h. Optimalisasi koordinasi dan sinergi dengan satker K/L pengelola anggaran belanja. Hal tersebut diperlukan sebagai *early warning system* bagi Satker terkait *deadline* pelaksanaan anggaran, yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, lokakarya atau FGD via daring maupun luring kepada Satker yang memiliki realisasi dan IKPA rendah agar diketahui latar belakang penyebab dari rendahnya realisasi dan IKPA Satker yang bersangkutan.
 - i. Tingkat kemandirian fiskal yang masih belum optimal dalam penyediaan sumber pendanaan pembangunan.
 - j. Proporsi penyerapan anggaran yang kurang optimal yaitu penyerapan yang rendah di awal dan menumpuk di akhir tahun anggaran.
 - k. Masih tingginya proporsi belanja operasional (penunjang) sehingga belum dapat mengoptimalkan percepatan pembangunan.
 - l. Belum optimalnya sinkronisasi anggaran daerah dan sasaran pembangunan nasional.
 - m. Belum optimalnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran pembangunan.
7. Hasil pemetaan terhadap sektor unggulan dan potensial di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa:
- a. Sektor Pertambangan dan Penggalian Kalimantan Selatan merupakan sektor ekonomi basis yang potensial untuk dikembangkan, sedangkan sektor Jasa Kesehatan tidak lagi menjadi sektor yang tumbuh cepat di tahun 2022 seiring era *new normal* dimana kasus pandemi Covid-19 telah ditanggulangi oleh Pemerintah dengan baik. Meskipun sektor Pertambangan dan penggalian merupakan “*sunset industry*”, namun hingga tahun 2022 masih menjadi penopang utama ekonomi Kalimantan Selatan.
 - b. Sektor pertambangan dan penggalian menyediakan peluang investasi hilirisasi batubara untuk meningkatkan nilai ekonomis dari batubara seperti gasifikasi untuk menghasilkan Dimethyl Ether (DME) agar tercapai target *Sustainable Development Goals* (SDG) dan penurunan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari komitmen dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC). Diproyeksikan hilirisasi ini

menjadikan industri pengolahan menjadi sektor basis di tahun 2023. Sejalan dengan hilirisasi hasil ekstraktif sumber daya alam batubara dan kelapa sawit (*green economy*), yang diantaranya berupa pembangunan industri pengolahan biodiesel, industri pengolahan DME, maupun industri pengolahan minyak goreng.

8. Hasil *tracking analysis* secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan antara Pusat dan Daerah telah selaras walaupun terdapat beberapa kategori yang masih kurang selaras terkait satuan capaian.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi hasil analisis aspek-aspek fiskal regional berikut:

6.2.1 Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat

1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran

Penganggaran yang kurang akurat, yaitu ketika alokasi dana lebih besar dari standar biaya menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran, sementara di satu sisi dalam kebijakan SMART DJA menuntut efisiensi sebagai penilaian. Hal ini membuat kontradiksi, untuk itu perlu dilakukan harmonisasi yang jelas antara kebijakan penganggaran, penyerapan anggaran dan efisiensi anggaran.

2. Aspek Pendapatan Negara dan daerah

- a. Pemanfaatan sektor potensial agar lebih ditingkatkan baik melalui dukungan kebijakan maupun fiskal demi mewujudkan cita-cita prioritas nasional.
- b. Diperlukan upaya yang lebih dalam mewujudkan hilirisasi sektor unggulan yang bersumber dari sumber daya alam *non-renewable* melalui regulasi dan pengawasan yang lebih tegas dan intensif.
- c. Perlu dibangun sistem aplikasi untuk pembukuan bendahara di pemerintah daerah yang ter-interkoneksi dengan Kanal 7020 sehingga tidak hanya memudahkan pembukuan bendahara, tetapi secara *online* dapat memudahkan akses *billing* pajak dan penyetoran pajak.

3. Aspek Belanja Negara dan Daerah

- a. Isu *stunting* masih tinggi di Kalimantan Selatan, bahkan berada di peringkat ke-6 tertinggi secara nasional dan upaya yang dilakukan masih lambat penurunannya. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi efektivitas alokasi anggaran pada satuan kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik serta sinerginya dengan Pemerintah Daerah.
- b. Banyak dan lamanya proses *Automatic Adjustment* menjadi kendala dominan dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan analisis Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dari hasil survei dan *one-on-one meeting*, sehingga eksekusi



belanja menjadi terhambat. Selain itu kebijakan *Automatic Adjustment* secara implisit tidak sesuai dengan prinsip spesialisasi dalam Keuangan Negara, yang mengharuskan semua alokasi harus jelas peruntukan, dan cadangan umum pemerintah hanya ada pada anggaran Bendahara Umum Negara. Untuk itu perlu dievaluasi ulang kebijakan *Automatic Adjustment* yang tidak menghambat proses eksekusi belanja dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan negara.

- c. Diperlukan evaluasi implementasi pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri yang telah dipergunakan seluruh Pemerintah Daerah mulai tahun 2021. Hal ini dikarenakan aplikasi SIPD tersebut masih belum sempurna dan stabil sehingga mengganggu proses pelaksanaan APBD dan beresiko menurunnya kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- d. Kementerian Dalam Negeri agar melakukan evaluasi pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mampu melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)/ketentuan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
- e. Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam penerapan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) membuat keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran daerah, karena harus menggunakan *e-catalog* lokal, sementara perkembangan *e-catalog* lokal berjalan lambat, untuk itu perlu adanya *exit clause* bagi Pemda agar memiliki fleksibilitas dalam menentukan proses pengadaan barang/jasa nya.
- f. Diperlukan penyeragaman satuan target dan capaian terhadap output-output dengan karakteristik yang sama baik Belanja K/L maupun DAK Fisik.
- g. Perlunya perubahan pola penghitungan inflasi yang dapat menggambarkan keadaan di semua kabupaten/kota, sehingga fokus yang awalnya pengendalian inflasi hanya untuk kabupaten/kota tertentu jadi dapat merata di semua kabupaten/kota.

6.2.2 Rekomendasi untuk Satuan kerja K/L

1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran

Satker K/L di daerah agar lebih fokus terhadap rencana kerja yang telah dialokasikan sehingga persentase realisasi lebih maksimal serta peningkatan dukungan program maupun kegiatan yang menunjang prioritas nasional lebih diutamakan.

2. Aspek Belanja Negara dan daerah

- a. Satker K/L agar akurat dalam melakukan pengisian capaian output, sehingga progres capaian output dapat tersedia secara *real time*.
- b. Verifikasi terhadap sekolah maupun lembaga yang akan menerima Dana BOS maupun BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang dilakukan Kemendikbudristek, agar dilakukan dengan akurasi tinggi.

6.2.3 Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

1. Aspek Pendapatan Negara dan Daerah

- a. Tingkat kemandirian fiskal yang masih belum optimal dalam penyediaan sumber pendanaan pembangunan, sehingga diperlukan langkah-langkah inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan digitalisasi dan peluang dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
- b. Belum optimalnya sinkronisasi anggaran daerah dan sasaran pembangunan nasional, sehingga diperlukan peningkatan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga di daerah serta mengefektifkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- c. Perlunya percepatan transformasi struktur ekonomi di Kalimantan Selatan dengan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata maupun industri pengolahan agar perekonomian di Kalimantan Selatan tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan seperti batu bara yang merupakan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui dan terbatas.
- d. Perlunya mendorong setiap Satuan Kerja Pusat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota secara serentak melakukan pembinaan UMKM, minimal masing-masing lima UMKM yang di bawah koordinasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga menjadi agenda nasional dan besar yang mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- e. Peran Kanwil DJPb dalam memberikan asistensi pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dinilai duplikasi dengan peran BPKAD dan Biro Perekonomian. Untuk itu perlu penguatan regulasi peran asistensi pembinaan BLUD yang bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri.
- f. Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi satu di antara terobosan transformasi struktur ekonomi di Kalimantan Selatan yang masih ketergantungan dengan sumber daya alam. Salah satu digitalisasi UMKM adalah *Digipay* yang dapat diadopsi pada Pemerintah Daerah. Untuk itu, diperlukan usulan agar program ini dapat didukung infrastruktur aplikasi sehingga dapat digunakan oleh Bank Daerah sebagai tempat penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam implementasi *Digipay* di Pemerintah Daerah.



- g. Pemerintah daerah diharapkan agar dapat mendorong pembangunan dan pengembangan industri hilirisasi batu bara agar dapat menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, termasuk untuk substitusi impor, penciptaan lapangan kerja, dan sekaligus transisi energi bersih (*green economy*).

2. Aspek Belanja Negara dan daerah

- a. Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan peran dan kewenangan BPKAD selaku BUD yang tidak hanya sebagai kasir tetapi juga melakukan fungsi *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan APBD dan sekaligus menilai kinerja pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan demikian, maka tercipta *early warning system* terhadap berbagai kendala yang dapat mengganggu pelaksanaan anggaran dan dapat segera diatasi segera. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah juga dapat mengadopsi teknis/cara yang dilakukan Kanwil DJPb dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi seperti *Spending Review*, Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA), dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
- b. Masih tingginya proporsi belanja operasional (penunjang) sehingga belum dapat mengoptimalkan percepatan pembangunan. Dalam hal ini, diperlukan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam operasional, sehingga dapat mengurangi pekerjaan yang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh TI.
- c. Belum optimalnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan kajian efektivitas dan efisiensi sebagai dasar dalam ketepatan sasaran alokasi belanja.
- d. Perlu perbaikan tata kelola keuangan daerah untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBD di awal tahun, khususnya dalam pengelolaan kontrak untuk mendorong realisasi dan kemudahan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa.
- e. Perlunya dorongan digitalisasi pelaksanaan anggaran daerah melalui penerapan Kartu Kredit Pemerintah di Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan perbaikan tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif.
- f. Pemda sebagai penanggung jawab kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangan otonomi daerah agar lebih memaksimalkan dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat guna memanfaatkan sektor potensial yang ada pada daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak di sektor potensial.

- g. Pemda agar disiplin dan akurat menyampaikan data pendukung penyerapan DAK Fisik agar data-data terkait capaian output maupun realisasi DAK Fisik akurat sehingga dapat menjadi pendukung kebijakan pemerintah pusat.
- h. Untuk pengendalian inflasi yang lebih masif oleh pemerintah daerah, perlu kiranya dilanjutkan kebijakan penggunaan belanja wajib 2% dan belanja BTT pada alokasi TKD dan APBD di tahun 2023 untuk kebutuhan rencana aksi pengendalian inflasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota.
- i. Penyumbang inflasi terbesar di Kalimantan Selatan adalah kenaikan harga beras, khususnya beras lokal. Inflasi pada komoditas beras disebabkan oleh keterbatasan pasokan akibat beras lokal yang hanya panen satu kali setahun. Hal ini dapat berkontribusi pada ketidakcukupan ketahanan pangan. Untuk itu perlu adanya riset/penelitian terhadap produktivitas beras lokal agar dapat dipanen lebih dari satu kali dalam setahun.
- j. Pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah hanya fokus pada kabupaten/kota yang menjadi sampel daerah inflasi, sementara pada kabupaten/kota lainnya belum begitu diperhatikan, padahal daerah tersebut juga terdampak kenaikan harga yang berimbas kepada masyarakat.
- k. Dalam rangka efektifitas penguatan program pengendalian inflasi daerah perlu didorong kerja sama antar daerah dan sinkronisasi kebijakan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai fasilitator, sehingga program-program dapat lebih terarah dan tidak tumpang tindih.
- l. Diperlukan langkah-langkah yang lebih agresif terhadap pengendalian inflasi daerah di Kalimantan Selatan terutama memasuki tahun 2023 sebagai dasar untuk mengurangi dampak dan mempersiapkan berbagai kemungkinan atas perlambatan ekonomi yang diperkirakan terjadi secara global.
- m. Perlu tersedianya stimulus fiskal seperti subsidi dan lainnya dalam mendorong petani beras lokal yang menjadi andalan konsumsi di Kalimantan Selatan, sehingga dapat meningkatkan produksinya dan meningkatkan NTP sekaligus mengatasi inflasi daerah karena hingga akhir tahun 2022 beras menjadi penyumbang terbesar bagi inflasi di Kalimantan Selatan.
- n. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Selatan masih di bawah angka nasional. Hal ini karena banyak masyarakat di Kalimantan Selatan yang pendidikan menengahnya dilanjutkan di pesantren yang belum diakui sebagai pendidikan formal, sehingga tidak dihitung dalam capaian indikator pendidikan. Untuk itu perlu perubahan sistem pendidikan di pesantren agar dapat diakui



sebagai pendidikan formal di Indonesia, sehingga dapat diperhitungkan sebagai capaian indikator pendidikan.

- o. Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat lebih memfokuskan penggunaan instrumen fiskal berupa APBD yang lebih efektif untuk mencapai indikator sasaran pembangunan seperti IPM, Usia Harapan Hidup, Rata-rata Lama sekolah, Prevalensi *Stunting* dan Harapan Lama sekolah. Pembangunan SDM saat ini sangat penting mengingat saat ini Indonesia berada dalam bonus demografi sebagai modal pembangunan untuk Indonesia yang lebih maju.
- p. Digitalisasi dalam pelayanan maupun operasional Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan kembali agar dapat menyederhanakan berbagai tugas *clerical* yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berdampak pada penyederhanaan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas sehingga menciptakan efisiensi belanja operasi dan organisasi yang ramping namun kaya fungsi.
- q. Perlunya sinergi yang lebih kuat antar lintas sektor oleh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan dan instansi terkait untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi masyarakat dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
- r. Berdasarkan analisis makro *global economics trading* dan ekspektasi analisis, harga batubara s.d. tahun 2024 masih akan menguat. Momentum ini supaya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan nilai tambah dari batubara tersebut. Untuk itu perlu didukung anggaran infrastruktur strategis nasional untuk mendorong nilai tambah dari batubara tersebut, seperti KEK Jorong, KEK Batulicin, dll.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Daftar Pustaka

Jurnal dan Laporan

- Abdullah, Halim. 2004. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Adi, R. Kunto. 2012. Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kabupaten Sukoharjo. Jurnal SEPA, 9(1), p 50-63.
- Ardianti, Sri P.S. 2013. Analisis Nilai Tambah dan Strategi Pengembangan Usaha Industri Pengolahan Rotan (Calamus,SP) Furnitur di Kota Medan. Jurnal SEAA, 2(4), p 3-6.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2021). Tabel Input Output Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Tahun Anggaran 2021. Banjarbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bantacut, T. (2013). Pembangunan Ketahanan Ekonomi dan Pangan Perdesaan Mandiri Berbasis Nilai Tambah. Jurnal Pangan Vol No.2 Juli 2013, 397-406.
- Elmi, Bahrul 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Jakarta; UI Press.
- Erawati, N., Llewelyn, R. 2002. Analisa Pergerakan Suku Bunga dan Laju Ekspektasi Inflasi Untuk Menentukan Kebijakan Moneter di Indonesia. Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, 4(2), 98-107
- Haller, A., & Stolowy, H. (1995). Value Added Accounting in Germany and France: A Conceptual and Empirical Comparison. Annual Congress of the European Accounting Association. Birmingham, United Kingdom, May 10-2: campus.hec.fr.
- Indriyani, S. N. (2016). Analisis Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2005 - 2015. Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana, 4(2).
- Kanwil DJPb Kalimantan Selatan. 2021. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah (LSKPU-TW) Kalimantan Selatan Tahun 2021 (audited).
- Mahi, Ali K. & Trigunarso, Sri I. (2017). Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Kencana.
- Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. 2022. Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan November 2022.
- Susilowati, M. W. K., Wahyuningdyah, R. Y. 2018. Efektivitas BI7DRR dalam Kerangka Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter untuk Pengendalian Inflasi. Jurnal PRAXIS, 1(1).
- Triuwono, I. dan Yustika AE. 2013. Emansipasi Nilai Lokal Ekonomi dan Bisnis Pasca Sentralisasi Pembangunan. Penerbit Bayu Media Publishing, Malang.

Daftar Pustaka

Dasar Hukum

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Nomor 4286. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran RI Nomor 5492. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran RI Nomor 6525. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran RI Nomor 6841. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran RI Nomor 6056. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah Tahun 2022. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 211. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022. Kementerian Keuangan. Jakarta.

Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode Kedua pada Tahun 2022. Kementerian Keuangan. Jakarta.

Indonesia. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 288.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan bulan Desember 2022 sebesar 281,48 USD/Ton. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta.

Provinsi Kalimantan Selatan. 2022. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan: Kalimantan Selatan.

Daftar Pustaka

Jurnal dan Laporan

Kanwil DJPb Kalimantan Selatan. 2022. Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2022.

Kanwil DJPb Kalimantan Selatan. 2022. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah (LSKPU-TW) Kalimantan Selatan Tahun 2022 (*Preliminary*).

Sumber Lain:

Aplikasi MEBE, <https://ditpa.kemenkeu.go.id>

Aplikasi OMSPAN, <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Aplikasi SIKP, <https://sikp.kemenkeu.go.id>

Aplikasi SIMTRADA, <https://djpk.kemenkeu.go.id/simtrada>



Patung Bekantan Banjarmasin

“ Bekantan (nama ilmiah: *Nasalis larvatus*) adalah jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari dua spesies dalam genus *Nasalis*. Bekantan merupakan hewan endemik pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa dan hutan pantai. Ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya adalah hidung panjang dan besar yang hanya ditemukan di spesies jantan ”



Festival Loksado

24-26 Juni 2022

“ Festival Loksado merupakan kombinasi antara pertunjukan budaya masyarakat adat Dayak dengan petualangan menaklukkan arung jeram sungai menggunakan bambu *rafting*. Festival yang mengusung tema "*When Nature Meets Culture*" ini berakar dari budaya dan tradisi masyarakat Dayak di Pegunungan Meratus, Hulu Sungai Selatan. Dahulu, para leluhur menggunakan rakit bambu sebagai alat transportasi air. Diharapkan melalui penyelenggaraan festival ini, potensi alam dan budaya yang dimiliki Loksado harus terus dikembangkan guna mewujudkan Loksado sebagai destinasi unggulan. ”

LAMPIRAN

Kajian Fiskal Regional

KALIMANTAN SELATAN



LAMPIRAN

1. Analisis Location Quotient

$$LQ = \frac{PDRB_{ir}}{Total\ PDRB_r} : \frac{PDRB_{iN}}{Total\ PDB_N}$$

$LQ > 1$, sektor i pada daerah r merupakan sektor unggulan dengan tingkat spesialisasi sektor i lebih besar dibandingkan di tingkat Nasional

$LQ = 1$, sektor i pada daerah r bukan merupakan sektor unggulan dengan tingkat spesialisasi sektor i sama dengan di tingkat Nasional

$LQ < 1$, sektor i pada daerah r bukan merupakan sektor unggulan dengan tingkat spesialisasi sektor i lebih rendah dibandingkan di tingkat Nasional.

2. Analisis Shift Share

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \quad ; \quad D_{ij} = Y_{ij}^* - Y_{ij}$$

$$N_{ij} = Y_{ij} \cdot r_n \quad ; \quad M_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - r_n) \quad ; \quad C_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

$$r_{ij} = \frac{(Y_{ij}^* - Y_{ij})}{Y_{ij}} \quad ; \quad r_{in} = \frac{(Y_{in}^* - Y_{in})}{Y_{in}} \quad ; \quad r_n = \frac{(Y_n^* - Y_n)}{Y_n}$$

Definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

Y_{ij} = PDRB sektor i di wilayah Provinsi

Y_{in} = PDRB sektor i di Nasional

Y_n = PDRB Nasional

Hasil interpretasi:

r_{ij} ; r_{in} ; r_n Mewakili laju pertumbuhan wilayah Provinsi dan Nasional

$M_{ij} > 0$ pertumbuhan sektor i lebih cepat pada wilayah Provinsi, dan sebaliknya.

$C_{ij} > 0$ sektor/wilayah j memiliki daya saing yang lebih baik dibanding sektor/wilayah Provinsi lain untuk sektor i .

$C_{ij} < 0$ sektor i pada Provinsi tidak dapat bersaing dengan baik dibandingkan wilayah Provinsi lain

3. Analisis Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan PDRB (r) \ Kontribusi PDRB (y)	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$r_i > r$	Sektor potensial	Sektor berkembang cepat
$r_i < r$	Sektor maju namun tertekan	Sektor relatif tertinggal

r_i : Laju pertumbuhan PDRB Daerah i

r : Laju pertumbuhan PDRB Nasional

Y_i : Pendapatan per kapita Daerah i

Y : Pendapatan per kapita Nasional

Dengan klasifikasi Tipologi Klassen:

- 1) Jika $y_i > y$ dan $r_i > r$ maka diklasifikasikan sebagai sektor maju dan tumbuh cepat
- 2) Jika $y_i < y$ dan $r_i > r$ maka diklasifikasikan sektor berkembang cepat
- 3) Jika $y_i > y$ dan $r_i < r$ maka diklasifikasikan sektor maju tapi tertekan
- 4) Jika $y_i < y$ dan $r_i < r$ maka diklasifikasikan sektor relatif tertinggal

4. Analisis Overlay

$$RPip = \frac{(Yipt - Yip0)/Yipt}{(Ypt - Yp0)/Yp0}$$

$$RPin = \frac{(Yint - Yin0)/Yint}{(Ynt - Yn0)/Yn0}$$

Keterangan:

$Yipt$ = PDRB sektor i wilayah analisis ke p pada periode tahun akhir.

$Yip0$ = PDRB sektor i wilayah analisis ke p pada periode tahun awal.

Ypt = PDRB total wilayah analisis p pada periode tahun akhir.

$Yp0$ = PDRB total wilayah analisis p pada periode tahun awal.

$Yint$ = PDB sektor i wilayah referensi pada periode tahun akhir.

$Yin0$ = PDB sektor i wilayah referensi pada periode tahun awal.

Ynt = PDB wilayah referensi pada periode tahun akhir.

$Yn0$ = PDB wilayah referensi pada periode tahun awal.

MRP hanya memperhitungkan pertumbuhan sektor, tanpa melihat kontribusi suatu sektor di dalam suatu wilayah. Berikut interpretasi hasilnya:

- Jika nilai $RPip$ positif dan $RPin$ positif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama tinggi → sektor tersebut merupakan potensi, baik di



tingkat regional maupun global (di level wilayah referensinya) (Dominan Pertumbuhan dan Unggul Komparatif (DPUK))

- Jika nilai RPip positif dan RPin negatif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih tinggi dari wilayah referensi → sektor tersebut merupakan potensi di tingkat regional namun secara global tidak berpotensi (Dominan Pertumbuhan namun Tidak Unggul (DPTU)).
- Jika nilai RPip negatif dan RPin positif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih rendah dari wilayah referensi → sektor tersebut merupakan potensi di tingkat global namun secara regional tidak berpotensi (Pertumbuhan Kecil namun Unggul Komparatif (PKUK)).
- Jika nilai RPip negatif dan RPin negatif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama rendah → sektor tersebut tidak berpotensi, baik di tingkat regional maupun global (wilayah referensi) (Tidak Potensial (TP))

Tabel 1 Distribusi Belanja Perlindungan Sosial berdasarkan Pola Konsumsi Susenas

Komoditas	Distribusi Belanja Perlindungan Sosial berdasarkan Pola Konsumsi Susenas
Padi-padian	12.298.547.077
Umbi-umbian	850.054.497
Ikan/udang	13.255.677.404
Daging	4.528.221.338
Telur/susu	7.604.453.037
Sayuran	7.221.325.026
Kacang-kacangan	1.988.403.338
Buah-buahan	6.276.954.138
Minyak	2.925.187.533
Bahan Minuman	3.646.268.244
Bumbu-bumbu	2.570.682.047
Konsumsi Lainnya	2.901.220.479
Makanan Dan Minuman Jadi	47.376.657.994
Rokok	12.836.167.751
Perumahan	62.319.684.953
Aneka Barang dan Jasa	27.665.911.585
Pakaian	6.474.553.013
Barang Tahan Lama	10.343.939.009
Pajak	10.224.965.865
Pesta dan Kenduri	1.859.946.827
Total	245.168.821.154

Sumber: BPS dan SINTESA, diolah

Tabel 2 Distribusi Belanja Perlindungan Sosial ke dalam 52 Klasifikasi Usaha

		Konsumsi Rumah Tangga	Koefisien Konsumsi Rumah Tangga	Distribusi Belanja Perlindungan Sosial berdasarkan Pola Konsumsi Susenas
1.	Pertanian Tanaman Pangan	173.907	0,003023167	12.298.547.077
2.	Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya	270.159	0,004696403	9.209.728.364
3.	Perkebunan Semusim dan Tahunan	429.145	0,007460195	8.847.636.185
4.	Peternakan	1.009.664	0,017551835	12.132.674.374
5.	Jasa Pertanian dan Perburuan	0	0	0
6.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	120.086	0,002087553	0
7.	Perikanan	3.924.993	0,068231475	13.255.677.404
8.	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0	0	0
9.	Pertambangan Batubara dan Lignit	0	3,56764E-09	0
10.	Pertambangan Bijih Logam	147	2,55464E-06	0
11.	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	6.271	0,000109017	0
12.	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0	0	0
13.	Industri Makanan dan Minuman	13.168.610	0,228921083	66.784.281.522
14.	Industri Pengolahan Tembakau	0	0	0
15.	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	401.603	0,0069814	6.474.553.013
16.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	4.125	7,17118E-05	0
17.	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	93.987	0,00163385	0
18.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	115.001	0,001999161	0
19.	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	269.161	0,00467906	0
20.	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1.131.949	0,019677629	0
21.	Industri Barang Galian bukan Logam	85.398	0,00148454	0
22.	Industri Logam Dasar	0	0	0
23.	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	40.422	0,000702694	10.343.939.009
24.	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	516	8,96718E-06	0
25.	Industri Alat Angkutan	142.772	0,002481927	0
26.	Industri Furnitur	279.955	0,004866692	0



Kajian Fiskal Regional

KALIMANTAN SELATAN

Tahun 2022

		Konsumsi Rumah Tangga	Koefisien Konsumsi Rumah Tangga	Distribusi Belanja Perlindungan Sosial berdasarkan Pola Konsumsi Susenas
27.	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	84.184	0,001463442	0
28.	Ketenagalistrikan	1.229.956	0,021381356	0
29.	Pengadaan Gas dan Produksi Es	5.450	9,47407E-05	0
30.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	783.795	0,01362537	0
31.	Konstruksi	62.198	0,001081238	0
32.	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	847.533	0,014733388	0
33.	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	3.952.429	0,068708416	0
34.	Angkutan Rel	0	0	0
35.	Angkutan Darat	446.998	0,00777055	2.901.220.479
36.	Angkutan Laut	434.242	0,007548803	0
37.	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	138.051	0,002399855	0
38.	Angkutan Udara	1.902.390	0,033070855	0
39.	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	350.091	0,006085936	0
40.	Penyediaan Akomodasi	301.642	0,005243695	0
41.	Penyediaan Makan Minum	6.044.353	0,105074098	0
42.	Informasi dan Komunikasi	3.693.456	0,064206466	850.054.497
43.	Jasa Perantara Keuangan	1.035.034	0,017992863	0
44.	Asuransi dan Dana Pensiun	27.577	0,000479395	0
45.	Jasa Keuangan Lainnya	231.814	0,004029819	0
46.	Jasa Penunjang Keuangan	202	3,5038E-06	0
47.	Perumahan	4.170.483	0,072499034	62.319.684.953
48.	Jasa Perusahaan	10.276	0,000178638	0
49.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	49.447	0,000859576	0
50.	Jasa Pendidikan	3.861.712	0,067131405	12.446.366.878
51.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.849.385	0,049533268	17.079.491.534
52.	Jasa lainnya	3.344.103	0,058133371	10.224.965.865
Input Antara		57.524.672	1	245.168.821.154
Input Antara Impor Luar Negeri				
Input Antara Impor Antar Provinsi				
Kompensasi Tenaga Kerja				
Surplus Usaha (termasuk pendapatan campuran) Bruto				
Pajak Atas Produksi Lainnya				
Subsidi Atas Produksi Lainnya (-)				
Nilai Tambah Bruto ADH Produsen				
Total Input ADH Produsen				

Tabel 3 Dampak Belanja Perlindungan Sosial terhadap Nilai Tambah Masing-Masing Sektor

Kode I-O	Sektor	Kenaikan nilai tambah (dalam jutaan Rp)
1.	Pertanian Tanaman Pangan	21.227
2.	Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya	7.921
3.	Perkebunan Semusim dan Tahunan	16.907
4.	Peternakan	9.886
5.	Jasa Pertanian dan Perburuan	2.162
6.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	89
7.	Perikanan	14.952
8.	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	4
9.	Pertambangan Batubara dan Lignit	252
10.	Pertambangan Bijih Logam	38
11.	Pertambangan dan Penggalan Lainnya	281
12.	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-
13.	Industri Makanan dan Minuman	27.789
14.	Industri Pengolahan Tembakau	-
15.	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	2.651
16.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-
17.	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	288
18.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	56
19.	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	528
20.	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	346
21.	Industri Barang Galian bukan Logam	576
22.	Industri Logam Dasar	-
23.	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	4.049
24.	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	3
25.	Industri Alat Angkutan	31
26.	Industri Furnitur	28
27.	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	63
28.	Ketenagalistrikan	206
29.	Pengadaan Gas dan Produksi Es	16
30.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	374



Kode I-O	Sektor	Kenaikan nilai tambah (dalam jutaan Rp)
31.	Konstruksi	2.976
32.	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	883
33.	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	5.782
34.	Angkutan Rel	-
35.	Angkutan Darat	2.308
36.	Angkutan Laut	281
37.	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	74
38.	Angkutan Udara	171
39.	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	424
40.	Penyediaan Akomodasi	569
41.	Penyediaan Makan Minum	385
42.	Informasi dan Komunikasi	1.986
43.	Jasa Perantara Keuangan	3.965
44.	Asuransi dan Dana Pensiun	440
45.	Jasa Keuangan Lainnya	591
46.	Jasa Penunjang Keuangan	13
47.	Perumahan	53.524
48.	Jasa Perusahaan	1.210
49.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	115
50.	Jasa Pendidikan	7.708
51.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.372
52.	Jasa lainnya	9.113

Tabel 4 Matrik Keterkaitan Belanja K/L, DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa

Bel. K/L Program Prioritas	DAK Fisik		DAK Non Fisik		Dana Desa	
	Bidang	Realisasi	Bidang	Realisasi	Kegiatan	Realisasi
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertanian	71.649.399.616			Peningkatan sarpras pariwisata, bantuan pertanian & perikanan, peningkatan produksi tanaman pangan dan perikanan, penguatan ketahanan pangan	193.040.118.424
	Air Minum	94.693.902.070				
	Kelautan dan Perikanan	12.346.970.404				
Jumlah		178.690.272.090				193.040.118.424
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Perumahan dan Permukiman	8.958.845.000			Pembangunan jembatan, pembangu pelabuhan, pembangunan PAUD, penyertaan modal BUMDes, pelatihan peningkatan kapasitas SDM	97.451.759.626
Jumlah		8.958.845.000				97.451.759.626
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan	305.465.841.229	BOS	649.005.891.159	Peningkatan kualitas SDM yang sehat dan terampil, penyelenggaraan desa siaga, BLT desa dan pencegahan stunting	614.055.695.317
	Kesehatan dan KB	210.271.395.500	BOP PAUD	72.462.722.000		
	Sanitasi	48.221.831.671	BOP Kesenian	28.646.150.000		
Jumlah		563.959.068.400		750.114.763.159		614.055.695.317
Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan					Dukungan sarana dan prasarana kebudayaan agama, adat dan pembinaan kesenian dan kebudayaan tingkat desa	3.674.084.100
Jumlah						3.674.084.100
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Jalan	334.651.028.343			Pembangunan jembatan, jalan, irigasi, revitalisasi sungai sanitasi pembangunan sarana dan prasarana.	257.868.793.624
	Irigasi	52.737.032.006				
Jumlah		387.388.060.349				257.868.793.624
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup	6.310.905.999			Pembangunan pemeliharaan sumber air, pemeliharaan fasilitas persampahan, penanggulangan bencana.	62.562.505.368
	Kehutanan	878.183.460				
Jumlah		7.189.089.459				62.562.505.368
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi					Pelatihan di bidang hukum, Pelaksanaan PILKADA	1.304.692.550
Jumlah						1.304.692.550
TOTAL		1.146.185.335.298		750.114.763.159		1.229.957.649.009